

Erond L. Damanik
Editor

Prof. Bungaran Saragih
Kata Pengantar

HABONARON DO BONA

Tantangan dan Refleksi Abad 21



Cetakan ke 2 dan diterbitkan atas dukungan:
Majelis Hapartuhaon Nabolon
Dewan Pimpinan Pusat Partuha Maujana Simalungun
(MHN DPP-PMS), 2018



HABONARON DO BONA

Tantangan dan Refleksi Abad 21

Eron L. Damanik
(editor)

Simetri Institute
Medan
2017



Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

HABONARON DO BONA

Tantangan dan Refleksi Abad 21

Erond L. Damanik
(editor)

diterbitkan atas dukungan
Majelis Hapartuhaon Nabolon
Dewan Pimpinan Pusat Partuha Maujana Simalungun
(MHN DPP PMS)



DAMANIK, Erond L. (editor)
HABONARON DO BONA
Tantangan dan Refleksi Abad 21

Cet. 1 – Medan, Simetri Institute
November, 2017

Constantia, size 11, halaman 6 + 12 + 149

ISBN: 978-602-50158-47

1. Habonaron
2. Bona
3. Tantangan
4. Refleksi di Abad 21

I Judul II. Damanik, Erond L. (editor)

Gambar sampul: Ilustrasi *Habonaron do Bona*

Hak cipta 2017, pada penulis.

Dilarang mengutip sebahagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa seizin sah dari penerbit.

Cetakan pertama, November 2017

Desain sampul : team desain grafis Simetri Institut

Diterbitkan:

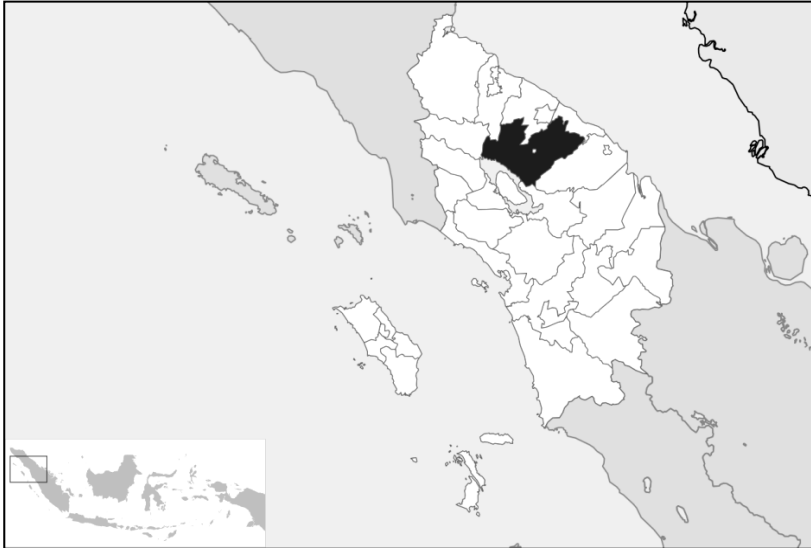
Simetri Institute

Medan-20225-

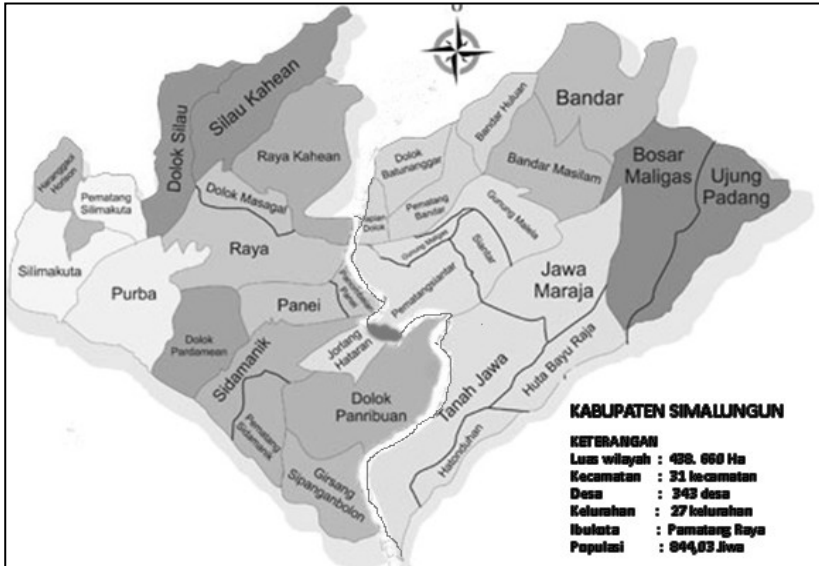
Sumatera Utara

Email: simteri.institute@gmail.com

Dicetak oleh Sigma Printshop, Yogyakarta
Isi diluar tanggungjawab percetakan



Peta Provinsi Sumatera Utara



Peta Kabupaten Simalungun, skala 1: 400.000

PENGANTAR PENERBIT

Buku ini merupakan hasil pemikiran sejumlah cendekiawan (*maujana*) Simalungun yang dipresentasikan pada *Focus Group Discussion (FGD)* bertemakan '*Aktualisasi dan Implementasi Habonaron do Bona pada Masyarakat Simalungun Abad 21*', pada tanggal 12 Agustus 2017 di Hotel Le Polonia Medan. FGD dimaksud diprakarsai Prof. Bungaran Saragih, ketua *Majelis Hapartuhaon Nabolon*, Dewan Pimpinan Pusat *Partuha Maujana Simalungun* (MHN DPP PMS) bekerjasama dengan *Partuha Maujana Simalungun* cabang Kota Medan.

Pelaksanaan FGD dimaksud adalah aktualisasi dan implementasi *Habonaron do Bona (HdB)* pada abad 21. Karena itu, *HdB* sebagai nilai-nilai luhur (*adiluhung*) sekaligus menjadi cita-cita besar (*adicitita*) setiap orang Simalungun. *HdB* adalah referensi personal sekaligus sumber motivasi untuk menafsirkan dan memahami situasi sosial yakni dunia sosial yang dinamis. Karena itu, *HdB* yang menjadi falsafah sosial orang Simalungun perlu mendapatkan pemikiran atau pengkajian untuk mendapatkan aktualisasi (*pemutakhiran*) sekaligus implementasinya di abad 21.

Hasil pemikiran dan pengkajian lewat *FGD* tentang *HdB* dari sejumlah cendekiawan Simalungun diperoleh aktualisasi dan implementasi *HdB* di abad 21 sebagai berikut: *pertama*, *Habonaron do Bona (HdB)* adalah klausa yang berarti '*Keberanan adalah Pangkal*' yakni kebenaran sebagai basis seluruh kegiatan dan aktivitas sosial menyangkut epistemologi, ontologi dan aksiologi. *HdB* memiliki karakteristik yakni universal, mendasar dan umum. Karena itu, *HdB* sangat relevan dengan situasi dan kondisi abad 21 dimana kebenaran sebagai ilmu maupun praksis menjadi penjurur seluruh kehidupan sosial

Hal *kedua* bahwa *HdB* masih sangat relevan dalam kehidupan politik maupun adat istiadat Simalungun. Kehidupan politik abad 21 dimana penyebaran Hak Azasi

Manusia, demokrasi maupun kehidupan ekonomi yang semakin terbuka, membutuhkan kebenaran sebagai pangkal tolaknya. Kebenaran menjadi sokoguru aktifitas politik sehingga tidak terjebak pada transaksionalisme, pragmatisme maupun KKN. Kehidupan norma (hukum) yang dipertontonkan sebagai 'teater' dan cenderung dramaturgis sekarang ini membutuhkan kebenaran sebagai supremasi dan penegakan hukum. Demikian halnya dalam kehidupan adat istiadat bahwa kebenaran menjadi pangkal tolak kebenaran pelaksanaan adat istiadat. Adat istiadat sebagai kebiasaan yang menyeluruh pada kehidupan sosial membutuhkan ketegasan, kebenaran maupun kekompakan sebagai identitas sosial orang Simalungun. Karena itu, *HdB* masih sangat relevan dengan situasi dan abad 21 yang bergerak dinamis.

Nilai-nilai *HdB* bukan saja menjadi falsafah sosial orang Simalungun, tetapi hal yang paling dibutuhkan adalah menjadikan *HdB* sebagai virus mental untuk memperoleh keberhasilan (kesuksesan). Transformasi *HdB* dari nilai-nilai kultural atau falsafah sosial menjadi virus sukses ialah karena *HdB* itu sendiri diejawantahkan dalam sikap mental. Sikap mental ini menjadi spirit kerja yakni semangat untuk berprestasi. Dengan demikian, sebagai sikap mental yang mencerminkan *habonaron*, maka *HdB* menjadi virus keberhasilan. Tentu saja, setiap orang Simalungun yang menjadi bagian dari *HdB* ini harus mengutamakan pendidikan sebagai cara memperoleh kebenaran itu dan kemudian menjadikannya guna meraih peluang sosial, posisi sosial ataupun bargaining sosial. Dengan cara demikian *HdB* tidak lagi semata-mata sekedar falsafah sosial tetapi operasionalnya dapat menjadi virus keberhasilan.

Penerbit

KATA PENGANTAR



Tugas kita adalah ‘membumikan *Habonaron do Bona*’ pada setiap orang Simalungun! *Habonaron do Bona (HdB)* adalah sikap mental orang Simalungun yang formasinya berasal dari nilai sosiokultural, sosiopolitik, sosioireligio, sosioekonomi, sosiohistoris dan sosioiregio yang mencerminkan karakter (kepribadian) orang Simalungun. *HdB* adalah referensi personal (*personal reference*), sumber motivasi (*motivation source*) maupun pandangan hidup (*worldview*) guna memandang dan memahami dunia sosial (*social world*). *HdB* adalah sebuah gagasan luhur (*adiluhung*) sekaligus menjadi cita-cita terbesarnya (*adicita*) orang Simalungun guna menafsirkan dan memahami dunia sosialnya dengan berperilaku benar (*bonar*). Dengan demikian, *HdB* sebagai ilmu memuat epistemologi, ontologi dan aksiologi yang fundamental bagi setiap orang Simalungun. demikian pula secara praksis, *HdB* memuat aturan sebagai: i) norma (akhlak), ii) etika, iii) sosial dan politik, serta iv) urusan rumah tangga.

Dunia sosial adalah situasi sosial (*social situation*) berupa kenyataan sosial (*social reality*) yang dipahami sebagai kesempatan dan tantangan yang harus diperoleh berdasarkan kompetisi dan kontestasi sesuai dengan kebenaran (*truth*) sebagai pangkalnya (*basic*). Karena itu, *HdB* yakni ‘*Kebenaran adalah Pangkal*’ (*the Truth is the Basic*) eksistensinya berada di dalam kepala kemudian dielaborasi dengan emosi (*emotion*) dan akhirnya menampak pada perilaku sosial (*social behavior*). Jadi, *HdB* sebagai sikap mental bersifat universal, umum dan mendasar dimana kebenaran menjadi hakikat hidup, berlaku universal dan mendasar dalam setiap aktifitas hidup.

Sebagai falsafah sosial, *HdB* telah hidup pada kebudayaan Simalungun sebagaimana ditemukan pada mansukrip kuna *Parmongmong Bandar Sahuda* (Penutur dari Bandar) yakni sebuah wilayah di Simalungun yang kini disebut Pamatang

Bandar, Kabupaten Simalungun. *HdB* adalah seloka yang dikumandangkan burung *Nanggordaha* (Garuda) yakni kendaraan *Dewa Wishnu* (dewa pengawal dan penjaga semesta) sewaktu peperangan orang Simalungun dengan bangsa lain. Karena itu, seloka yang kemudian diadopsi dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Simalungun No. 5 tahun 1960 tertanggal 14 Desember 1960 sebagai falsafah sosialnya. Falsafah sosial ini merupakan hasil pemikiran orang Simalungun yang mencerminkan dan menjiwai pemikiran, spirit (semangat) dan karakter orang Simalungun.

Dunia yang dinamis seperti tergambar pada abad 21 sekarang, yakni sebuah era dimana globalisasi menyeruak ke setiap sendi kehidupan bermasyarakat, batas-batas negara yang semakin memudar, transaksi ekonomi dan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*), kehidupan politik dan penyebaran demokrasi, universalisme manusia, Hak Azasi Manusia, dan lain-lain seolah tidak dapat dipungkiri lagi. Pada saat yang sama, kompetisi (persaingan) dan kontestasi (pertarungan) semakin tinggi dan seolah-olah menjadi basis setiap institusi, wirausaha, partai politik dan pemerintahan membuat manusia terjebak dengan hal-hal pragmatisme, transaksionalisme, maupun kolusi, nepotisme serta korupsi.

Kemajuan teknologi dan informasi yang sangat mutakhir, membuat setiap individu menjadi generasi virtual (*virtual generation*) yang seolah tidak bisa lepas dari *electrical fashion* seperti selular pintar (*smarthphone*), telepon genggam (*handphone*), *gadget*, *laptop* ataupun *personal computer* yang tersambung ke 'jaringan internasional' atau internet. Dalam bidang sosiopolitik misalnya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdampak buruk seperti munculnya kampanye hitam, rasisme, fundamentalisme dan radikalisme. Dunia global yakni *global village* seakan berubah ke tatanan yang lebih kecil yakni meningkatnya batas-batas manusia, negara maupun teritorial.

Lain halnya, dalam bidang ekonomi dan perdagangan bahwa globalisasi berdampak pada terciptanya *consumer society* atau budaya konsumen yang di dalamnya terdapat bentuk halusinasi, mimpi, artifisialitas, kemasan wujud komoditi, yang kemudian dikonstruksi sosial melalui komunikasi ekonomi (iklan, show, media) sebagai kekuatan tanda (*semiotic power*) kapitalisme. Konsumsi barang-barang material itu tidak didasarkan kepada nilai guna (*utility*) tetapi cenderung pada mimpi, hasrat, identitas dan komunikasi pada empat hal yakni *food, fashion, electrical fashion* dan *recreation*.

Dunia sosial budaya dewasa ini lebih menggandrungi budaya massa (*mass culture*) ataupun budaya populer (*popular culture*) yang mengikis budaya tradisional (*traditional culture*). Lingkup sosial budaya dewasa ini bergerak ke pola kehidupan dan kebudayaan luar yang cenderung bertolak belakang dengan budaya luhur bangsa Indonesia dan Simalungun pada khususnya. Dampak akhir dari situasi ini adalah timbulnya *virtual generation* dengan gaya hidup (*lifestyle*) hedonistis.

Lebih jauh lagi, dunia pendidikan pun tidak lepas dari pragmatisme. Sebuah kasus menggemparkan di Indonesia baru-baru terjadi berupa merebaknya plagiarisme dan fabrikasi tesis dan disertasi di perguruan tinggi. Situasi ini patut menjadi pemikiran kita dimana dunia pendidikan yang harusnya bebas nilai dan objektif tidak dapat melepaskan diri dari pragmatisme dan transaksionalisme.

Seluruh situasi ini membawa kita pada pemikiran yang secara khusus di Simalungun yang mengarusutamakan kebenaran sebagai falsafah sosialnya. Bagaimanakah kedudukan HdB pada abad 21 itu?. Untuk itu, *Majelis Hapartuhaon Na Bolon Partuha Maujana Simalungun* bergerak melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* yang diharapkan dapat menghasilkan beberapa pemikiran tentang kedudukan HdB itu pada abad 21. Bagaimanapun juga, nilai-nilai HdB ini berhubungan erat dengan pemerintahan bersih (*clean and good government*), pro-rakyat, berkeadilan, jujur dan pemerataan

dalam pembangunan daerah, terutama dalam melahirkan masyarakat sipil yang jujur, adil dan menjunjung tinggi *Habonaron* (kebenaran) pada kehidupan sehari-hari.

Dari pemikiran narasumber FGD, diketahui bahwa nilai-nilai *HdB* masih sangat relevan dengan situasi dan kondisi abad 21. Relevansi itu tergambarkan pada pengertian *HdB* yang mengutamakan kebenaran (*truth* atau *habonaron*) sebagai pangkal ilmu yakni epistemologi, ontologi, aksiologi tetapi juga pada tataran praksis yaitu norma (akhlak), etika, sosial dan politik, serta urusan rumah tangga. Hal ini seperti disebut Saragih (2017) bahwa kebenaran itu bersifat universal, mendasar dan general. Hal lainnya karena sesungguhnya kebenaran itu sangat fundamental dalam kehidupan sosial karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan religi.

Dari pemikiran narasumber lainnya seperti Purba (2017) menyebut bahwa nilai-nilai *HdB* sangat relevan dengan kehidupan politik abad 21. Inti pokok *HdB* yakni kebenaran menjadi sokoguru dalam kehidupan perpolitikan ditingkat regional Simalungun, regional Sumatra Utara maupun nasional (Indonesia). Situasi kebenaran itu juga menerobos jauh ke dunia hukum dimana kebenaran menjadi benteng terakhir hukum itu sendiri. Jikapun terdapat beberapa orang Simalungun yang terjebak dengan kasus hukum, korupsi, perselingkuhan, nepotisme maupun kolusi, maka mereka itu adalah cermin orang Simalungun yang mengelak atau menjauhi nilai-nilai *HdB*.

Dalam kehidupan adat istiadat seperti disebut Purba (2017) bahwa nilai-nilai *HdB* melekat dengan tatanan pelaksanaan adat istiadat Simalungun. Dalam hal ini, kedudukan struktur sosial *pentagon* (segilima) antara *tondong*, *tondong ni tondong*, *boru*, *boru ni boru* dan *sanina* merupakan penopang hidup guna meraih keberhasilan adat. Selain itu, penghargaan terhadap perempuan dan anak-anak (*niombah*) sangat kentara pada adat istiadat Simalungun. Dengan begitu, orang Simalungun pada abad 21 dewasa ini harus berani menyuarakan kebenaran

sejarahnya, kebenaran identitasnya, kebenaran haknya tanpa mengabaikan kewajibannya. Narasumber berikutnya seperti Damanik (2017) menyebut bahwa *HdB* harus menjadi virus sukses. Hal ini diyakini karena *HdB* adalah sikap mental yang ada dalam setiap diri (individu) Simalungun. Sebab *HdB* adalah sikap mental, maka *HdB* seharusnya menjadi virus sukses yakni suatu semangat kolektif untuk meraih kesuksesan atau keberhasilan. Kondisi demikian ini sangat relevan dengan virus sukses yang disebut dengan *Need for Achievement (n Ach)* seperti pada masyarakat Kakinada di India.

Pada intinya, *HdB* masih sangat relevan pada kehidupan sosial abad 21. Hanya saja, sebagai dasar falsafah sosial yang luhur dan memuat cita-cita, maka *HdB* masih membutuhkan penjelasan terutama dalam kerangka operasional. Dalam arti bahwa *HdB* seharusnya memiliki batangtubuh sebagai referensi (acuan) idiologi, etika, norma dan ahlak yang mengatur dan melingkupi kehidupan sosial orang Simalungun. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah kita yang kelak akan kita elaborasi bersama.

Tuntasnya pelaksanaan *FGD* maupun pembuatan buku ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Karena itu, secara pribadi saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang bersusah payah mendukung pelaksanaan pekerjaan mulia ini seperti panitia, narasumber, notulis, dan peserta yang telah berkontribusi aktif dalam memberikan pemikiran terhadap aktualisasi dan refleksi *HdB* pada abad 21 ini. Bagaimanapun juga, buku ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, dibutuhkan saran konstruktif guna pembaruan *HdB* pada abad 21. Semoga bermanfaat!

Medan, November 2017
Majelis Hapartuhaon Nabolon
Dewan Pimpinan Pusat Partuha Maujana Simalungun

Prof. Dr. Bungaran Saragih, M.Ec.

DAFTAR ISI

Pengantar penerbit	i
Kata pengantar (<i>Bungaran Saragih</i>)	iii
Daftar isi	ix
Catatan editor (<i>Eron L. Damanik</i>)	xi
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar belakang	1
B. Urgensi dan signifikansi	5
Bab II <i>Habonaron do Bona</i> : perspektif linguistik, Semiotik dan filosofis (<i>Amrin Saragih</i>)	9
A. Pendahuluan	9
B. Perspektif linguistik fungsional	9
C. Perspektif semiotik	15
D. Persepsi filosofis	16
E. Simpulan	16
Bab III <i>Habonaron do Bona</i> : Mewujudkan manusia Simalungun Unggul dan Kompetitif menjawab tantangan abad ke-21 (<i>Ibnu Hajar</i>)	19
A. <i>HdB</i> sebagai nilai luhur	19
B. Menjadikan <i>HdB</i> sebagai virus sukses	21
C. Tantangan masyarakat Simalungun abad 21	23
D. <i>HdB</i> dan <i>Good Governance</i>	26
E. Tantangan pengembangan SDM aparatur daerah Simalungun	30
Bab IV <i>Habonaron do Bona</i> : Perspektif Politik di Simalungun (<i>Sarmedi Purba</i>)	35
Bab V <i>Habonaron do Bona</i> : makna filosofis pelaksanaan adatistiadat Simalungun (<i>Juandaharaya Dasuha</i>)	41
A. Pendahuluan	41
B. Apa itu <i>Habonaron do Bona</i>	41
C. Nilai <i>HdB</i> pada adat Simalungun	44
D. Penutup	58

Bab VI	<i>Habonaron do Bona: Filosofi kehidupan Orang Simalungun Abad 21 (Hisarma Saragih)</i>	61
	A. Pengantar	61
	B. Pembahasan.....	63
	C. Aktualisasi <i>HdB</i> menghadapi abad 21.....	77
	D. Penutup.....	80
Bab VII	<i>Habonaron do Bona: Tinjauan agama Islam (Nikmat Saragih)</i>	83
Bab VIII	<i>Habonaron do Bona: makna filosofis bagi Masyarakat Simalungun (J.S.M. Damanik)</i>	87
Bab IX	<i>Habonaron do Bona (HdB): Sebuah refleksi abad 21 (Erond L. Damanik)</i>	91
	A. Pendahuluan.....	91
	B. Formasi falsafah sosial <i>HdB</i>	97
	C. Referensi nilai dan etika sosial.....	101
	D. Transformasi sebagai spirit keberhasilan	106
	E. Menempatkan <i>HdB</i> pada kenyataan sosial	114
	F. Refleksi abad 21.....	123
	G. Penutup.....	129
Bab X	Penutup	135
	A. Kesimpulan	135
	B. Rumusan <i>FGD HdB</i> abad 21.....	137
	C. Rekomendasi praksis <i>FGD HdB</i> abad 21	140
	Tentang kontributor	143
	Lampiran susunan panitia <i>FGD</i>	149

CATATAN EDITOR

Habonaron do Bona (HdB) adalah falsafah sosial orang Simalungun yang secara yuridis telah disyahkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Simalungu No. 5 tahun 1960 tertanggal 14 Desember 1960. Sebagai falsafah sosial *HdB* merupakan pemikiran orang Simalungun yang mencerminkan dan menjiwai sekaligus menjadi karakter (kepribadian) setiap orang Simalungun. Karena itu, formasi *HdB* berasal dari nilai-nilai kultural dan sosial termasuk agama (religi), ekonomi dan politik yang sudah berlangsung lama pada orang Simalungun. Dengan demikian, *HdB* adalah '*filosofiche grondslag*' atau dasar filosofis yang paling mendasar bagi sikap mental orang Simalungun.

Secara linguistik, semiotik dan filosofis, *HdB* diartikan sebagai '*Kebenaran adalah Pangkal*' (*the Truth is the Basic*), yang bersifat universal, mendasar dan umum. Karena itu, *HdB* menjadi sumber ilmu dan praksis. Sebagai sumber ilmu, *HdB* berkenaan dengan epistemologi, ontologi dan aksiologi. Sedangkan secara praksis, *HdB* berkaitan dengan: i) norma (akhlak), ii) etika, iii) sosial dan politik, serta iv) urusan rumah tangga.

Sebagai falsafah sosial, *Hdb* adalah sikap mental yang berada di dalam setiap kepala orang Simalungun. Sikap mental ini merupakan kombinasi antara pemikiran dan emosi yang ditunjukkan melalui tindakan sosial (*social action*). Kombinasi ketiganya (pemikiran, emosi dan tindakan) memunculkan perilaku sosial kolektif (*collective social behavior*). Dengan demikian, *HdB* adalah referensi personal (*personal reference*) sekaligus sumber motivasi (*motivation source*) guna menafsir dan memahami setiap situasi sosial (*social situation*).

Situasi sosial ini menggambarkan peluang, kesempatan, posisi yang harus ditanggapi sehingga dapat diperoleh (dicapai) dengan baik. Dengan demikian, situasi sosial ialah dunia sosial

pada setiap aktifitas sosial baik pada aspek hukum, politik, kultural, kebudayaan, ekonomi, dan lain-lain yang menggambarkan kompetisi (persaingan) maupun kontestasi (pertarungan) sosial. Setiap situasi sosial ini dapat diperoleh (dicapai) dengan baik apabila setiap individu (*the self*) memiliki keunggulan mutlak maupun komparatif dimana kebenaran sebagai basisnya.

Pada tatanan pemikiran seperti ini, *HdB* bukan lagi semata-mata berfungsi sebagai falsafah sosial yakni referensi personal tetapi juga sebagai sumber motivasi sosial. Sebagai referensi personal maupun sumber motivasi maka *HdB* menjadi sikap mental yang ada dalam setiap kepala individu (*the self*) serta menjadi basis perilaku sosialnya. Dengan demikian, *HdB* bukan saja bersifat teoritis tetapi juga bersifat praksis dan karenanya, *HdB* dapat dioptimalkan menjadi virus keberhasilan (virus sukses).

Justru, urgensi dan signifikansi *HdB* pada abad 21 ialah kemampuan melakukan transformasi sosial terhadap *HdB* itu sendiri yaitu bukan semata-mata menjadi falsafah sosial, tetapi sekaligus harus mampu menjadi virus keberhasilan. Sebagai kenyataan sosial (*social reality*) kebenaran (*habonaron*) adalah abadi. *Habonaron* tetap menjadi tujuan dan sasaran dan karena itu *HdB* tidak bersifat temporer. Dengan demikian, *HdB* sebagai '*filosofiche grondslag*' atau dasar filosofis tetap menjadi paling mendasar bagi sikap mental orang Simalungun. Karena itulah, *HdB* masih sangat aktual pada abad 21. Hanya saja, dalam implementasinya masih membutuhkan kerangka operasional sebagai transformasi *HdB* sesuai situasi sosial abad 21 yang semakin dinamis.

Medan, November 2017

Erond L. Damanik
Editor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Abad 21 ditandai beberapa hal seperti: i) perkembangan teknologi yang mutakhir, ii) hubungan antar bangsa semakin kuat, iii) terjadi perubahan cara hidup, serta iv) interaksi warga negara semakin dekat dengan warga negara lain. Dengan begitu, karakteristik abad 21 seperti disebut Litbang Kemdikbud (2013)¹ ialah: a) informasi yang tersedia dimana saja dan dapat diakses kapan saja; b) komputasi yang semakin cepat; c) otomatisasi yang menggantikan pekerjaan-pekerjaan rutin; dan d) komunikasi yang dapat dilakukan dari mana saja dan kemana saja. Karena itu, generasi yang muncul pada abad 21 yang disebut dengan generasi virtual (*virtual generation*) memiliki karakteristik umum: i) *multitasking*, ii) *multimedia learning*, iii) *online social learning* atau media sosial (*social networking*), dan iv) *online info searching* yaitu *search engine optimization* (*SEO*) dengan mesin pencari seperti *Google*.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern tersebut, masyarakat suatu negara dituntut mampu bersaing dan melakukan penyesuaian untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Jika sumber daya manusia suatu negara berkualitas maka negara tersebut maju. Maju mundurnya suatu negara tersebut erat kaitannya dengan aspek pendidikan. Jadi, menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, sangat tergantung pada kualitas pendidikannya.

Arus globalisasi yang semakin deras di abad 21 sering berimplikasi buruk bagi kehidupan sosial suatu negara termasuk Indonesia dan lebih khusus bagi orang Simalungun. Tanpa terasa, pola kehidupan dan budaya global telah merasuk

¹Lihat Litbang Kemdikbud.2013. *Kurikulum 2013: Pergeseran Paradigma Belajar Abad-21*. Retrieved September 29, 2015,

dan merajai sebagian besar kehidupan sosial budaya di Indonesia termasuk Simalungun. Kehidupan dan budaya global itu ialah seperti makanan, minuman, pakaian, kesenian, politik dan lain-lain. Seringpula kita abai bahkan lupa bahwa aspek terpenting dalam masyarakat yaitu budaya (*culture*), ternyata sedikit demi sedikit tergerus dan tergantikan oleh budaya dan kehidupan global itu. Kita justru terjebak dengan budaya konsumen (*consumer society*) yaitu praktek konsumerisme dalam 4 (empat) hal yakni *food*, *fashion*, *electrical fashion* dan *recreation* dengan mengonsumsinya diluar kebutuhan material tetapi justru ialah konsumsi tanda, hasrat dan mimpi.

Proses globalisasi muncul sebagai akibat adanya arus informasi dan komunikasi online yang setiap saat dan dimanapun dapat dijangkau dengan biaya murah. Sebagai akibatnya ialah terbentuknya masyarakat dunia menjadi satu lingkungan yang seolah-olah berdekatan dan menjadi satu sistem pergaulan dan menjadi satu sistem budaya yang sama. Seringkali karena ketidaksiapan manusia dalam menghadapi dinamika sosial budaya global itu, justru pada akhirnya menimbulkan masalah sosial.

Etnik Simalungun adalah salah satu kelompok etnik yang bermukim di Sumatra Utara. Masyarakat ini memiliki kekhasan tersendiri yang sudah mengenal sistem politik berupa monarkhis bercorak piramidal di mana raja merupakan pusat dari kehidupan sosial budaya dan politiknya. Sebelum dihapuskan pada tahun 1946, orang Simalungun sudah hidup dalam kehidupan sosialnya yang diresapi oleh nilai-nilai budaya lokalnya dalam lingkup kehidupan tradisional raja-raja Simalungun. Diantara nilai budaya yang terkenal kedalaman nilai filosofisnya adalah prinsip hidup *Habonaron do Bona (HdB)* yang menjiwai dan menjadi nafas spiritualitas orang Simalungun sejak zaman kehadiran orang Simalungun di Sumatera Timur. Prinsip hidup (*way of life*) orang Simalungun ini mengedepankan prinsip *habonaron* (kebenaran, keadilan dan kejujuran) sebagai awal dan dasar kehidupan sosial mereka.

HdB menjadi sikap dan titik tolak dalam setiap peri kehidupan masyarakat Simalungun. Dalam seni lukis orang Simalungun gambaran *habonaron do bona* ini jelas terlihat dalam komposisi warna dominan putih yang melambangkan ketulusan, kebenaran dan keadilan tadi. Sikap menyerahkan sepenuhnya pembenaran dan perjuangan keadilan kepada Yang Maha Kuasa (*Naibata*). Menjunjung tinggi sportifitas dalam memperjuangkan ide maupun gagasan memperoleh kemajuan dalam segala bidang kehidupannya. Menjauhi sikap *jungkat* (jahat, manipulasi, persekongkolan jahat, dan lain-lain) dalam menjalani kehidupannya yang berakibat mencelakai pada pelakunya (*hajungkaton do sapata*).

Pada masa pemerintahan Bupati Simalungun Radjamin Poerba, nilai luhur masyarakat Simalungun *HdB* dijadikan menjadi motto dan lambang daerah Kabupaten Simalungun. Motto Kabupaten Simalungun itu secara yuridis formal ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Simalungun No. 5 tahun 1960 tertanggal 14 Desember 1960 di Pematangsiantar. Sebelum dijadikan sebagai motto dan lambang daerah, Bupati Simalungun Radjamin Poerba pada masa itu terlebih dahulu membentuk tim peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, motto *HdB* sudah sejak lama hidup dalam kehidupan orang Simalungun. Motto ini tertulis dalam beberapa *pustaka laklak* terutama dalam *pustaka* kuno "*Parmongmong Bandar Sakhuda*" dari Pamatang Bandar Sakhuda Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun milik Haji Alip Damanik.

Selain sebagai motto Kabupaten Simalungun dalam lambang daerahnya, *HdB* ditetapkan sebagai motto Universitas Simalungun (USI) Pematangsiantar, sejak tanggal pendiriannya yakni pada tanggal 9 April 1966. Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 1984, USI Pematangsiantar selaku lembaga akademik melaksanakan lokakarya *Habonaron do Bona* dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota DPRD dan unsur pemerintahan Kota Pematangsiantar dan

Kabupaten Simalungun. Hasil lokakarya itu menyebutkan bahwa filosofi *Habonaron do Bona* telah lama hidup pada masyarakat Simalungun sejak Simalungun itu ada.

Para tetua masyarakat Simalungun selalu mengajarkan *locaal genius* ini dari generasi ke generasi, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kejujuran (*habonaron*) dan taat, setia pada hasil musyawarah adat (*harungguan, panriahan*) sebagaimana dalam papatah lama orang Simalungun: “*salana ma saluar, saluar panjang kaki, hata na dob tarluar nadong haulakansi*”, “*anggo horbou tinalini do sitoguon, anggo jolma hatani do sijolomon*”, “*bijak mosor pinggol ase ulang mosor hata*” dan lain-lain.

Beranjak dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suku Simalungun sejak kehadirannya di Sumatera Timur sudah diatur dan hidup sesuai pandangan hidup *HdB*. Bila dihubungkan dengan pengumpulan kekinian orang Simalungun dewasa ini, mau tidak mau, orang Simalungun harus menunjukkan jati dirinya yang unik tersebut di antara suku-suku bangsa di Indonesia ini. Salah satu nilai ideal masyarakat modern saat ini yang relevan dengan kehidupan sosial orang Simalungun adalah prinsip memperjuangkan kebenaran dan keadilan yang juga terdapat dalam kehidupan orang Simalungun *HdB*.

Nilai *HdB* ini tidak bertentangan dengan ajaran moral manapun dalam agama-agama dewasa ini, sebab baik agama apapun di dunia ini semuanya mengajarkan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kejujuran yang terangkum di dalam prinsip hidup *HdB*. Apalagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di mana Simalungun merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan darinya, prinsip keadilan, kebenaran dan kejujuran dalam *HdB* itu sangat relevan dan urgensi benar dalam menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini di tengah gempuran pengaruh-

pengaruh budaya asing yang mengancam nilai-nilai moral ketimuran yang dianut di Indonesia.

HdB sebagai nilai-nilai kehidupan masyarakat Simalungun dibutuhkan dalam melahirkan negarawan-negarawan dan pribadi-pribadi Indonesia yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang menggerogoti negeri ini. *HdB* dibutuhkan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran di semua jenjang pemerintahan dan organisasi termasuk dalam kehidupan pribadi lepas pribadi di Indonesia ini, apalagi dihubungkan dengan tantangan yang kita hadapi di abad ke-21 ini yang sangat kompleks di mana dunia semakin ‘mengecil’ seiring dengan globalisasi yang tidak terhempang itu.

Untuk itulah *Majelis Hapartuhaon Na Bolon Partuha Maujana Simaluungun* bergerak melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* yang diharapkan dapat menghasilkan beberapa rekomendasi dan usulan kepada pihak terkait baik sipil, militer maupun pemerintahan terutama kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Pemerintah Kota Pematangsiantar sebagai daerah asal *HdB* menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*), pro rakyat, berkeadilan, jujur dan pemerataan dalam pembangunan daerah, terutama dalam melahirkan masyarakat sipil yang jujur, adil dan menjunjung tinggi *HdB* dalam kehidupan sehari-hari.

B. Urgensi dan signifikansi

Habonaron do Bona (HdB) adalah falsafah sosial orang Simalungun yakni pemikiran tentang tatanan umum eksistensi. Tatanan dimaksud didasarkan pada situasi sosial (*social situation*) yakni seluruh komponen kehidupan orang Simalungun dimanapun. Persoalannya adalah, apakah *HdB* itu masih relevan dengan situasi sosial abad 21?. Dengan demikian, adapun urgensi dan signifikansi kajian-kajian ini ialah sebagaimana disebut dibawah ini, yaitu:

1. Mendapatkan informasi tentang relevansi nilai-nilai keluhuran *HdB* dan perkembangan aktualnya dalam

kehidupan sosiokultural, ekonomi, politik, agama dan lain-lain pada abad 21.

2. Meletakkan *HdB* pada abad 21 yang sejalan dengan globalisasi dimana teknologi informasi dan komunikasi mengambil peran sentral di dalamnya. Karena itu, aktualisasi dan penajaman *HdB* mutlak diperlukan sehingga tidak terasa usang (kuno) namun selaras dengan perkembangan jaman yang terjadi. Pemerkinian (*update*) *HdB* pada abad 21 sangat penting terutama mengakomodasi dinamika sosial dan budaya terhadap *HdB* atau mengarahkan *HdB* sesuai dinamika sosial budaya yang menyertainya.
3. Mendapatkan kontribusi pemikiran, informasi dan saran multi dan lintas disiplin ilmu dari cendekiawan Simalungun tentang kedudukan *HdB* di abad 21 seperti sarjana bahasa, sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, agama dan lain-lain. Kontribusi pemikiran ini sangat penting terutama untuk memosisikan *HdB* di era globalisasi sebagai salah satu inti abad 21 yang semakin dinamis.
4. Abad 21 adalah era dimana globalisasi atau *global village* (desa buwana) berupa memudarnya batas-batas negara, ataupun munculnya perdagangan elektronik (*e-commerce*), pembayaran non-tunai (*e-pay*), maupun beralihnya sistem belanja dari *offline shop* ke *online shop*, budaya konsumeris (*consumer culture*), tingginya kompetisi antar negara dan lain-lain memicu adanya klaim kebenaran sebagai dampak perkembangan media berupa (*web*) situs internet), media sosial, berita *online* maupun televisi. Karena itu, mendudukan kembali kebenaran (*habonaron*) di abad 21 sangat penting dimana orang Simalungun yang memiliki falsafah *HdB* menjadi salah satu bagian di dalamnya.
5. Abad 21 pada lingkup teritorial (Simalungun), regional (Sumatera Utara) dan nasional (Indonesia) ditandai

dengan transparansi ekonomi, politik, sosial budaya dan lain-lain. Keadaan ini memaksa adanya kreativitas, kompetisi, kontestasi dan lain-lain secara terbuka. Karena itu, etnik Simalungun dengan falsafah *HdB* memiliki tanggungjawab yang relevan dengan abad transparansi ini sehingga tidak tergilas oleh kemajuan jaman yang bergerak dinamis.

BAB II

HABONARON DO BONA:

Perspektif linguistik, semiotik dan filosofis

Amrin Saragih

A. Pendahuluan

Masyarakat Simalungun, yang dalam makalah ini dirujuk sebagai *halak* Simalungun (HS), memiliki falsafah yang dikenal sebagai *Habonaran do Bona* (selanjutnya dirujuk sebagai *HdB*). Konsep dan nilai yang terkandung dalam falsafah Simalungun itu diharapkan menjadi acuan bagi Simalungun dalam berpikir, berbicara dan bertindak. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa banyak Simalungun tidak mengetahui dan memahami filosofi *HdB* itu karena berbagai faktor.

Sebagai Simalungun seseorang sebaiknya memahami falsafah *HdB* itu sehingga dia memiliki identitas dan langkah yang jelas dalam berpikir, berbahasa dan beringkah laku. Sama halnya dengan falsafah, nilai luhur atau ideologi bagi suatu komunitas, bagi Simalungun, *HdB* merupakan panduan dalam bertindak ke dalam grup atau komunitas dan menjadi tapisan atau filter dalam menghadapi pengaruh dari luar grup atau komunitas.

B. Perspektif linguistik fungsional

Pemahaman makna *HdB* sebagai falsafah bergantung pada pemahaman makna linguistik klausa itu dan pemahaman istilah. Dari perspektif linguistik, khususnya dari pandangan tata bahasa fungsional pada dasarnya Bahasa Simalungun (BS) merupakan bahasa berpemarkah (Eggins 2004; Halliday 2014). Saat ini Bahasa Simalungun sedang dalam proses menuju bahasa yang unsur Tema-Remanya berdasar pada urutan. Dengan kata lain, saat ini Bahasa Simalungun berada pada transisi dengan pengertian penggunaan bahasa itu memiliki sifat dualisme, yakni di satu sisi Bahasa Simalungun

berpemarkah dan di sisi lain Tema-Remanya berdasar pada urutan.

Para penutur asli Bahasa Simalungun atau penutur yang dewasa dan dibesarkan dalam Bahasa Simalungun akan menggunakan Bahasa Simalungun sebagai bahasa yang Tema-Remanya berpemarkah sementara mereka yang mempelajari Bahasa Simalungun cenderung menggunakan Bahasa Simalungun sebagai bahasa yang Tema-Remanya berdasarkan urutan. Secara spesifik pemahaman tentang Tema-Rema ini menjadi dasar untuk memahami hakiki klausa *habonaron do bona*.

Setiap klausa, seperti klausa *habonaron do bona* dari sisi pembicara terjadi dari dua komponen pesan. Yang dimaksud dengan Tema adalah titik awal dari pesan dalam klausa atau titik berangkatnya satu pesan yang akan disampaikan dalam suatu klausa. Rema adalah unsur pesan berikutnya setelah Tema teridentifikasi. Biasanya Rema didatangkan dari atau didasarkan pada Tema. Sebagai bahasa berpemarkah, Bahasa Simalungun memiliki partikel sebagai penanda, yakni *do* sebagai penanda Tema.

Secara operasional unsur fungsional klausa yang dilekati, disertai atau diikuti oleh partikel *do* menjadi Tema klausa itu. Partikel *do* itu sendiri tidak memiliki arti referensial atau makna sensual. Partikel itu hanya memiliki fungsi dalam klausa, yakni fungsi tekstual. Tema adalah fungsi tekstual yang terkait dengan pembicara atau penyampai pesan. Seseorang yang menyatakan klausa *habonaron do...*berimplikasi bahwa dia memulai pembicaraan dengan titik awal *habonaron* karena unsur klausa itu disertai dengan penanda atau pemarkah *do*.

Secara dinamis operasional penutur yang mengatakan *habonaron do...* berimplikasi bahwa dia ingin menyampaikan sesuatu yang terkait atau yang didatangkan dari unsur klausa *habonaron* itu. Berbagai kemungkinan bisa terjadi, misalnya seperti pada (2) dengan *habonaron* sebagai Tema dan sejumlah Rema potensial dikaitkan, didatangkan atau diturunkan. Jika

klausa itu diubah menjadi *habonaron bona do* seperti pada (3) yang menjadi Tema adalah *bona*, karena unsur fungsional itu disertai dengan partikel *do* sementara *habonaron* berfungsi sebagai Rema. Dengan demikian, klausa *habonaron do bona* berbeda maknanya dengan *habonaron bona do* secara linguistik karena Tema kedua klausa itu berbeda walaupun kedua klausa itu mempunyai unsur eksperiensial yang sama yakni *habonaron* dan *bona*.

<i>habonaron</i>	<i>do</i>	<i>bona</i>
kebenaran	PT	pokok
Tema		Rema

<i>habonaron</i>	<i>do</i>	<i>bona</i>
		<i>hatani</i>
		<i>barita ai</i>
		<i>baritani oppung ai</i>
		<i>manjadi harosuh ni</i>
		<i>mambahen parmallas ni uhur.</i>
Tema		Rema

<i>habonaron</i>	<i>bona do</i>
Rema	Tema

Dengan kriteria penanda Tema *do*, kedua klausa pada (4) pada prinsipnya memiliki makna yang sama walaupun urutannya berbeda karena kedua klausa itu memiliki Tema yang sama, yakni. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Bahasa Simalungun urutan unsur klausa tidak mempengaruhi makna tekstual. Jika dimisalkan *habonaron* sebagai *x* dan *bona* sebagai *y*, makna klausa (4a) dan (4b) masing-masing adalah $x = y$ dan $y = x$.

(4a)	<i>habonaron do bona</i>
	Tema Rema

(4b)	<i>bona</i>	<i>habonaron do</i>
	Rema	Tema

Berbeda dengan Bahasa Simalungun yang berdasar pada penanda atau pemarkah dan tidak membedakan makna tektual pada (4a) *habonaron do bona* dan (4b) *bona habonaron do*, Tema dalam Bahasa Indonesia (BI) dan bahasa Inggris (B Ing) ditentukan oleh urutan. Dalam BI dan B Ing unsur fungsional atau inisial pertama klausa dan keterburuan mendakwakan bahwa Tema adalah ikan yang paling depan menjadi Tema dan unsur selanjutnya menjadi Rema. Dengan demikian, klausa *kebenaran adalah dasar (dari segala sesuatu)* dan *the truth is the basis (for anything)* berbeda dengan dasar adalah kebenaran karena Tema klausa itu berbeda, seperti ditampilkan pada (5a, b, c,d).

- | | | |
|----|------------------|---------------------|
| A. | <i>kebenaran</i> | adalah dasar |
| | Tema | Rema |
| B. | <i>dasar</i> | adalah kebenaran |
| | Tema | Rema |
| C. | <i>the truth</i> | <i>is the basis</i> |
| | Theme | Rheme |
| D. | <i>the basis</i> | <i>is the truth</i> |
| | Theme | Rheme |

Tema merupakan struktur pesan yang disampaikan dalam interaksi oleh pembicara. Dengan kata lain, Tema adalah merupakan titik awal atau potensi yang akan dikembangkan oleh pembicara di dalam Rema. Implikasinya adalah Tema merupakan unsur penting bagi pembicara. Berbeda dengan pembicara, bagi pendengar yang menjadi fokus adalah unsur

informasi Baru. Dengan kata lain, bagi pendengar sebagai partisipan dalam suatu interaksi yang utama adalah unsur Baru. Dalam struktur informasi itu unsur informasi Lama lenyap dan tidak menjadi perhatian pendengar. Dalam Bahasa Simalungun unsur Baru ditandai dengan partikel *da* sementara unsur Lama tidak bertanda. Dengan demikian dalam klausa *habonaron do bona* potensial terjadi yang berikut, seperti pada (6 a, b, c, d).

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| (6) a. <i>habonaron do</i> | <i>bona da</i> |
| Tema | Rema |
| Lama | Baru |
| b. <i>habonaron do da</i> | <i>bona</i> |
| Tema | Rema |
| Baru | Lama |
| c. <i>habonaron da</i> | <i>bona do</i> |
| Rema | Tema |
| Baru | Lama |
| d. <i>habonaron</i> | <i>bona do da</i> |
| Rema | Tema |
| Lama | Baru |

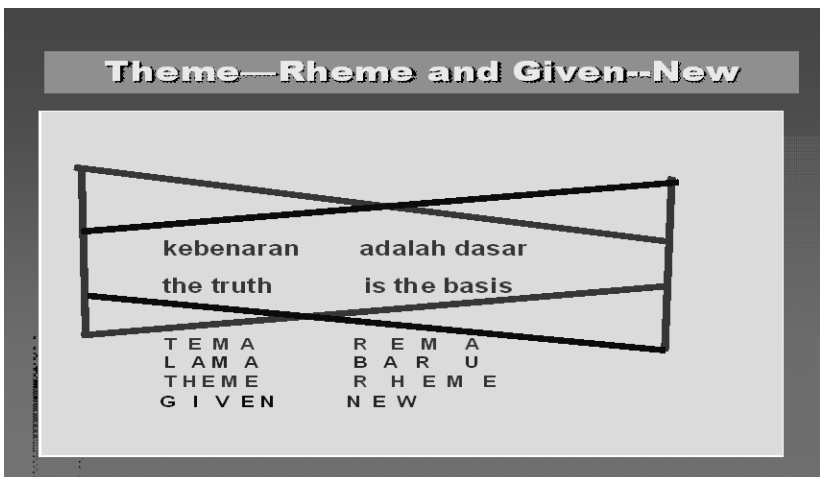
Dalam Bahasa Simalungun lazimnya penanda Tema mendahului penanda Baru. Dengan demikian kesungsangan kedua penanda itu tidak berterima. Dengan kata lain, klausa pada (7) berikut ini tidak berterima dalam Bahasa Simalungun.

- (7) **habonaron da do bona*
 **habonaron bona da do*
 **bona da do habonaron*
 **bona habonaron da do*

Berbeda dengan Bahasa Simalungun sebagai bahasa berpemarkah atau berpenanda, BI dan B Ing berdasar pada urutan. Tema direalisasikan sebagai unsur awal atau inisial klausa sementara Bari direalisasikan oleh unsur final atau akhir suatu klausa. Dengan kata lain, dalam BI dan B Ing Tema dan Rema lazimnya berbanding terbalik seperti ditampilkan pada (8) berikut ini.

- (8) a. kebenaran adalah dasar
 Tema Rema
 Lama Baru
- b. *the truth* *is the basis*
 Theme Rheme
 Given New

Kesungsangan Tema dan Baru atau *Theme* dan *Rheme* ditampilkan diringkas dan ditampilkan pada figura berikut ini.



Bagi pembicara yang utama adalah pesan pada Tema sementara bagi pendengar yang utama adalah informasi Baru. Dalam BI dan B Ing terjadi kesungsangan antara Tema dan

Baru. Di dalam Bahasa Simalungun Tema dan Baru potensial berimpit seperti pada contoh (6b) dan (6d).

Dari perspektif fungsi eksperiensial klausa *habonaron do bona* secara implisit merupakan pengalaman relational. Dengan kata lain, proses relasional potensial digunakan antara frase *habonaron dan bona*. Jika klausa itu direkonstruksi, sejumlah klausa dengan proses relasional potensial dibentuk seperti pada (9) berikut.

- (9) *habonaron do* (manjadi) *bona*...
habonaron do (mamukkah) *bona*...
habonaron do (mambahen) *bona*...
kebenaran menjadi dasar...
kebenaran merupakan dasar...
kebenaran merealisasikan dasar...
kebenaran mengindikasikan dasar...
the truth is the basis...
the truth functions as the basis...
the truth realizes the basis...

Dari persepsi fungsi interpersonal klausa *habonaron do bona* merupakan fungsi ujar pernyataan. Dengan kata lain, klausa itu memberikan informasi. Klausa dengan komoditas informasi itu direalisasikan dalam modus deklaratif.

C. Persepsi semiotik

Deskripsi linguistik tentang klausa *habonaron do bona* memberikan gambaran bahwa frase *habonaron* adalah titik awal yang dari unit titik awal atau titik tolak pesan itu didatangkan, diturunkan atau dikembangkan unit lain sehingga menjadi unit yang lebih besar. Satu interpretasi semiotik (Eco 1979; Chandler 2008) yang potensial diturunkan adalah bahwa seseorang yang akan mengembangkan sesuatu (konsep, pemikiran, gagasan, kegiatan, dan lain-lain) hendaklah dia memulainya dari titik

kebenaran. Titik kebenaran ini sangat banyak bergantung kepada sesuatu bidang atau disiplin ilmu.

D. Persepsi filosofis

Dengan persepsi filosofi (Khun 1970; Popper 1968) sekurang-kurangnya tercakup tiga hal, yakni ontologi, epistemologi dan aksiologi. Dengan uraian semiotik terdahulu secara ontologis terinterpretasi bahwa segala sesuatu bermula dari suatu kebenaran yang dari kebenaran itu didatangkan unsur pengembangan. Jika demikian unsur ontologinya, metodologi harus disusun atau dirancang untuk mengembangkannya. Selanjutnya, secara aksiologi seseorang hendaklah menentukan apa tujuan atau untuk apa dilakukan atau direalisasikan klausa *habonaron do bona* itu.

E. Simpulan

Makalah ini mengkaji klausa *habonaron do bona* sebagai falsafah Simalungun dari perspektif linguistik, dan secara singkat dari persepsi semiotik dan filosofis. Makna umum falsafah *habonaron do bona* itu umum dan universal, yakni 'kebenaran merupakan titik awal dari segala sesuatu proses'. Disarankan agar para cendekiawan Simalungun merumuskan falsafah *habonaron do bona* itu dalam rumusan yang operasional yang potensial dilakukan atau direalisasikan semua Simalungun. Rumusan operasional itu menjadi panduan dalam bertindak secara internal dan menjadi tapisan, saringan atau *filter* dalam bertindak secara eksternal.

Rujukan

- Chandler, D. 2008. *Semiotics: the Basics*. London: Routledge
- Eco, Umberto. 1979. *A Theory of Semiotics*. Bloomington: Indiana Univesity Press.
- Eggsins, S. 2004. *An Introduction to Systemic Functional Linguistics*. New York: Continuum.

- Halliday, M. A. K. 2014. *An Introduction to Functional Grammar*.
Second edition. London: Edward Arnold.
- Kuhn, T. S. 1970. *The Structure of Scientific Revolutions*.
Chicago: The University of Chicago Press.
- Popper, K. R. 1968. *The Logic of Scientific Discovery*. London:
Hutchinson of London

BAB III
HABONARON DO BONA:
Mewujudkan Manusia Simalungun Yang Unggul dan
Kompetitif Menjawab Tantangan Abad ke-21

Ibnu Hajar Damanik

A. *Habonaron do Bona (HdB)* sebagai nilai luhur

Memahami sebuah nilai (*values*) dapat dilakukan dengan berbagai sudut pandang. Secara sederhana sebuah nilai (*values*) menurut Hasa (2016) dapat disebut sebagai:

principles or standards of behavior that is considered valuable or important. Values shape an individual's character and behavior; they are the basic foundation for a person's personality, behavior, attitudes, and perceptions.

Sementara itu Graebe (2001) menyebut tiga pendekatan berpikir untuk memahami nilai yakni:

1. values in the sociological sense: conceptions of what is ultimately good, proper, or desirable in human life.
2. value in the economic sense: the degree to which objects are desired, particularly, as measured by how much others are willing to give up to get them.
3. value in the linguistic sense, which goes back to the structural linguistics of Ferdinand de Saussure (1966), and might be most simply glossed as “meaningful difference”

Dari ketiga pendekatan tersebut, maka pendekatan pertama yang memiliki makna sesuatu yang bernilai, baik, dan penting dalam kehidupan sosial individu. Nilai adalah standar perilaku yang dipertimbangkan bernilai atau penting, yang dapat dijadikan dasar atau acuan dalam berperilaku, sikap, dan persepsi individu bahkan pembentukan karakter individu. Dalam kehidupan masyarakat Simalungun, *HdB* merupakan nilai luhur, sebuah ajaran kolektif yang tidak saja sebagai acuan

berperilaku tetapi juga menjadi ajaran spiritual yang dijadikan sebagai falsafah hidup suku Simalungun dan pada gilirannya dapat membentuk jati diri kolektif *halak* (suku) Simalungun.

Secara harfiah kata *Habonaron* dapat diartikan sebagai kebenaran hakiki, bersumber dari Tuhan, Allah. *Bona* berarti pangkal, sumber, asal, hulu, inti. Jadi bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih bermakna: Dari-Nya lah segala sumber kebenaran, Tuhan adalah sumber segala kebenaran, sumber energi, awal dari segala aktivitas manusia. Pemahaman akan makna yang demikian berlaku untuk yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan sesamanya, dan dengan alam semesta.

HdB meski bernuansa *folklore* atau cerita rakyat adalah nilai luhur yang berisi pesan yang tinggi maknanya agar manusia SML senantiasa hidup dalam kebajikan dan mengaplikasikan kebajikan itu serta selalu menjauhkan perilaku hidup yang tidak baik atau *batil* yang tidak dikehendaki atau dimurkai Sang Pencipta Yang Maha Kuasa.

HdB merupakan falsafah hidup (*weltanschauung*), orientasi tata kehidupan untuk mewujudkan masyarakat yang hidup dalam damai, sejahtera, tenteram, rukun dan harmoni serta berkecukupan dalam hal sandang, pangan dan papan, dan kebenaran adalah yang utama. Dengan prinsip pokok bahwa kebenaran adalah yang utama, sebagai supremasi, pangkal segala bentuk peri kehidupan, maka tata nilai dalam kehidupan masyarakat SML menempatkan *HdB* sebagai falsafah hidup (*weltanschauung*) serta menjadi prinsip hidup (*way of life*). Manifestasi kedua hal itu adalah bahwa orang SML akan senantiasa menempatkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran adalah yang utama dalam tatanan kehidupan sosial. Ketiga nilai tersebut menjadi bagian dari sikap dan titik tolak perilaku sebagai manifestasi dari keyakinan pada sumber kebenaran yakni Tuhan YME (*Naibata*). Sebaliknya ketiga nilai itu akan membimbing perilaku untuk menjauhi sikap *jungkat* (jahat, manipulasi, persekongkolan jahat, dan lain-lain) dalam

menjalani kehidupannya yang berakibat mencelakai pada pelakunya dan orang lain.

B. Menjadikan *HdB* sebagai ‘virus’ sukses

Penulis seperti McClelland (1991:3) menyatakan bahwa kunci sukses sebuah usaha perubahan atau modernisasi masyarakat terutama di bidang ekonomi adalah dengan menanamkan virus mental yakni suatu cara berpikir tertentu yang kurang lebih sangat jarang dijumpai tetapi apabila terjadi pada diri seseorang, cenderung untuk menyebabkan orang itu bertindak laku secara sangat giat.

Virus mental itu diberi nama *n-Ach* (*need for Achievement* atau kebutuhan untuk meraih prestasi). Dengan melakukan eksperimen dalam jangka waktu yang cukup lama pada masyarakat Kakinada, di Andhara Pradesh, Teluk Benggala, India ditemukan bahwa dalam setiap jangka waktu dua tahun sepertiga dari kelompok pengusaha memperlihatkan tanda-tanda kegiatan usaha yang membawa pembaharuan seperti menghasilkan barang baru atau kenaikan jumlah pendapatan. Hal lain yang terjadi adalah tumbuhnya dorongan untuk bekerja dan berusaha lebih keras bukan melulu untuk mendapatkan uang tetapi munculnya mental dan tekad untuk bekerja lebih baik.

Virus *n-Ach* model Mc.Clelland² dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang ditemukan dalam kesusasteraan suatu bangsa seperti bangsa Yunani di sekitar abad kelima, enam, atau tujuh demikian juga kesusasteraan Spanyol atau juga Inggris yang sedikit banyak berpengaruh pada terjadinya Revolusi Industri, kesusasteraan yang menunjukkan kecenderungan isi yang sama yakni adanya hubungan antara virus mental dengan pertumbuhan ekonomi.

Jika pada awalnya pengembangan virus *n-Ach* dikemas dari sumber cerita rakyat atau gagasan lokal yang ditemukan dalam

²Penjelasan lebih lengkap tentang hal ini dapat dilihat dalam buku karya Mc.Clelland: *The Achieving Society*.

karya kesusasteraan, maka hal yang sama dapat dilakukan untuk mengembangkan virus untuk akselerasi perubahan dan kemajuan dalam masyarakat Simalungun. Virus itu justru bersumber dari nilai yang telah hidup lama dalam tatanan sosial masyarakat Simalungun. *HdB* merupakan sesuatu yang sangat berharga dan dijunjung tinggi *halak* Simalungun, dapat difungsikan dan digunakan sebagai virus untuk memacu kehidupan masyarakat Simalungun menjadi lebih baik.

Untuk itu, hal yang paling penting saat ini sekaligus menjadi tantangan bersama adalah *bagaimana merekonstruksi nilai-nilai pokok HdB yang penting dan strategis untuk diintegrasikan dalam berbagai tatanan kehidupan sosio-budaya-ekonomi-politik* untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat Simalungun khususnya dan Indonesia umumnya.

Nilai-nilai pokok *HdB* dapat dielaborasi ke dalam beberapa aspek perilaku yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan seperti antara lain:³

- Menjunjung tinggi tata krama
- Menghormati orang tua dan orang lain
- Menghormati guru
- Membantu orang lain (*manappati*).
- Tidak menyakiti atau membunuh
- Tidak menyinggung perasaan atau menyakiti hati
- Tidak meminta-minta (*ulang tedek-tedek*).
- Tidak menyusahkan orang lain (*ulang manusahi*).
- Tidak berbohong (*ulang marguak*).
- Tidak berlaku atau berkata kasar/memaki orang lain.
- Tidak membungakan uang, mencuri, atau korupsi.
- Tidak menipu dan mengkhianatai orang lain

³Elaborasi ini adalah hasil identifikasi dari berbagai sumber tulisan, masih perlu didiskusikan bersama untuk memperoleh rumusan yang lebih komprehensif.

Untuk menjadikan *HdB* menjadi patron yang senantiasa mewarnai dan menjadi acuan perilaku tiap warga Simalungun atau halak Simalungun yang hidup dengan *ahap* Simalungun, maka diperlukan usaha yang sistematis, terencana, dan terintegrasi. Hal yang pokok adalah bagaimana menjadikan *HdB* menjadi nilai bersama, milik bersama (*shared values*), maka harus dibangun komitmen bersama yang kuat untuk mengintegrasikan nilai *HdB* ke dalam cara berpikir, bersikap, dan berperilaku.

Ketiga unsur perilaku itu merupakan komponen kunci untuk menjadikan nilai *HdB* menjadi *Karakter Simalungun*. Dalam perspektif karakter, maka orang Simalungun harusnya memiliki tiga hal yakni: (1) mengetahui hal-hal yang baik dari *HdB*, (2) mempunyai kecenderungan sikap dan perilaku seperti terkandung dalam nilai *HdB*, dan (3) selalu berperilaku atau menampilkan perilakunya seperti yang diketahui dan dipahaminya dari nilai-nilai *HdB*.

C. Tantangan masyarakat Simalungun abad 21

Abad 21 yang masih akan berlangsung kira-kira 85 tahun lagi sungguh merupakan jalan yang masih panjang namun penuh tantangan. Pada periode ini ditandai oleh:

...a dramatic technological revolution. We now live in an increasingly diverse, globalized, and complex, media-saturated society,...many emerging issues such as global warming, famine, poverty, health issues, a global population explosion and other environmental and social issues⁴.

Pada kondisi seperti ini seluruh masyarakat harus menyikapinya dengan melakukan penyesuaian dan perubahan dalam cara berpikir, watak dan kepribadian, tatanan sosial, ekonomi, politik baik lokal maupun nasional. Proses modernisasi kehidupan masyarakat dalam periode ini, tidak

⁴http://www.21stcenturyschools.com/what_is_21st_century_education

terkecuali masyarakat Simalungun, harus dilakukan seiring dengan konstruksi pemahaman yang tepat bagaimana pembangunan sumberdaya manusia harus dilakukan.

Menurut Moeljarto (1987:112) terdapat dua kutub pandangan yakni aliran *genetic-determinism* dan *cultural-determinism*. Pandangan pertama melihat bahwa proses pembangunan manusia sulit dilakukan karena ciri bawaan manusia yang telah ada dan pola perilakunya sudah terbentuk secara genetis. Sedangkan pandangan kedua menyatakan bahwa potensi bawaan manusia dapat dibentuk lingkungan sosial-budayanya. Karenanya, upaya pembangunan manusia dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi manusia yang diperkuat dengan memanfaatkan potensi sosial-budaya yang tumbuh dan berlaku di mana manusia hidup.

Identitas masyarakat Simalungun sebagaimana pandangan Damanik (2000:165) adalah individu yang bukan hanya bermarga pokok: *Sinaga, Saragih, Damanik, Purba (Si-Sa-Da-Pur)*, namun juga ditambah dengan marga-marga pecahan dari marga pokok, serta ditambah lagi mereka yang memiliki "*ahap*" Simalungun. Akan tetapi mereka yang merasa peduli dan *concern* atau bertanggungjawab atas kemajuan dan kesejahteraan rakyat di wilayah Simalungun secara tulus ikhlas, nyata dari perilaku dalam pergaulan hidup meski bukan berasal dari kelompok marga pokok atau pecahannya juga tergolong ke dalam identitas Simalungun.

Jadi Simalungun sifatnya inklusif bukan eksklusif sesuai dengan letak geografisnya yang terbuka antara dua wilayah kebudayaan yakni budaya Batak dan budaya Melayu. Karakteristik wilayah Simalungun dikelilingi serta berbatas dengan wilayah geografis dengan komponen etnik yang beragam. Wilayah ini dikelilingi kelompok etnik yang berbeda-beda budaya dan bahasa, disamping adanya kenyataan bahwa di wilayah Simalungun-pun terdapat adanya heterogenitas penduduknya. Usaha pembangunan untuk menuju modernisasi

masyarakat Simalungun perlu memanfaatkan potensi sosial-budaya untuk dijadikan kebijakan pembangunan.

Hal itu perlu mendapat perhatian pemerintah daerah khususnya Simalungun. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah menjadikan SDM sebagai modal sekaligus pelaku aktif kegiatan pembangunan. Efektivitas fungsi pelayanan pemerintah daerah terletak pada kapasitas aparatur daerah sebagai pelaksana program pembangunan. Ada kaitan erat antara keberhasilan organisasi pemerintah dengan profil “postur” aparatur yang mempunyai *capability* yang prima dalam lingkup tugasnya (Damanik, 2007). Untuk itu perlu dipahami bersama apa prospek, tantangan, dan peluang ke depan yang perlu disikapi agar masyarakat Simalungun mampu memenangkan persaingan yang semakin kuat dalam berbagai bidang.

Tantangan pembangunan ke depan utamanya dalam abad 21 adalah modernisasi kehidupan masyarakat memungkinkan setiap warga masyarakat mencapai taraf hidup yang lebih baik. Dalam bahasa yang berbeda, melakukan proses pembaharuan masyarakat dari yang konvensional menuju masyarakat yang lebih maju mengacu kepada nilai-nilai modernitas namun tetap disesuaikan dengan latar belakang budaya dan pandangan hidup masyarakat (Suriasumantri, 1987).

Untuk mewujudkan hal itu, maka ide dasar kegiatan pembangunan adalah mengharuskan adanya perubahan watak manusia (Inkeles, 1990), yang pada intinya dalam diri individu terjadi perubahan spirit atau semangat baru, memperoleh cara-cara berpikir, merasa, dan bertindak dengan cara yang baru. Di lain pihak, bahwa proses pembangunan menuju modernisasi berspektrum luas dengan ragam dimensinya. Mulai dari peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan, kualitas pelayanan sosial (*social services*) sampai pada hal yang mendasar seperti memperkuat kohesi sosial masyarakat, ikatan keluarga RT, RW, menumbuhkan kebanggaan diri serta

memiliki kepercayaan diri (*self reliance*) yang kuat sebagai *halak* Simalungun.

Peningkatan mutu kehidupan masyarakat Simalungun dapat dilakukan dengan melihat peluang yang dapat diraih berdasarkan potensi daerah yang ada di Simalungun serta ancaman yang mungkin datang dari kompetitor lokal, regional, bahkan internasional. Bidang yang sangat potensial bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Simalungun antara lain pertanian, perikanan, perkebunan, pertanian holtikultura, peternakan, industri pengolahan, jasa dan pariwisata, pendidikan, kesehatan, olah raga dan rekreasi.

Semua potensi ekonomi yang bernilai tinggi itu perlu dikemas sedemikian rupa dengan memberdayakan warga Simalungun untuk berpartisipasi aktif dan sinergis sebagai penggerak, motivator, pelaku aktif, dan pada gilirannya akan menikmati hasil-hasil pembangunan. Dalam kaitan ini, maka hal yang tak bisa ditunda-tunda adalah meningkatkan kualitas warga Simalungun baik dari sisi wawasan kerja, keahlian dan keterampilan kerja sebagai tenaga profesional dalam berbagai bidang.

Untuk ini, *vocational education* atau orientasi pendidikan kejuruan dan *entrepreneurship* perlu menjadi prioritas pemerintah kabupaten Simalungun disamping pendidikan umum yang bermutu untuk menghasilkan lulusan bermutu untuk mencapai sasaran pembangunan di Simalungun.

D. *HdB* dan *good governance*

Salah satu batu ujian sesungguhnya untuk melihat keberhasilan implementasi nilai *HdB* dalam kehidupan sosial adalah pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Pertanyaannya adalah bagaimana nilai-nilai *HdB* menjadi prinsip yang dijadikan acuan pemerintah daerah untuk mewujudkan kemajuan di berbagai bidang pembangunan seperti segi perekonomian, pembangunan fisik, pengentasan kemiskinan, hingga penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Hanya dengan cara itu dapat diyakini bahwa tata kelola pemerintahan diselenggarakan dengan prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan, yang merupakan nilai pokok dari *HdB*.

Dengan prinsip yang demikian maka secara bertahap masyarakat dapat merasakan dan menikmati hasil pembangunan berupa kemajuan bukan hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga bidang-bidang politik, sosial, kerohanian, psikologi, serta juga persatuan dan kohesi sosial. Hal itu diharapkan akan mampu meredam dan menghilangkan isu-isu sensitif berkait persoalan keadilan sosial, kestabilan politik, sistem pemerintahan, kualitas hidup, nilai sosial dan kerohanian dan juga kepastian hukum.

Salah satu kelemahan dalam tata kelola pemerintahan daerah yang dapat diamati selama ini adalah jebakan tradisi feodal, atau kecenderungan munculnya pola kepemimpinan yang bersifat polimorfik, berfungsi ganda serta tidak mengikuti tuntutan profesionalisme (Kartodirdjo, 1999:229). Keadaan ini menampilkan bentuk otoritarianisme dalam kepemimpinan birokrasi dan organisasi pemerintahan. Praktik birokrasi belum mampu menegakkan nilai legal-rasional dan masih menjalankan ambivalensi fungsional.

Dengan pola tradisi feodal yang demikian kuat, maka akan melanggengkan otoritarianisme serta struktur feodal dengan memberi posisi kuat kepada pimpinan (baca: bupati, camat, lurah). Penguasa seakan leluasa memobilisasi sumber daya, sementara rakyat hanya akan taat untuk menerima dengan skeptis, dan belum tentu mau melaksanakan atau mendukung kebijakan pembangunan oleh karena tidak selalu sesuai dengan keinginan, harapan, atau kebutuhan masyarakat.

Dalam keadaan seperti ini akan sulit untuk mengharapakan etos kerja birokrasi yang produktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana semangat yang terkandung di dalam nilai *HdB*. Otoritarianisme serta struktur feodal akan melahirkan orientasi pada status dan askripsi, sikap mengandalkan kedudukan berikut penghargaan atas posisinya

serta mengambil keuntungan dari posisi itu. Padahal saat ini yang dibutuhkan adalah orientasi pada *achievement*—keberhasilan kerja sebagai wujud dari *performance*, *expertise*, dan profesionalisme pelayanan bagi masyarakat.

Tugas besar pemimpin (baca: kepala daerah) adalah bagaimana menetapkan visi pembangunan untuk mewujudkan daerah menuju kepada perubahan yang lebih baik. Visi perubahan seperti apa yang berlangsung di wilayah yang dipimpin setelah periode tertentu kepemimpinannya, misalnya untuk jangka panjang (20-25 tahun), apa yang terjadi di wilayah itu, dan capaian apa akan diraih untuk jangka pendek (5 tahunan) dari sejumlah target-target capaian perubahan yang ingin diwujudkan. Seorang pemimpin harus memiliki obsesi besar yang dituangkan ke dalam skema *road map* pembangunan yang diaktualisasikan dalam rangkaian program dan kegiatan tahunan, semester, bulan, dan mingguan.

Visi Simalungun Unggul 2025 misalnya dapat dijadikan payung gagasan pembangunan untuk diformulasikan ke dalam beberapa fokus dan skala prioritas dengan menggunakan pendekatan logis dan akuntabel. Hal seperti ini berlangsung di beberapa negara yang awalnya belum maju namun secara perlahan dan konsisten menjalankan program dalam beberapa tahapan lambat laun hasilnya terlihat. Malaysia sebagai contoh yang menetapkan *Wawasan 2020* atau *Visi 2020* sebagai *Visi Malaysia* yang digagaskan perdana menteri Mahathir Bin Mohamad tahun 1991 mencanangkan negara Malaysia akan menjadi negara maju pada tahun 2020.

Demikian pula negarawan Park Chung Hee mengagas program *Saemaul Undong* (*New Community Movement*) sebagai usaha modernisasi Korea Selatan dengan perhatian pada membentuk karakter manusia Korea Selatan yang mempunyai empat kualitas: (1) sikap rajin bekerja atau *diligence*, (2) sikap hemat, (3) *self help*, yakni kemampuan usaha, kepercayaan diri, kemandirian, daya tahan, dan (4) kerja sama (*cooperation*) Di Brasil, gagasan meningkatkan kualitas manusia dipelopori

Paulo Freire, ditujukan untuk menjadikan manusia Brasil menyadari posisinya dalam pembangunan, mempunyai kemampuan berintegrasi dengan lingkungan, mampu mentransformasi dan menentukan pilihan atas realita lingkungan, dan menjadi subjek yang menciptakan sejarah, tidak sekedar menjadi objek pasif pembangunan.

Contoh gagasan pembangunan di atas dapat dijadikan inspirasi dan spirit bagi pemimpin daerah untuk mendorong kemajuan wilayahnya dengan menetapkan visi pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerahnya.

Upaya pembangunan wilayah Simalungun perlu diarahkan pada skala prioritas program atau kegiatan berkaitan dengan pengembangan potensi SDA maupun SDM dengan beberapa kebijakan antara lain:

1. Melakukan rasionalisasi pemanfaatan, penghematan, dan memperketat pengeluaran anggaran daerah. Pengeluaran atau pembelanjaan dipantau dengan saksama untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran sesuai target pembangunan.
2. Memanfaatkan hasil kajian akademik atau keilmuan yang diarahkan pada usaha-usaha meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan inovasi, serta fokus kepada bidang-bidang yang mempunyai daya saing lebih kuat. Untuk itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi elemen terpenting dalam proses pembangunan. Program-program penelitian dan pengkajian, penguasaan sains dan teknologi, dapat lebih digalakkan di kalangan warga masyarakat dan lembaga pendidikan untuk menghasilkan ciptaan baru, produk baru, dan dapat meningkatkan pendapatan.
3. Mendorong kokohnya fundamental ekonomi daerah dengan menciptakan pusat pertumbuhan, modernisasi sistem pertanian melalui pemanfaatan bioteknologi dan mekanisasi sistem pertanian modern, sebab sektor pertanian merupakan potensi terbesar sebagai andalan

daerah. Selain itu, sektor pariwisata, pendidikan, layanan kesehatan yang unggul, dan bisnis makanan khas daerah yang halal merupakan potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Menata sistem informasi dan menyederhanakan sistem birokrasi yang rumit. Hal ini menunjukkan komitmen menjalankan *good governance* dan *good government*. Kesiapan menghapus dan membasmi suap di berbagai sektor, baik sektor umum, pemerintahan, dan sektor swasta sangat mutlak diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat maupun investor.
5. Meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui perbaikan sarana dan prasarana perumahan, kesehatan, komunikasi dan informasi, lembaga pendidikan, kelistrikan, dan air bersih, terutama di kawasan-kawasan yang masih tertinggal.
6. Menghilangkan kesenjangan sosial melalui pemerataan pembangunan antarwilayah, kota-desa, peningkatan pendapatan golongan miskin melalui peningkatan modal usaha dan peningkatan keterampilan usaha.

E. Tantangan pengembangan SDM aparatur daerah Simalungun

Salah satu elemen vital dalam mewujudkan pengelolaan instansi pemerintah daerah yang bermutu adalah staf yang bertugas mengendalikan roda organisasi terutama pada sistem administrasi dan fungsi pelayanan bagi warga masyarakat. Staf adalah elemen terdepan yang bertugas memberikan pelayanan dalam berbagai bentuk urusan. Secara ideal, mereka seyogianya memiliki wawasan bidang pekerjaannya, kemampuan unjuk kerja, serta kreativitas dalam melaksanakan tugasnya. Ciri-ciri itu hanya dapat terbentuk pada diri individu yang selalu memperoleh pembinaan untuk memperbaiki *performance* mereka.

Bertolak dari asumsi bahwa keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan SDM aparatur pengelolanya, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membentuk dan membina kemampuan para aparatur yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam bidang pekerjaannya. Beberapa faktor yang terkait dengan hal ini antara lain pembinaan kepribadian, penanaman nilai/budaya Simalungun, penataan sikap terhadap pekerjaan, peningkatan pengetahuan terhadap bidang tugas dalam lingkup tanggungjawabnya.

Performance aparatur merupakan aktualisasi seluruh elemen-elemen kepribadian, penguasaan bidang tugas, kemampuan profesional, serta kemampuan menyesuaikan diri terhadap situasi dan suasana kerja dalam organisasi (Irsan, 1993:16). Perpaduan unsur-unsur sikap, nilai, sistem kepribadian, dan penguasaan bidang tugas dalam melaksanakan tugas dalam lingkup tanggungjawabnya lazim disebut dengan etos kerja. Jadi tantangan pengembangan SDM aparatur daerah Simalungun adalah bagaimana membentuk etos kerja yang dibungkus oleh nilai-nilai luhur *HdB* atau dapat diberi label *Etos Kerja Simalungun*.

Tantangan yang tergolong rumit dihadapi instansi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta adalah membangun etos dan semangat kerja aparat atau pegawai serta mendorong munculnya etika kerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Aktualisasi etos dan etika kerja adalah SDM yang memiliki disiplin kerja sehari-hari serta memiliki mental progresif yaitu berorientasi maju untuk mewujudkan keberhasilan misi lembaga ke arah yang lebih baik, memiliki integritas sebagai aparatur yang senantiasa memelihara marwahnya sebagaimana spirit *HdB*.

Membangun etos dan semangat kerja dapat pula dimaknai sebagai membentuk budaya kerja (*work habit*) menjadi *Budaya Kerja Simalungun*. Nilai-nilai yang perlu dibudayakan untuk memantapkan pelaksanaan tugas meliputi efisiensi, tepat waktu, kejujuran, kesediaan untuk berubah, rasional dalam

pembuatan keputusan, energik, kerja sama, dan memiliki orientasi ke depan. Se jauhmana nilai itu dapat dimanifestasikan para pegawai dalam melaksanakan tugas mereka sehari-hari untuk mewujudkan tujuan lembaga maupun mencapai keberhasilannya sebagai individu? Faktor-faktor stimulan apa yang perlu diperhatikan untuk menjaga etos dan semangat kerja tetap tumbuh dan membudaya di kalangan pegawai? Inti persoalannya setidaknya menuju pada satu hal yaitu perlunya strategi manajemen pemberdayaan pegawai dalam organisasi.

Daftar Pustaka

- Damanik, Djariaman. 2000. "Bagaimana Memberdayakan Etnik/Suku Simalungun". Dalam Bintan R. Saragih dan Darwan Madja Purba (ed). *80 Tahun Djariaman Damanik, SH*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama.
- _____, Ibnu Hajar. 2007. "Dinamika Sosial Lembaga Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Tugas Kelembagaan Melalui Pewujudan Pelayanan Bermutu". Makalah disajikan dalam *Workshop Revitalisasi Tugas dan Fungsi Ketatausahaan Bagi Seluruh Kepala Bagian Tata Usaha/Pengelola Administrasi Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo* tanggal 6 September 2007 di Gedung Zentrum Kabanjahe.
- Graebe, David. 2001. *Toward an Anthropological Theory of Value*. New York: Palgrave.
- Hasa, 2016. "Difference Between Values and Beliefs" dalam <http://pediaa.com/difference-between-values-and-beliefs/>. Diakses 2 Agustus 2017.
- Inkeles, Alex. 1991. "Modernisasi Manusia". Dalam Myron Weiner (ed). *Modernisasi: Dinamika Pertumbuhan*. Voice of America Forum Lecturer.
- Irsan. 1993. *Etos Kerja Guru: Suatu Studi Pada Guru-Guru SMP Negeri Kotamadya Medan*. Tesis Program Pascasarjana Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta.

- Kartodirdjo, Sartono. 1999. *Ideologi dan Teknologi dalam Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Penerbit Pabelan Jayakarta.
- Mc. Clelland, David. 1991. "Dorongan Hati Menuju Modernisasi". Dalam Myron Weiner (ed). *Modernisasi: Dinamika Pertumbuhan*. Voice of America Forum Lecturer.
- Moeljarto T. 1987. "Alternatif Perencanaan Sosial Budaya" dalam *Masalah Sosial Budaya Tahun 2000, Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Suriasumantri, Jujun S, 1987. "Pembangunan Sosial Budaya Secara Terpadu" dalam *Masalah Sosial Budaya Tahun 2000, Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- "The 21st Century" dalam http://www.21stcenturyschools.com/What_is_21st_Century_Education.htm. Diakses 27 Juli 2017.

BAB IV

HABONARON DO BONA: **Perspektif politik di Simalungun**

Sarmedi Purba

Pengertian tentang *Habonaron do Bona* (HdB) tidak dipaparkan lagi lebih mendalam karena sudah menjadi topik makalah lainnya. Tentu kita tidak menganut HdB dalam konteks agama animisme Simalungun⁵. Namun, yang jelas bahwa HdB sudah menjadi bagian dari lambang Pemda Simalungun⁶. Suatu keberhasilan perjuangan politik Simalungun. Terjemahan '*Keberanian adalah Pangkal*' (segalanya) menjadi pengertian umum HdB. Suatu prinsip hidup yang diyakini leluhur Simalungun.

Dari awal sejarah politik Kerajaan Simalungun terjadi pemekaran dari *Kerajaan Nagur*, menjadi *Raja Nadua*, *Maroppat* dan *Marpitu*⁷. Pada abad ke 19 perang Rondahaim Saragih, kerajaan-kerajaan ini saling perang yang pada akhirnya hanya kerajaan pimpinan Rondahaim Saragih yang memiliki bala tentara di Simalungun untuk mempertahankan hegemoni Simalungun dari pengaruh invasi Belanda.

Terbentuknya 7 kerajaan di Simalungun pada awal abad ke 20 merupakan pemekaran 4 kerajaan yang dilegalisir melalui *Korte Verklaring* (baca penyerahan kedaulatan). Adapun hal yang menyatukan Simalungun pada masa penjajahan Belanda yang hanya berusia 35 tahun (1907-1942) dan bukan 350 tahun seperti di Jawa, adalah *Harungguan Raja Simalungun* yang biasanya dilakukan di Siantar.

⁵Lihat Yanray Purba: HDB sebagai religi Simalungun <http://berandabatak.blogspot.com/2013/09/arti-ajaran-habonaran-do-bona-simalungun.html?m=1>

⁶Lihat <https://www.simalungunkab.go.id/id/arti-lambang>

⁷Lihat <http://edwardsimanungkalit.blogspot.co.id/2015/05/kerajaan-kerajaan-di-simalungun.html?m=1>

Politik dalam arti asalnya adalah suatu ilmu atau kegiatan untuk memakmurkan '*kota*' (atau disebut *poli*, sekarang negara). Untuk itu politik harus merebut kekuasaan untuk menjalankan konsep kemakmuran yang menjadi tujuannya. Ada dua paradigma yang saya ingin utarakan sebagai pendapat pribadi dengan politik *HdB* ini: pemimpin Simalungun hanya dapat terwujud kalau ketatanegaraan dan politik berjalan dengan benar (*ha-Bonar-on*). Kecurangan politik termasuk '*revolusi sosial*' tidak menguntungkan dengan prinsip *HdB* orang Simalungun.

Politik sesudah proklamasi 17-8-45 membuktikan kedua asumsi di atas. Kebanyakan raja Simalungun sudah tahu bahwa mereka akan disingkirkan. Konon kabarnya mereka juga ikut pada rapat-rapat di Medan sebelum eksekusi dari '*revolusi sosial*' itu. Kutipan dari buku Erond Damanik misalnya menyebutkan:

Jalannya revolusi ialah setelah mendapat "restu" dari "pemimpin bangsa" seperti M. Amir (wakil gubernur Sumatera) dan Ahmad Tahir (Barisan Pemuda Indonesia). Akhirnya, seluruh pemimpin swapraja "dihapus" dengan dalih "antek kolonial", "anti priklamasi" yang dilakukan dengan pembunuhan, pemenggalan, pembakaran istana, penjarahan dan bahkan pemerkosaan. Wibawa swapraja pun akhirnya lenyap selama-lamanya⁸.

Namun karena merasa benar dan bukan antek kolonial atau anti proklamasi (mereka anggota Pesindo)⁹, mereka tidak menyelamatkan diri dengan cara evakuasi (mengungsi) ke luar daerah atau luar negeri. Raja Raya ditemukan di Manakraya dan dibunuh, demikian juga Raja Panei diangkut dari istananya dan

⁸Lihat <https://www.neosimalungunjaya.com/buku-tentang-revolusi-sosial-di-simalungun-3-maret-1946-runtuhnya-swapraja-simalungun-karya-erond-damanik/>

⁹Lihat <http://koransulindo.com/jejak-pesindo-dalam-revolusi/>

dieksekusi malam 3 Maret 1946 itu¹⁰. Raja Purba dan Raja Silimahuta yang juga ikut bergerilya menentang masuknya kembali Belanda ke Sumatera terbunuh jadi korban Barisan Harimau Liar (BHL) satu setengah tahun kemudian.

Saya pernah mempertanyakan mengapa mereka tidak menganalisa situasi dengan benar dan menyelamatkan diri pada waktu yang tepat? Teori saya ini kemudian terbukti bahwa ada keluarga raja yang menilai situasi politik waktu itu dengan benar, seperti Madja Poerba yang mengungsi ke Tarutung, kemudian ke Bukit Tinggi, Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dan ke Singapura. Baru sesudah situasi aman mereka sekeluarga kembali ke Simalungun (penuturan pribadi Darwan Purba). Artinya dalam aplikasi politik *HdB* orang Simalungun harus memakai kaidah modern untuk menganalisa situasi sopol agar tidak menjadi korban politik.

Mungkin falsafah *HdB* inilah membuat tokoh Simalungun menjadi pemimpin pada masanya seperti Mr¹¹ Djaudin Poerba jadi walikota tahun 50-an, Madja Poerba jadi Bupati Simalungun dan kemudian jadi walikota Medan sampai tahun 60-an. Demikian juga Radjamin Purba menjabat bupati Simalungun pada era 60-an. Mungkin juga Bungaran Saragih jadi Menteri Pertanian sesudah situasi politik aman kembali pasca reformasi. Dapat kita simpulkan, kalau dalam situasi genting dan kacau, sulit bagi manusia Simalungun untuk ikut berkuasa. *Lantas* bagaimana *HdB* pada era demokrasi sekarang di mana faktor finansial menjadi hal yang menentukan? Apakah prinsip *Habonarona do Bona* masih valid untuk mencapai tujuan politik kita?

Politikus Simalungun pada saat ini hanya memiliki 2 pilihan, yaitu memegang teguh prinsip *HdB* dan bersedia menunggu

¹⁰Lihat <http://hanakoyoshisa.blogspot.co.id/2014/06/sejarah-lokal-revolusi-sumatra-timur.html?m=1>

¹¹*Mr* adalah singkatan dari *Mester Rechteen* atau Sarjana Hukum, yakni gelar akademik yang diberikan kepada setiap orang yang mencapai pendidikan tinggi di bidang hukum.

sampai negara ini berdemokrasi yang tertib atau memilih untuk mengikuti arus perjuangan dengan trik dan biaya politik yang tinggi. Pertanyaan lain yang harus kita jawab sekarang apakah *HdB* itu “khususnya di Simalungun *bonar* untuk orang Simalungun saja atau untuk masyarakat Indonesia khususnya yang bermukim di Kabupaten Simalungun. Pertanyaan ini menjadi penting kalau yang *bonar* itu tidak sinkron antara kepentingan suku Simalungun dan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Sebagai contoh, pemekaran Simalungun secara umum dibutuhkan untuk mempercepat laju pembangunan di Simalungun¹².

Namun karena kekuatiran bahwa hasil pemekaran itu dianggap berpotensi untuk hilangnya pengaruh *Ha-Simalungun-on* di Kabupaten yang baru sebagai hasil pemekaran, maka gagasan pemekaran ditentang dan sampai sekarang gagal. Kekuatiran ini misalnya kita rasakan pada salah satu tulisan Juandaharaya Purba¹³. Kalau kita ikuti pemberitaan media, tidak ada persamaan persepsi tentang politik di Simalungun, apalagi kesepahaman berdasarkan pemahaman *HdB*. Setiap politisi memiliki paradigma politik sendiri dan sering saling sikut, termasuk antara etnik Simalungun sendiri¹⁴.

Ada beberapa faktor yang mengubah paradigma berpolitik di Simalungun:

- Menjadi pemimpin di Simalungun tidak cukup menjadi tokoh Simalungun saja, tetapi harus jadi tokoh nasional yang diterima berbagai suku yang di dominasi oleh suku Jawa dan Toba di daerah ini.

¹²Lihat <http://sarmedipurba.blogspot.co.id/2007/03/pemekaran-kabupaten-simalungun-opini.html?m=1>

¹³Lihat http://tondangpurbatambunsaribu.blogspot.co.id/2011/07/akar-keterpurukan-simalungun-dari_19.html?m=1

¹⁴Lihat Junimart Girsang: <http://www.viva.co.id/berita/politik/732945-junimart-demokrasi-di-simalungun-tercorengo.1&disp=inline&safe=1&zw>

- *Mindset* harus berubah menjadi pemimpin di NKRI, bukan di kerajaan Simalungun. Artinya *mar-Simalungun* (menjadi Simalungun) itu selalu dalam konteks *mar-Indonesia* (menjadi Indonesia)
- Dalam sistem politik nasional, peran partai masih sangat penting di masa depan. Untuk ini perlu dipikirkan mulai sekarang agar pemuda Simalungun terjun ke partai untuk jadi pemimpin masa depan. Karena partai belum berhasil mengkader pemimpin daerah yang handal, ketokohan calon pemimpin perlu sebelum memasuki partai. Jadi ada dua jalan, ketokohan dulu baru masuk partai atau masuk partai untuk menjadi tokoh politik.
- Dengan prinsip *HdB* manusia Simalungun seharusnya mampu jadi pemimpin nasional atau regional. Ini harus diprogramkan oleh organisasi masyarakat (ormas) Simalungun mulai sekarang.
- Revolusi mental yang diterapkan sekarang dalam kehidupan bernegara seharusnya *HdB* dapat menjadi sumber inspirasi bahwa akhirnya kebenaran adalah pangkal segalanya.

Sebagai catatan terakhir harus kita jawab, apakah ada politik Simalungun bersatu itu? Dalam sejarahnya baru sekali Simalungun bersatu pada Pemilu 1955, yaitu dalam *Partai Kesatuan Rakyat Simalungun Sumatera Timur (KRSST)* yang disebut *Partai Bagod*. Kekuatan Parkindo dan PNI dari suku Simalungun kalah telak demi kesatuan Simalungun.

Pada era sesudahnya orang Simalungun terpecah menjadi pendukung partai yang ada pada masanya, sampai sekarang. Pada riset yang dilakukan KPU Kabupaten Simalungun¹⁵, Golkar merupakan pilihan rakyat Simalungun. Namun Pada Pemilu

¹⁵<https://mail.google.com/mail/u/o/?ui=2&ik=f4f7bb9cd1&view=att&th=15dc1d2882d3847a&attid=>

2009 dan 2014 pilihan rakyat mayoritas kepada Partai Demokrat. Perubahan pilihan berubah dari orientasi partai menjadi orientasi pemimpin. Pekerjaan rumah kita sekarang ialah bagaimana membentuk *Simalungun-Incorporate*, yaitu kekuatan bersatu dalam *Habonaron do Bona* walaupun partainya berbeda. Mungkinkah?

BAB V
HABONARON DO BONA
Makna filosofis pada pelaksanaan
adat istiadat Simalungun

Juandaha Raya P. Dasuha

A. Pendahuluan

Setiap etnik punya filosofis masing-masing. Orang Toba terkenal dengan *Arga do Bona ni Pinasa* yang merujuk pada kerinduan pada kampung halamannya sehingga dimanapun seorang Toba berdiam, keinginan terakhirnya adalah dimakamkan di tanah leluhurnya. Orang Karo memiliki filosofis *Pijer Podi* yang menurut Bastanta P. Sembiring berarti merangkul bersama-sama untuk bergotongroyong ibarat mematri logam agar kukuh. Orang Simalungun sendiri menyebut filosofisnya *Habonaron do Bona*, meskipun di beberapa marga ada juga filosofis masing-masing.

Dalam kesempatan kali ini, penulis merasa diberikan kehormatan memberikan makalah yang oleh panitia diberi penekanan pada makna filosofis *Habonaron do Bona* pada adat budaya Simalungun. Mungkin ada yang kurang pas menurut bapak dan ibu mohon untuk diberikan catatan kritis untuk masukan sekaligus perbaikan makalah ini.

B. Apa itu *Habonaron do Bona*?

Pada masa pemerintahan Bupati Simalungun Radjamin Poerba pada tahun 1960-an diputuskan lambang dan motto Kabupaten Simalungun. Lambang daerah ciptaan seniman Djaiman Saragih-pun ditetapkan menjadi lambang daerah Kabupaten Simalungun. Hymne *Habonaron do Bona* ciptaan A.K.Saragih diterima menjadi hymne daerah Kabupaten Simalungun, sedangkan motto daerah *Habonaron do Bona* ditetapkan DPRDGR Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Simalungun atas usul Poltak Saragih anggota DPRDGR saat itu.

Adapun motto *Habonaron do Bona* ini dipilih dan diterima tokoh masyarakat dan adat Simalungun saat itu. Lalu diundangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Simalungun No. 5/1960 tertanggal 14 Desember 1960 di Pematangsiantar.¹⁶

Sebelum dijadikan sebagai motto dan lambang daerah, Bupati Simalungun Radjamin Poerba pada masa itu terlebih dahulu membentuk tim peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, motto *Habonaron do Bona* sudah sejak lama hidup dalam kehidupan orang Simalungun. Motto ini tertulis dalam beberapa *pustaka laklak* (buku kuno dari kulit kayu alim), terutama dalam *pustaka* kuno *Parmongmong Bandar Sahkuda* dari Pamatang Bandar Sahkuda Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun milik Alip Damanik.

Selain sebagai motto Kabupaten Simalungun dalam lambang daerahnya, *Habonaron do Bona* juga ditetapkan sebagai motto Universitas Simalungun (USI) Pematangsiantar, sejak tanggal pendiriannya yakni pada tanggal 9 April 1966¹⁷. Namun bila kita perhatikan lambang USI sekarang ini, motto tersebut tidak ada tercantum.

Perihal kejujuran orang Simalungun berpedoman kepada falsafah hidup mereka yaitu *Habonaron do Bona, Hajungkaton do Sapata* yang artinya segala sesuatu harus berpangkal dari yang benar. Orang yang tidak konsisten menjungjung tinggi falsafah ini diyakini akan mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Falsafah ini juga berdampak pada pola pikir orang Simalungun yang sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Suatu keputusan barulah diambil setelah dipikirkan masak-masak, dan sekali ia memutuskannya maka jarang ia menarik keputusannya itu.

¹⁶Djariaman Damanik, Jan Berlizon Saragih, et. al., 1984. *Hasil Lokakarya Habonaron do Bona*. Pematangsiantar: Universitas Simalungun.

¹⁷Djariaman Damanik, Jan Berlizon Saragih, et. al., *loc. cit.*

Sebagaimana dalam ungkapan Simalungun, *Parlobei idilat bibir ase marsahap, bijak mosor pinggol asal ulang mosor hata*. Pertanyaan yang tidak kalah penting untuk diketahui adalah darimanakah asal-muasal falsafah itu? Penulis sendiri menemukan dua sumber yang berbicara tentang asal muasal falsafah di atas.

Sumber pertama menyebut falsafah di atas ditegakkan Tuan Sormaliat, yang berawal dari ditemukannya *Bambu Bertulis* sebanyak tujuh buah per batang; dimana bambu itu berisi tulisan dari ruas paling bawah hingga ke ruas atas yang berisi: penanggalan waktu (bulan, hari dan jam), ilmu pengobatan, ilmu nujum, ilmu pemanggil roh, dan lain-lain. Ia menemukannya di *Kerajaan Batang Toruh*, tepat di dasar jurang tempat ia jatuh. Kemudian selama tujuh hari lamanya ia bertapa disana seraya menuliskannya kembali ke dalam *laklak ni hayu alim* (kulit kayu ulin).

Pengetahuan yang ia peroleh dari *Bambu Bertulis* itulah yang kemudian ia pakai mengalahkan kekuatan musuh-musuh yang berusaha mengganggu ketentraman manusia. Akhirnya ia menegakkan dan bersandar pada falsafah *Habonaron do Bona* serta mengajarkannya kepada masyarakat kerajaan Rahat Di Panei. Sumber kedua menyatakan bahwa seloka *Habonaron do Bona* terdapat dalam Pustaka Simalungun kuno yang disebut *Pustaha Parmungmung Bandar Syahkuda* yang bertarikh kira-kira abad XV ketika Simalungun masih bernama *Harajaon Purba Deisa Na Ualuh*.

Dalam *laklak* itu dikisahkan bagaimana burung *Nangordaha* (Garuda) akhirnya memberikan keadilan (*habonaron*) kepada Sang Ma Jadi putra raja Purba Deisa Na Ualuh dengan cara membantunya dalam pertempuran antara Sang Ma Jadi dengan Raja Samidora (Samudera Pasai di Aceh). Ketika *Nangordaha* menukik hendak membunuh raja Samidora terdengarlah di langit ucapan *Habonaron do Bona* sebanyak tiga kali.

Sekalipun terjadi kekurangjelasan perihal asal muasal falsafah orang Simalungun, namun yang tidak boleh dilupakan

bahwa Simalungun memiliki *scripture* (kitab) yaitu *pustaha laklak* atau *buluh surat* yang salah satunya dikenal dengan sebutan *Pustaha Parpadanan Na Bolag* yang banyak mengungkap tentang sejarah, adat kebiasaan, dan juga *tabas-tabas* (mantera) dalam segala keperluan. Keseluruhan *tabas-tabas* (mantera) itu mengacu kepada satu tujuan yaitu *habonaron* (kebenaran dan keadilan) sebagaimana yang termaktub dalam falsafah hidup orang Simalungun *Habonaron do Bona, Hajungkaton do Sapata*.

C. Nilai *Habonaron do Bona* pada adat Simalungun

1. Nilai penghormatan, status dan kedudukan

Dalam setiap acara adat masyarakat Simalungun posisi adat ditentukan oleh peranan dan kedudukan seseorang dalam upacara adat tersebut. Taruhlah sebagai contoh dalam upacara perkawinan, urutan dalam penyambutan *tolu sahundulan lima saodoran* adalah:

hasuhuton pakon boruni. Tondong pamupus ni bapa pakon ompung diri (tondong bona pakon mataniari). Tondong pamupus ni namarunjuk tondong jabu ni bapa na marunjuk tondong baru

Urutan serupa diikuti pada saat acara *manurduk dayok binatur* (khusus dari *tondong* haruslah *dayok nanidarohkon* atau *nahinolatan/nahinasumba*), dengan sedikit perubahan sebagai berikut:

manjalo dapotan penganten, manurduk humbani tondong pamupus ni bapa pakon ompung ni na marunjuk ai, manurduk humbani tondong pamupus ni namarunjuk, manurduk humbani tondong jabu ni bapa na marunjuk, manurduk humbani tondong baru

Urutan yang sama berlaku pada saat upacara kematian *sayur matua*, dengan catatan tanpa *tondong baru*, karena dalam upacara kematian tidak ada lagi yang disebut *tondong baru*,

karena panggilan itu hanya sekali saja berlaku, yaitu pada saat pesta adat perkawinan.

Pada saat acara *mangaloalo tondong* rombongan *suhut paranak* dengan penari utamanya berdiri di depan dengan membawa *pinggan marisi batuni apuran* akan memimpin rombongan membawa tarian *tortor Sombah* berhadapan dengan rombongan *suhut parboru (tondong)*. Rombongan *suhut paranak* menunduk menghormati *tondong*, setelah *pinggan* diterima, rombongan *paranak* diwakili *boru* atau *anakboru jabu* mengiringkan *tondong* ke *rumah bolon* untuk selanjutnya duduk di *apei na bayu*.

Pada upacara kematian *sayur matua*, suasana takzim lebih jelas lagi. Rombongan *hasuhuton* dengan *boru* dipimpin anakboru jabu memimpin rombongan *paranak mangaloalo tondong* yang datang dengan menjujung *tombuan*¹⁸, tetapi dengan sikap *sombah* sebanyak tiga kali. Pada saat sikap menghormat ini, rombongan *suhut* menyerukan, *Ou bapa* apabila yang meninggal adalah *na sayur matua dalahi* dan *ou inang*, apabila yang meninggal adalah *na sayurmatua naboru*¹⁹.

¹⁸Keranjang khas Simalungun yang disebut *tapongan*, ke dalam dimasukkan makanan adat sesuai pelaksanaan adat (biasanya daging ayam yang sudah dimasak dan diatur sedemikian rupa), nasi dalam *balbahul*. Disebut *tinombu* sebab ayam tersebut dimasak dengan memakai wadah bambu muda, sehingga bararoma harum dan gurih. *Tombuan* adalah makanan adat yang dimasak di dalam bambu tadi. Posisi dan riasan bambu berbeda pada saat upacara kematian dan sukacita.

¹⁹Di Simalungun awalnya tidak dikenal istilah *sarimatua*, mungkin istilah ini berasal dari etnis Batak Toba yang masuk ke Simalungun. Tingkat kematian yang dikenal etnis Simalungun adalah: *matei manorus* (bayi yang mati pada saat dia lahir), *matei garama/anakboru*, *matei matalpok* (sudah berkeluarga tetapi anaknya masih belum dewasa), *matei matua* (mati meninggalkan anak dan cucu, tetapi masih ada yang belum kawin), *matei sayur matua* (mati dengan meninggalkan anak dan cucu sudah ada dari tiap anak-anaknya), terakhir mati *layur martuah* (mati dengan meninggalkan anak, cucu

2. Nilai-nilai simbolik pada upacara adat Simalungun

2.1. Demban (sirih)

Sirih adalah tanaman yang merambat yang merupakan bagian yang tidak pernah absen dalam upacara adat Simalungun. Selain digunakan pada upacara adat, demban berfungsi sebagai bahan dalam pengobatan tradisional dan makan sirih (*marapuran*, *mardemban*) atau memulai pembicaraan dengan orang lain (*demban mungkahni sahap*) yang menunjukkan rasa hormat dan pengakuan orang Simalungun terhadap kedudukan seseorang dengan penuh rendah hati. Beberapa jenis *demban* yang sering dipergunakan dalam upacara adat Simalungun adalah:

Demban salpu mangan: yaitu *demban* di dalam piring (pinggan) yang diserahkan kepada tondong setelah selesai makan pada acara adat Simalungun. Di dalam pinggan dimasukkan demban masing-masing dengan posisi saling berhadapan dengan ujung (*tappuk*) mengarah keluar masing-masing dengan jumlah yang berbeda untuk bapa dan inang; jika bapa 8 maka ibu 6. Di atas demban diletakkan sejumput *timbanghou*, menyusul satu buah *gambir adat* (yang bentuknya bulat tipis) dan ditindih dengan sejumlah uang menurut bilangan adat Simalungun dan ditutup dengan *bulung tinapak*. *Demban tasakan* yaitu demban yang telah *diattupi* (diberi *hapur*, gambir dan pinang).

Demban gunringan, *demban passing* (sirih semata) sejumlah 36, 48 atau 64 yang dibungkus dengan daun taruk enau diikat dengan benang berwarna merah (*bonang sigerger*) yang sering juga disebut *apuran partadingan*.

Demban sayur, yaitu demban yang sudah *iantupi* yang diberikan kepada seseorang dalam rangka perkenalan (*demban sisei*), atau mengundang seseorang menghadiri acara pesta adat.

dan cicit, semuanya sudah punya keturunan sampai generasi ketiga atau keempat), kematian yang terakhir inilah kategori kematian yang paling diinginkan orang Simalungun, kematian orang bertuah.

Demban sombah, yaitu *demban* yang sudah *iattupi* tetapi sebanyak dua lembar dengan ujungnya dilipat saling berhadapan.

Demban tobus huning, yaitu *demban* yang diberikan seorang calon mempelai perempuan kepada ibu yang sudah melahirkannya, yang bermakna simbolik ungkapan terimakasih kepada sang ibu yang sudah melahirkannya dan merawatnya sejak lahir sampai bisa mandiri dan *malangkah hu jabuni* sekaligus permintaan maaf dari calon pengantin kepada sang ibu atas tindakannya dan perkataannya selama hidupnya, dan juga permohonan restu dari sang ibu kepada calon mempelai perempuan yang akan menempuh rumah tangga yang baru.

Dari masing-masing contoh *demban* yang biasa dalam upacara adat Simalungun, maknanya adalah persaudaraan, saling bermaafan dan saling hormat-menghormati dan mengetahui posisi masing-masing dalam kekerabatan dalam upacara-upacara adat Simalungun.

2.2. *Partadingan tanda kesetiaan janji (sisuhun padan)*

Partadingan adalah perangkat adat Simalungun dalam upacara pernikahan yang sifatnya wajib, disebut *partadingan* karena inilah yang harus diserahkan seorang perempuan yang akan meninggalkan (*manadingkon*) kedua orangtuanya untuk menjadi *inang* pada keluarga suaminya. Dengan demikian pada dasarnya orang Simalungun tidak menganggap sejumlah uang yang diserahkan itu sebagai *boli*²⁰ (uang yang diterima seumpama jual beli barang) tetapi bentuk penghormatan, tanggungjawab dan ucapan terimakasih dari keluarga pihak laki-laki kepada kedua orangtua calon mempelai perempuan yang telah merelakan anak perempuannya menjadi *inang* di dalam keluarga suaminya meneruskan keturunan keluarga pihak laki-laki.

²⁰Beberapa penulis Belanda menyebutnya sebagai tindakan jual beli manusia. Ini dapat dipahami, sebab mereka tidak memahami betul nilai di balik *partadingan* tersebut.

Isi dari *partadingan* ini menyiratkan kronologi hidup manusia sejak dari lahir sampai dewasa dari pihak calon mempelai perempuan dan kesungguhan hati dan tanggung jawab dari calon mempelai laki-laki dan keluarganya pada perjanjian yang telah mereka sahkan pada saat *pajabu parsahapan* (Toba: *marhata sinamot*). Itulah sebabnya, *partadingan* diserahkan langsung calon mempelai perempuan dengan disertai calon suaminya dengan bimbingan *Anakboru Jabu* calon mempelai laki-laki pada saat *maralop*.

Setelah *partadingan* diterima, maka *Anakboru Jabu* pihak perempuan akan membuka *partadingan* dan mengeluarkannya satu persatu disaksikan seluruh pihak yang berkumpul di situ. Pada saat inilah tampak jelas bahwa orang Simalungun adalah orang yang tidak ingar pada kesepakatan yang sudah diputuskan dengan berlandaskan *Habonaron do Bona*. Tidak ada yang ditambahi maupun dikurangi (Simalungun: *sisuhun padan do sidea*).

2.3. Makanan adat Simalungun Dayok Nabinator

Makanan adat suku Simalungun bahan dasarnya adalah ternak ayam (karena belum pernah terjadi ayam hutan/*dayok rimba* dijadikan makanan adat).²¹ Alasan mengapa orang Simalungun menjadikan ayam sebagai makanan adatnya dijelaskan Japiten Sumbayak (2001:24-25) sebagai berikut:

- Ayam menggambarkan kegigihan, ketekunan dan disiplin dalam mengerami telurnya dan menjaga sarangnya dari serangan hewan lain.

²¹Tradisi serupa terdapat pada kebiasaan masyarakat di Samosir (Simanindo, Ambarita), Pakpak Dairi, Karo bahkan pada suku-suku pedalaman di Indo China. Dalam cerita rakyat *Parpandanan Na Bolag*, rupanya makanan adat tidak pernah memakai daging babi, tetapi makanan yang dianggap punya nilai budaya tinggi seperti ayam, kerbau, lembu atau kambing. Babi rupanya adalah makanan yang biasa di kalangan masyarakat kelas bawah dan budak pada masa lalu.

- Ayam menggambarkan sifat kerja keras dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya (Simalungun: *marhaer*).
- Ayam menggambarkan sifat kemandirian di mana seekor anak ayam yang sudah dibina mandiri akan dilepas oleh induknya mencari makan sendiri.
- Ayam menggambarkan sikap takwa kepada Tuhan, tidak melupakan Sang Pencipta walau menikmati seteguk air di tengah lautan luas.
- Ayam menggambarkan sikap optimis dan disiplin dalam kesehariannya, di mana setiap pagi berkokok memanggil seluruh makhluk untuk bangun pagi-pagi dan siap untuk memulai pekerjaannya.
- Ayam dapat diterima penganut agama apapun, ini menggambarkan sikap orang Simalungun yang dapat menerima agama apapun, bahkan walaupun jika kemajemukan agama itu terdapat dalam keluarga besarnya, sikap toleransi beragama orang Simalungun dapat menjadi contoh.

Namun ada juga sifat negatif ayam yang harus dihindari seperti berikut ini, yaitu:

- *Ulang songon dayok sabungan, tapi dayok boruboru*: artinya jangan bersikap keras kepala dan tegar tengkuk dalam pergaulan sehari-hari, apalagi di perantauan, tetapi bersikap satu lawan terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit.
- Tidak tahu berterimakasih. Anak ayam yang sudah mandiri lupa pada induknya.
- Lupa daratan. Merasa sudah menjadi bagian dari komunitas yang lebih luas, apalagi yang dianggap lebih maju dan beradab dari sukunya sendiri, seperti pepatah Simalungun: *tading gargar na marisi tungou*; malu menjadi orang Simalungun, jika sudah menjadi orang besar atau bergaul dengan suku yang lain.

Selanjutnya Japiten Sumbayak²² menjelaskan makna filosofis *dayok nabinatur*, atur *pinarmanggoluh* sebagai berikut:

Hot ma bani hundulanmu, janah pongkut horjahon nolihamu artinya, tunaikan tugas dan tanggungjawab dalam setiap pekerjaan sebaik-baiknya, sebagai eksekutif, judikatif, legislatif atau profesi lainnya yang berguna bagi masyarakat luas. Seluruh bagian-bagian tubuh ayam adalah satu kesatuan yang semasa hidupnya turut merasakan sakit dan nikmatnya kehidupan. Rasa solidaritas dan persatuan harus dijaga dengan sebaik-baiknya, hindari saling menjatuhkan, memfitnah atau melecehkan orang lain.

Pada saat menyerahkan *dayok nabinatur*²³ orang Simalungun biasa mengatakan, *Onma dayok binatur, batur pinarmanggoluh, goluh nasiam na irumah on lambin atur, parlahou pe gabe harosuh*. Ini bermakna tujuan cita-cita hidup orang Simalungun dalam mewujudkan *Habonaron do Bona*, agar selama hidupnya diharapkan kehidupan menjadi berkat bagi sekitarnya, menjunjung tinggi aturan dan ketertiban dalam seluruh aspek kehidupan, menjadi teladan kepada semua orang. Ini senada dengan cita-cita Injil (ajaran Isa Al Masih), menjadi garam dan terang kepada seluruh makhluk²⁴.

²²Budayawan dan tokoh adat Simalungun tinggal di Pamatang Raya Simalungun.

²³Ada sebagian menyebut *dayok nibatur*, *dayok binatur*, *dayok niatur*. Semuanya bermakna sama, ayam dalam posisi diatur sebagaimana ketika masih hidup, di Raya dalam posisi mengeram, di Silimahuta (Simalungun Atas) dalam posisi terbang. Di Raya tidak memakai penopang (*tungkol osang*), di Simalungun Atas sebaliknya. Ini hanya semacam variasi saja sesuai daerah, maknanya tetap sama sebagai makanan adat, pengantar bicara/maksud tujuan orang yang menyerahkan kepada yang menerima.

²⁴Ini menurut tafsiran saya sebagai seorang Kristen.

2.4. *Hiou Porsa (kain putih) dalam horja sayur matua*

Dari antara suku-suku yang disebut '*Batak*', hanya suku Simalungun yang memiliki adat *patampeï porsa*.²⁵ Suku Karo juga memiliki tradisi yang hampir serupa, tetapi hanya sebatas memberikan selempar kain putih kepada jenazah dari pihak *kalimbubu (tondong)*. Makna dari *porsa* menurut Mansen Purba dan Oji E. Saragih hanyalah sebatas pertanda bahwa yang meninggal sudah *sayur matua* atau *matei matua*. Makna yang lain dijelaskan Jarisman Saragih Garingging *Anakboru Jabu* marga Purba Dasuha di Merek Raya.²⁶

Menurut beliau, sejak dulu, orang Simalungun sudah memakai *porsa* pada saat *horja sayur matua* dengan pengertian bahwa orang yang meninggal itu sudah berusaha sedaya mampu yang ia lakukan selama hidupnya untuk memenuhi tugas dan tanggungjawabnya sebagai orangtua. Dia menjaga keluarganya dengan baik, membesarkan anak-anaknya dan memberikan kepada mereka nafkah dan bimbingan sampai anak-anaknya punya rumahtangga sendiri dan beranak cucu dengan baik.

Karena itu, pantas seluruh orang yang ditinggalkannya mengucapkan syukur kepada Tuhan mengikhlaskan kepergiannya dengan tanda kain putih sebagai pertanda ketulusan hati seluruh yang hadir. Tanda putih juga bermakna sikap saling mengampuni dan melupakan kesalahan almarhum selama hidupnya sehingga tercipta harmoni yang baru, lembaran yang baru dengan anggota keluarga yang ditinggalkannya.

²⁵Zaman dulu, pulau Sumatra dikenal dengan nama Pulau Perca, apakah ini berawal dari *porsa* atau *pilou pilou* yang biasa dipakai orang Simalungun pada saat prosesi acara kematian dahulu? Mengingat daerah kediaman orang Simalungun sebelum abad XV dominan berada di sekitaran pesisir pantai Timur Sumatra.

²⁶Beliau adalah praktisi adat Simalugun tinggal di Huta Dolog Merek Raya Simalungun, kampung penulis.

2.5. Pertanggungjawaban atas *parpaingkat*

Pada waktu pesta adat perkawinan Simalungun, pihak *tondong* (*siparboru*) menyerahkan *parpaingkat* kepada puterinya sebagai bantuan *tondong* kepada anak perempuannya yang akan menjadi ibu (*inang*) di rumah keluarga pihak suaminya. Adat Simalungun menabukan seorang perempuan yang menjadi *inang* masuk ke keluarga besar suaminya tanpa membawa apa-apa (Simalungun *mangambe roh*).

Tondong sadar bahwa menjadi inang dalam rumah tangga yang baru adalah penuh tantangan dan kesulitan, khususnya pada saat memulai rumah tangga dari nol. Untuk itu pihak *parboru* memberikan bekal kepada puterinya dan helanya bekal dalam menempuh rumah tangga mereka yang baru. Pada zaman dahulu sebelum kekristenan masuk ke Simalungun, seorang calon mempelai perempuan yang akan menikah diharuskan meminta *simatah* (pemberian berupa emas, perhiasan) kepada orangtuanya, karena orang Simalungun merasa malu jika tidak mampu *paingkathon* anaknya dengan barang berharga yang dia pakai untuk rumahtangganya kelak (istilah sekarang deposito). Barang ini tidak boleh dijual, jika bukan karena keperluan yang sangat mendesak, yaitu membesarkan anak-anaknya, dan tidak boleh dijual karena membayar hutang. Nah, dalam meminta ini punya seni tersendiri yang disebut *tangis-tangis boru laho*. Isi syairnya demikian:

Ou inang, namarbayu, misir ma ahu manjumpahkon amang siadopon. Isukkun inang naumbanei ma holi ahu, ija do nini holi (borgok=kalung emas, pinggol=sutting/anting-anting emas, tangan=gelang emas)..hu, Naha ma ningku mambalos.

Sekarang ini barang *parpaikkat* dari *tondong* kepada *boru*-nya dan *hela*-nya (menantu) itu ditunjukkan dengan memberikan *hiou tanda hela* (*hu atas hu toruh: gotong, hiou pakon kaen sarung*) dan *bulang* kepada *boru*-nya (*pitah ipatampe do hansa, sedo igattih*), kemudian menyusul

diberikan *simatah* tadi, yaitu emas, sejumlah uang, *apei nabayu* (tikar putih), *hudon*, pinggan (perlengkapan rumah tangga bekal mereka setelah *manjae*), lemari, tempat tidur, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan pihak *tondong*. Pendeknya orang Simalungun yang puterinya menikah dengan orang lain, tidak akan membiarkan puterinya masuk ke rumah pihak laki-laki tanpa bekal apapun. Kalau zaman dahulu, di mana setiap puteri Simalungun pintar bertenun, dia juga akan membawa beberapa lembar kain tenunannya yang akan diberikan sebagai *siluah* (oleh-oleh) kepada mertuanya dan keluarga dekat suaminya.

Selanjutnya, pada waktu si perempuan yang sudah menjadi *inang* ini melahirkan anak-anaknya dan meninggal kelak, pihak *tondong* dalam acara adat *mangeui bajut* akan menyinggung harta pemberiannya tersebut, apakah benar-benar dipergunakan seperti yang sudah dipesankannya pada waktu *paingkathon boru*-nya ke rumah suaminya? *Nah*, di sini ada nilai budaya pertanggungjawaban keihlasan *parboru* (*tondong*) yang ingin melihat rumah tangga puterinya berhasil dalam membesarkan anak-anaknya dan menjaga nama baik keluarga besarnya.

Hal ini dapat kita mengerti lagi dengan lebih jelas, apabila kita mengingat kembali perkawinan agung (*parunjukon bolon*) antara putera-puteri raja-raja Simalungun tempo dulu, yang melalui ikatan perkawinan selain melanjutkan tradisi, meneruskan dinasti dan memberikan rakyatnya waktu untuk bersukacita bersama keluarga kerajaan. Kita mengingat bahwa *puangbolon* (permaisuri) raja-raja Simalungun adalah generasi turun temurun dari raja-raja pendahulu suatu kerajaan di Simalungun²⁷ yang tidak terputus. Seperti contoh, keluarga

²⁷Kerajaan tertua di Simalungun mula-mula adalah *Nagur* dan *Batangiou* (cikal bakal Kerajaan Tanoh Jawa). Pada abad XIV, *Nagur* pecah menjadi *Silou*, *Panei*, *Sitonggang* (*Siantar*) dan *Tanoh Jawa*. Pada abad XIX Simalungun dibagi Belanda menjadi tujuh *landschap*: *Silimahuta*, *Raya*, *Purba*, *Panei*, *Dolog Silou*, *Tanoh Jawa* dan *Siantar*.

besar Kerajaan Panei dinasti Purba Dasuha sejak abad XIV telah mengambil permaisuri (*puang bolon*) hanya dari puteri raja-raja keturunan Nagur (Siantar, Bandar, Sidamanik, Sipolha dan Nagur Raja) bermarga Damanik sampai ke rajamuda terakhir pada tahun 1946²⁸.

2.6. *Hiou parpudi*²⁹ dalam upacara adat Sayur Matua.

Pada waktu yang meninggal masih hidup, dia selaku *boru* selalu aktif di rumah *tondong*nya dalam urusan adat dan menerima *hiou* dari *tondong*nya. Setelah dia meninggal, maka pekerjaannya sebagai *boru* juga berakhir, untuk itulah *tondong pamupus* (kalau yang meninggal laki-laki) atau *tondong jabu* (kalau yang meninggal perempuan) akan memberikan *hiou parpudi* kepada *borunya* yang telah almarhum tersebut. Tetapi menurut adat Simalungun, selama almarhum masih punya keturunan, maka fungsi dan kedudukannya sebagai *boru* di rumah *tondong*-nya masih tetap berlaku selama keturunannya (anak-anak almarhum) masih bersedia. Maka untuk itu, sudah

Klan masing-masing *zelfbestuur* (penguasa otonom): Saragih Garingging, Purba Pakpak, Purba Dasuha, Purba Tambak, Sinaga Dadihoyong dan Damanik Bariba. Sejak 1946, ketujuh *landschap* dihapuskan dalam amarah massa bernama revolusi sosial: raja-raja dibunuh, hartanya dirampok.

²⁸Pada saat ini, terjadi pembantaian dan penjarahan terhadap raja/kerabat raja di seantero Simalungun (secara umum di seluruh Sumatera Timur). Untuk uraian lebih rinci dapat dibaca buku karangan Erond Litno Damanik, *Amarah: Latar dan Ambruknya Swapraja di Simalungun* (Medan: Simetri Institut, 2016).

²⁹Di Simalungun ada sebagian menyebutnya: *hiou ayubayub, tampei tuah*. Bila *hiou* ini jatuh ke jenazah maka hubungan antara pemberi *hiou* dengan keturunan si mati putus. Karena keturunan si mati tidak ingin putus hubungan dengan *tondong* si mati, maka mereka menundukkan diri ke arah jenazah sehingga kain tersebut terhalang kepada si mati, dan akhirnya diberikan (*ihiouhon*) kepada keluarga/keturunan si mati, dengan ini maka hubungan mereka tetap seperti sediakala.

menjadi adat pula, bahwa anak-anak almarhum tidak akan membiarkan *hiou* tersebut menjadi *hiou na parpudi*, mereka serempak akan menunduk di atas jenazah sehingga *hiou* tersebut akhirnya diberikan kepada anak-anak almarhum. Itu artinya hubungan keluarga mereka tidak terputus hanya karena almarhum telah meninggal dunia, karena jabatan dan tugas sebagai *anakboru* masih diteruskan oleh keturunan almarhum. Di Simalungun, *hiou tutup batang* adalah *hiou* yang disediakan *hasuhuton* sendiri.

2.7. *Hinatunggungi Naboru*³⁰ pada adat Simalungun

Mansen Purba mengatakan perempuan dalam budaya Simalungun sangat dihormati dan memperoleh tempat yang layak dan terhormat. Orang memang sering beranggapan bahwa posisi perempuan dalam adat Simalungun hanya sebagai pelengkap dan kurang berperan dalam acara adat Simalungun, dan ada kesan bahwa perempuan dipinggirkan. Ini mungkin hanya dilihat orang yang kurang paham dengan adat-istiadat Simalungun (bahasa Mansen Purba: *Simalungun naso maradat do naso mangkargahon naboru*).

Dalam adat Simalungun, posisi perempuan itu sangat penting, kenapa, karena perempuan dalam istilah Simalungun dikatakan *Naboru* atau sering disebut '*daboru*'. Istilah '*na*' atau '*da*' berarti, '*sang*' itu artinya *naboru/daboru* adalah padanan yang cukup memperhitungkan kedudukan perempuan di Simalungun.

Dalam konteks dunia keraton Simalungun, perempuan sangat memegang peranan penting, ia disebut '*nasipuang*', '*puang*' berarti orang yang dihormati, bijaksana dan perkasa (bandingkan dengan konsep *puanglima* atau *panglima*). Dalam hukum adat raja-raja Simalungun, seorang isteri raja (*nasipuang*) tidak boleh dilecehkan oleh siapapun, bahkan oleh raja sendiri. *Nasipuang* adalah penentu kebijakan di istana, dia

³⁰Secara harafiah mengandung makna: posisi, kedudukan hormat, marwah, wibawa perempuan dalam adat Simalungun.

yang menentukan apa yang akan dimakan oleh raja (ada cerita di Kerajaan Purba *tempo doeloe*, seorang permaisuri raja ingin memakan anak dari selir raja, dan oleh karena raja tidak dapat menolak, terpaksa tukang masak istana bersiasat menggantikannya dengan daging seekor monyet). Dalam adat Simalungun, yang *mansabeihon hiou* adalah perempuan dibantu laki-laki, peran perempuan di sini penting, sebab dia yang memberikan nasehat kepada yang menerima *hiou*.

Istilah Simalungun, *Anakboru Jabu* dan *Anakboru sanina* lebih jelas menggambarkan posisi perempuan ini; seorang perempuan walau sudah menjadi klan suaminya tetap punya peranan strategis di rumah *tondong*, bahkan walau ia sudah meninggal, kedudukannya itu digantikan oleh anaknya *Anakboru Jabu* (ABJ) adalah anak dari *amboru* dari *tondong*. Ini yang membedakan Simalungun dari suku lainnya, apalagi dengan suku Toba yang sedikit sekali memberikan posisi ini kepada perempuan.

Demikian pula dalam keputusan adat, perempuan harus hadir dan memberikan inisiatif dan pandangannya atas suatu persoalan yang dihadapi. Dalam sejarah Kerajaan Purba pada sekitar abad XIX, pemimpin pasukan Kerajaan Purba yang mengalahkan pasukan Rondahaim dari Raya adalah seorang perempuan, yaitu *Puangbolon* tuan Purba *boru* Damanik dari Kerajaan Siantar.

Pada waktu nyali pasukan Purba sudah menciut mendengar berita *Tuan Raya Namabajan*, *Puangbolon* Damanik ini maju memimpin pasukan dengan siasatnya yang licin dan berhasil memukul mundur mereka pulang ke Raya, sampai-sampai Tuan Rondahaim marah dan ucapannya melegenda sampai sekarang, *Talu gotong-gotong ibahen bulang-bulang* (kalah laki-laki dibuat perempuan).³¹

³¹Demikian dalam kisah yang dihimpun Pdt. J. Wismar Saragih sesuai saksi mata hidup yang menulis kisah mereka di hadapan kontrolir dan raja Raya di istana raja Pematang Raya pada tahun 1935. Sesuai adat hanya putera tertua raja yang dilahirkan *puangbolon* yang berhak

2.8. Bernilai solidaritas-kolektif (*gotong royong*)

Budaya gotongroyong ini masih hidup di pedesaan Simalungun, seperti *marharoan* atau *marsialop ari*. Penulis pernah menyaksikan kerjasama yang baik ini di daerah Silou Kahean dan di daerah Silimahuta (Mardingding, Nagasaribu dan Rakutbesi) dimana dengan digotong beramai-ramai, masyarakat desa bergotongroyong memindahkan rumah panggung dari satu tempat ke tempat lain dengan memakai bambu dan kayu. Mereka juga bergotongroyong membangun fasilitas umum seperti kamar mandi umum, pemandian umum dan fasilitas umum lainnya (gereja, masjid dan balai desa).

Secara khusus di daerah Kecamatan Raya, tradisi saling memberikan bantuan berupa uang kepada *suhut* yang akan melakukan pesta adat (*paoppo anak*) dilaksanakan pada saat *riah tongah jabu* (khusus kepada keluarga dekat), dan *tonggo raja* (*riah huta*). *Suhut* mengundang keluarga dekat atau orang sekampung atau kampung yang berdekatan dengan memberikan selempar daun sirih (*demban sayur*).

Setelah undangan hadir pada hari yang sudah ditentukan, dimulailah musyawarah adat membicarakan segala sesuatu yang akan dilaksanakan pada pesta pernikahan tersebut menurut adat-istiadat Simalungun. Masing-masing yang hadir akan memberikan bantuannya berupa uang yang dikumpulkan dan diserahkan kepada *hasuhuton bolon* untuk dipakai sebagai *tondolanni supak* dalam membantu *hasuhuton* dalam pesta adat tersebut. Pada pesta perkawinan, orang yang hadir dalam *riah tongah jabu* dan *riah huta* (*tonggo raja*) tersebut masih

dinobatkan menjadi raja menggantikan ayahnya. Gelarnya selama ayahnya masih hidup disebut Rajamuda. Rajamuda terakhir di Kerajaan Panei misalnya adalah Tuan Margabulan Purba Dasuha yang ibunya berasal dari Marihat Siantar klan Damanik, di Raya rajamuda terakhir bernama Tuan Jahali Saragih Garingging yang ibunya adalah puteri raja Panei klan Purba Dasuha.

memberikan *tumpak* berupa uang dan beras kepada *hasuhuton*³².

D. Penutup

Demikianlah, nilai-nilai *Habonaron do Bona* di dalam adat budaya Simalungun yang dapat penulis ketengahkan pada kesempatan ini. Masih banyak lagi nilai-nilai budaya Simalungun yang dapat digali. Namun dengan segala keterbatasan, sekian dulu yang dapat penulis paparkan. *Horas ma banta haganupan*.

Daftar Pustaka

- Damanik, Djariaman; Saragih, Jan Berlizon, et. al., 1984. *Hasil Lokakarya Habonaron do Bona*, P. Siantar: FKIP USI, 16 Maret 1984.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 1982. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Purba, M.D. 1977. *Mengenal Kepribadian Asli Rakyat Simalungun*. Medan.
- _____. 1987. *Sejarah Kebudayaan Simalungun*. Medan.
- Purba, Mansen. 1984. *Pangarusion Pasal Adat Perkawinan Simalungun*. Medan: Komite Bina Budaya Simalungun.
- Purba, Masen dan Oji E. Saragih. 1994. *Horja Sayur Matua*. Medan: Bina Budaya Simalungun.
- Saragih, Jaiman (penyunting). 1976. *Pola Kebudayaan Kesenian Batak Simalungun: Hasil Seminar Kesenian Batak Simalungun*. Pematang Siantar: Dewan Kesenian Simalungun-Siantar.
- Sumbayak, Japiten. 2001. *Refleksi Habonaron do Bona dalam Adat Budaya Simalungun*. Pematang Raya.

³²Pada saat acara adat berlangsung kepada mereka diberikan *panganan pinatunggung*.

Tarigan, H. Guntur. 1982. *Bahasa dan Kepribadian Simalungun*.
Makalah Harungguan Bolon PMS. Pematang Siantar.

BAB VI

HABONARON DO BONA

Filosofi kehidupan Orang Simalungun abad 21

Hisarma Saragih

Simalungun sebagai kelompok etnik yang berada di Sumatera Utara, pada abad ke-21 ini sedang melewati periode sejarah yang sangat kritis yang ditandai oleh adanya perubahan politik yang sangat dinamis. Berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dalam bingkai NKRI pastilah dihadapi untuk menciptakan kehidupan harmonis. Dari segi kepemimpinan, tahun 2021 akan dilaksanakan pergantian bupati Simalungun dan tahun 2022 pergantian walikota Pematangsiantar. Dua daerah ini adalah wilayah asli dan wilayah awal orang Simalungun, sebelum mereka berdiaspora ke luar wilayah itu menuju santero wilayah Nusantara bahkan mendunia.

Orang Simalungun diikat sistem sosial, adat istiadat berupa kearifan lokal dalam berinteraksi sehingga ikatan emosional akan sistem sosial berinteraksi tetap dimaknai sebagai sesuatu yang hakiki untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial. Falsafah *Habonaron do Bona* (Kebenaran adalah Pangkal) diyakini sebagai perekat hubungan sosial sebagai dasar pemikiran dan dasar filsafah dalam bertindak dalam membangun Simalungun sehingga tetap dapat memberi kontribusi dalam pembangunan Bangsa Indonesia melalui orang Simalungun dalam bingkai NKRI.

Kata kunci: Orang Simalungun, aktualisasi, implementasi, *HdB*.

A. Pengantar

Simalungun adalah nama wilayah pemerintahan yakni Kabupaten Simalungun dan juga sebagai nama etnis yang

membedakannya dari etnis lainnya³³. Orang Simalungun merupakan pengkategorian sub etnik 'Batak': Toba, Pak-pak Dairi, Karo, Simalungun, Angkola, Mandailing³⁴, yang mendiami daerah Sumatera Utara. Namun pada masa sekarang banyak dari orang 'Batak' telah menyebar ke lain-lain daerah ke luar Sumatera Utara, seperti ke Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan tempat lainnya di Indonesia, yang disebabkan berbagai faktor kemajuan peradaban dan kebudayaan³⁵.

Berdasarkan data BPS (2016), bahwa jumlah penduduk Kabupaten Simalungun tahun 2015 diperkirakan 849.405 jiwa³⁶. Penduduk tersebut belum merinci berapa orang Simalungun di Kabupaten Simalungun. Berdasarkan mata pencaharian, penduduk Simalungun mayoritas bekerja pada sektor pertanian dengan tanaman palawija terutama penduduk Simalungun Atas dan perkebunan dengan aneka komoditi seperti sawit, karet, teh, coklat, dan sebagainya terutama penduduk Simalungun Bawah. Dengan demikian secara geografis Kabupaten Simalungun dapat dibedakan dengan wilayah Simalungun Atas yang bersentuhan dengan Danau Toba dan Simalungun Bawah yang bersentuhan dengan Tanah Melayu.

Sejak awal Orang Simalungun dalam kehidupan sosial-budayanya hidup secara harmonis dengan mempedomani falsafah hidup yang mereka warisi dari leluhurnya. Falsafah hidup yang dianut telah mampu menuntun orang Simalungun dalam dinamika interaksi sosial dengan harmonis. Walaupun sejak permulaan abad ke-20, budaya asing memasuki daerah ini

³³Juandaha Raya P.Dasuha dan Martin Lukito Sinaga, 2003, *Tole den Timorlanden das Evangelium: Sejarah Seratus Tahun Pekabaran Injil di Simalungun 2 September 1903-2003*, Pematangsiantar: Kolportase GKPS, hlm.1

³⁴Lance Castles, 2001, *Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatera: Tapanuli 1915-1940*, Penerbit KPG Gramedia : Jakarta, hlm.3.

³⁵Payung Bangun, *Kebudayaan Batak dalam Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Hlm: 94-95).

³⁶BPS Kabupaten Simaungun Lakip, 2016. hlm.2

secara intensif, namun orang Simalungun tetap memelihara tradisi kearifan lokalnya. Namun tidak dapat dipungkiri perjumpaan dengan bukan orang Simalungun dapat mempengaruhi pandangan hidup yang telah dianut semula, sehingga tergerus, atau bergeser sehingga terjadi disharmoni dalam interaksi sosial.

Falsafah hidup orang Simalungun diamati dari motto hidup yang dianut yaitu *HdB* yang secara gramatikal diartikan '*kebenaran adalah pangkal*' dalam setiap derap langkah kehidupan mereka. Tentunya dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia saat ini bahwa kearifan lokal yang bersifat mendukung ketahanan bangsa dan negara wajib dijunjung tinggi dan dilestarikan keberadaannya, disesuaikan dengan masa kini, sehingga pada gilirannya tercipta tatanan kehidupan yang harmonis.

Sebagai permasalahan saat ini bagaimana falsafah *HdB* dipahami orang Simalungun oleh generasi muda maupun generasi tua? Bagaimana orang Simalungun mewariskan falsafah *HdB*? Bagaimana orang Simalungun melakukan aktualisasi falsafah *habonaron do bona* dalam bidang politik?. Pertanyaan ini menjadi diskusi dalam tulisan ini sehingga diharapkan dapat menghasilkan sebuah perspektif aktual dalam menyikapi pembangunan politik untuk kemajuan Simalungun ke masa yang akan datang. Pembahasan ini menggunakan pendekatan historis, dengan menggunakan sumber data dari dokumen, literatur sebagaimana dalam daftar pustaka, dan ditambah dengan pengamatan terhadap fenomena orang Simalungun dalam melakukan interaksi baik dalam berpolitik, beradat maupun beragama yang menjelaskan falsafah *HdB*.

B. Pembahasan

1. Falsafah Habonaron do Bona

Menjelaskan falsafah orang Simalungun *HdB* dapat dilakukan dari beberapa perspektif yaitu: perspektif historis, perspektif antropologi budaya, perspektif etimologis atau

kebahasaan, dan perspektif filosofis. Berdasarkan perspektif historis atau kesejarahan merupakan sudut pandang masa kini yang dijelaskan dari apa yang sudah terjadi, atau dialami tidak terlepas dari masa lalu dapat memprediksi tentang apa dan bagaimana masa depan³⁷. Bahwa apa yang terjadi saat ini tidak terlepas dari rangkaian masa lalu manusia dalam waktu dan ruang. Sejarah itu yang diingat (*remembered history*), sejarah itu yang ditemukan kembali (*recovered history*) dan sejarah itu yang ditemuiphtakan (*invented history*).

Sejarah yang di ingat (*remembered history*) dapat digambarkan sebagai memori kolektif suatu komunitas atau bangsa atau entitas lainnya, apa yang dipilih untuk diingat baik melalui kerja para pemimpin, penguasa, penyair maupun pengisah, adalah yang dianggap bermakna baik sebagai relitas maupun simbol. Sejarah itu yang ditemukan kembali (*recovered history*) ini adalah sejarah peristiwa dan gerakan, tokoh dan gagasan, yang dalam batas tertentu telah dilupakan dan dengan alasan tertentu ditolak memori kolektif suatu komunitas. Kemudian *entah* setelah jangka waktu yang panjang atau pendek, diketemukan kembali oleh para ahli, melalui pengkajian atas catatan-catatan historis, ekskavasi arkeologis kota-kota yang hilang terkubur, penafsiran dan penguraian teks-teks dan bahasa yang terlupakan, dan rekonstruksi masa lampau yang terlupakan.

Sejarah yang ditemuiphtakan (*invented history*) adalah sejarah yang ditulis dengan satu tujuan, lebih tepat tujuan baru, yang berbeda dari tujuan-tujuan sebelumnya. Ini merupakan sejarah '*invented*' yang digali dan ditafsirkan dari sejarah yang diingat dan yang ditemukan kembali³⁸. Berdasarkan perspektif sejarah demikian belum dapat diketahui secara pasti kapan falsafah *HdB* digunakan secara luas oleh orang Simalungun.

³⁷Abd Rahmad hamid dan Muhammad Saleh Madjid, 2015, *Pengantar Ilmu sejarah*, penerbit Ombak: Yogyakarta, hlm.2.

³⁸Bernard Lewis, 2009, *Sejarah: Diingat, Ditemukan Kembali, Ditemuiphtakan*, Yogyakarta : Ombak, hlm.11-12.

Namun kita berpikir hal demikian sudah menjadi pedoman hidup dalam keluarga orang Simalungun sebagai tolak ukur dalam menjalankan interaksi sosial dalam sistem sosialnya. Sebab dalam berinteraksi sosial setiap masyarakat pasti mempunyai pedoman dan menjadi dasar perilaku sesama anggota masyarakatnya. Berbagai diskusi dengan informan bahwa falsafah *HdB* telah ada dan diwariskan secara turun temurun dikalangan orang Simalungun. Kalau demikian maka hal itu sudah ada semenjak orang Simalungun itu ada. Dikalangan orang Simalungun ada nasehat orangtua kepada anak-anaknya yang berbunyi: '*totik mansiatkon diri, marombou bani simbuei*' yang artinya cermat menyesuaikan diri, mengabdilah kepada umum (masyarakat)³⁹.

Dari kalangan orang Simalungun yaitu Purba Tambak (1982), berpendapat bahwa falsafah *HdB*, lahir dari pandangan hidup dan sikap hidup orang Simalungun, yang tutur bahasanya lemah lembut, sopan sikapnya, suka merendah hati, cermat dan hati-hati mengambil keputusan tetapi bukan lamban. Dalam peribahasa orang Simalungun ditemui ungkapan '*hata na dob tarluar mapayah ulakannsi*', artinya kata-kata yang sudah diucapkan sukar untuk diperbaiki⁴⁰. Sikap orang Simalungun demikian adalah bersumber dari *HdB*. Kalau demikian nilai-nilai apa sajakah yang terkandung dalam falsafah *HdB*?. Untuk memberikan jawaban tersebut dapat diamati dari *folklore* orang Simalungun.

Sebuah folklor Simalungun yang dikutip dari kitab pustaha *Parmongmong Bandar Sahuda*, sebagaimana ditranskripsi Alep Damanik, dan di alihbahasa U.H.Damanik⁴¹. Folklor *HdB*, diawali dengan kisah peperangan antara *Kerajaan Purba Deisa*

³⁹M.D.Purba, 1977, *Mengenal kepribadian Asli Rakyat Simalungun*, Medan : Penerbit M.D,Purba, hlm. 18.

⁴⁰T.B.A.Purba Tambak, 1982, *Sejarah Daerah Simalungun*, Pematang Siantar : Penerbit Percetakan HKBP, hlm. 16.

⁴¹Lihat hasil lokakarya "*habonaron do bona*" FKIP Universitas Simalungun Pematang Siantar 16 Maret 1984, hlm. 5.

Na Ualuh dengan Kerajaan Samidora. Laskar Raja Samidora mengobrak-abrik *Purba Deisa Nauuluh* (pihak *tondongya*). Penduduk bercerai berai karena keganasan Laskar Samidora. Diceritakan bahwa sekali peristiwa terjadilah pertarungan sengit antara anak *Raja Deisa Nauuluh* yakni Sangmajadi yang berprinsip dan berpandangan hidup '*HdB*, dan akhirnya mendapat perlindungan dari *Nanggordaha* atau Burung Garuda.

Burung Garuda menerkam raja Samidora dan membenamkannya ke rawa-rawa. Kejadian ini diawali dengan petir sambung-menyambung, gemuruh guntur di atas langit sembari datanglah suara yang penuh wibawa, dari puncak gunung: "*habonaron do bona, habonaron do bona, habonaron do bona*". Tinggallah rombongan pasukan raja Samidora menjadi teman-teman Setara Manggun (anak raja *Purba Deisa Nauuluh*) di *Pulau Harangan Lungun*. Sangmajadi dengan saudaranya Sang Mainim pulang ke *Purba Desa na Ualuh*.

Sepeninggal Sangmajadi dan Sangmainim, Setara Manggun dengan teman-temannya bekas pasukan Raja Samidora dengan dilandasi *HdB* dengan rajin dan bekerja keras membuka dan melebarkan perladangan, berkembang biaklah ternak mereka, berhasillah pertaniannya dan mereka hidup rukun, adil dan makmur serta bahagia. Berdatanglah orang dan bermukim bersama setara Manggun, bertambah ramai dan makmur lah *Pulau Harangan Lungun*. Berdasarkan isi folklore tersebut ada beberapa makna nilai yang terkandung di dalamnya yaitu :

- (1) *HdB* merupakan *supernatural power* (kuasa ilahi), sebagai tenaga 'gaib' untuk membela yang benar atau '*bonar*'.
- (2) *HdB* membela orang-orang yang tertindas oleh kekuatan ataupun kekerasan yang zalim.
- (3) *HdB* merupakan landasan dasar persatuan dan kesatuan.
- (4) Lambat atau cepat yang pasti menang melawan yang bathil.

- (5) Berlandaskan pandangan hidup *HdB* selalu dapat mempertahankan sikap/sifat kesatria, patriotism dan melestarikannya.
- (6) Berdasarkan *HdB* berarti jiwa terbuka dapat memaafkan, dapat bertenggang rasa dan mempunyai kebajikan dan kebijakan.
- (7) *HdB* mengamanatkan untuk suka bekerja keras demi keadilan dan kemakmuran masyarakat.
- (8) *HdB* mengajarkan atau mendidik untuk cinta Tanah Air.
- (9) *HdB* mengandung makna cinta persaudaraan dan kekeluargaan.
- (10) *HdB* mengandung makna musyawarah dan mufakat untuk memecahkan sesuatu masalah atau persoalan.
- (11) *HdB* nilai-nilai seperti tertulis di atas ditanamkan dan dilestarikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi di daerah Simalungun.

Secara tertulis yang ditemukan sampai saat ini tentang *HdB* adalah dalam Perda Tkt.II Simalungun Nomor 5/1960, tertanggal 14 Desember 1960, telah menjadi motto Kabupaten Simalungun. Selain itu bahwa *HdB* dijadikan sebagai motto Universitas Simalungun oleh Universitas Simalungun pada tanggal pendiriannya 9 April 1966⁴².

Bila ditinjau dari segi perspektif antropologi budaya, *HdB* dapat diamati dari cerita sastra lisan (*oral tradition*) dalam berbagai bentuk ungkapan. Dalam ungkapan orang Simalungun mengatakan: *habonaron do bona, hajukkaton do sapata* artinya: kebenaranlah pangkal, kejahatan terkutuk. Berkaitan dengan ungkapan ini banyak diperoleh keterangan informasi bahwa orang yang berbuat baik dan benar pasti mendapat pahala dan mengalami kemenangan serta memiliki keunggulan-keunggulan. Dalam penceritaan adanya turunan berbagai marga orang Simalungun karena berperilaku '*habonaron*' dapat

⁴²Hasil loka karya "habonaron do bona" FKIP Universitas Simalungun Pematang Siantar 16 Maret 1984, hlm. 7.

menundukkan musuhnya yang semula dianggap tidak dapat dikalahkan⁴³.

Dalam buku (*pustaha*) '*Parpandanan Na Bolag*' terkenal tokoh Guru Gumbak Nabolon, Guru Surung Dunia. Tokoh ini memiliki kekuatan, pengetahuan yang luar biasa karena berperilaku pada prinsip *HdB* seperti: pengasih, jujur, pembela golongan lemah dan sebagainya. Kemudian dalam cerita itu pula dikenal tokoh Tuan Sormaliat yang menguasai ilmu '*liat-liatan*' yaitu suatu ilmu yang dapat mengetahui rencana musuh atau hal-hal yang akan terjadi dimasa depan (semacam nubuatan) ilmu itu dapat dikuasai berkat perilakunya yang selalu berprinsip *HdB*. Karena itu nilai-nilai *HdB* selalu dilestarikan orang Simalungun secara turun temurun dengan suatu keyakinan bahwa lambat atau cepat kebenaran akan selalu menang melawan segala hal yang bathil.

Apabila orang Simalungun berperilaku bertentangan dengan nilai-nilai *HdB* maka berlakulah '*pittor bilang*' (jujur bilang) atau '*sapata*'. Ini dapat diartikan sebagai kutukan atau semacam hukum karma oleh '*supernatural power*' (Tuhan yang Maha Esa). Diyakini hal itu sudah merupakan keyakinan secara turun temurun, sehingga zaman dahulu kala jarang terjadi pencurian di perkampungan orang Simalungun. Hal demikian masih dijumpai di perkampungan orang Simalungun walaupun memang sudah relatif terbatas, namun nilai *HdB* masih diyakini orang Simalungun.

Nilai nilai *HdB* telah membudaya bagi orang Simalungun secara turun temurun dan telah merupakan dasar kegiatan dan motivasi untuk berbuat. Orang Simalungun memiliki beberapa sifat-sifat kepribadian yaitu: (1) berpandangan benar; (2) berniat benar; (3) berbicara benar; (4) berpenghidupan benar; (5) berusaha benar; (6) memperhatikan benar dan, (7) memusatkan pikiran dengan benar. Jelasnya membimbing pikiran dan

⁴³J. Berlizon Saragih dalam loka karya "*habonaron do bona*" FKIP Universitas Simalungun Pematang Siantar 16 Maret 1984, hlm. 7 dan 29.

perbuatan kepada kejujuran dan kebenaran⁴⁴. Nilai-nilai *HdB* dilestarikan juga oleh kerajaan yang pernah ada di Simalungun seperti kerajaan Nagur, Kerajaan Silou Tua, Kerajaan Maroppat (Dolok Silou, Siantar, Tanah Jawa, Panei), juga sampai kepada kerajaan marpitu (Dolok Silou, Siantar, Tanah Jawa, Panei, Raya, Purba, dan Silimahuta).

Apabila diamati pula sistem sosial orang Simalungun dalam hubungan kekerabatan dimana bersendikan *tolu sahundulan*, *lima saodoran* (*Sanina*, *tondong*, *anak boru jabu*, *tondong ni tondong*, *anak boru mintori*), bahwa kesatuan pendapat atau hasil musyawarah mereka selalu didasarkan atas falsafah *HdB* yang dapat diterima manusia dan dikehendaki Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Hal demikian oleh orang Simalungun dipraktekkan dalam pelaksanaan adatnya. Sehingga dalam setiap pelaksanaan atau operasional adat selalu dituntut akan: kerapian, kehormatan, kebenaran, keindahan, kekhidmatan, keagungan, penyempurnaan, keapikan, kecermatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan⁴⁵.

Orang Simalungun melaksanakan adat tidak pernah berat sebelah artinya tetap dalam perimbangan dan keseimbangan, dimana hal ini dapat diamati dalam pelaksanaan adat perkawinan, adat kelahiran, adat kematian, adat memasuki rumah, adat membuka perladangan, adat mengambil lesung dan sebagainya. Dengan melaksanakan adat yang bersendikan *HdB* maka mereka yakin akan berhasil pula usaha-usaha yang lain, misalnya panen akan berhasil, masyarakat aman dan damai. Jika ada orang yang melanggar adat dilabeli tidak beradat berarti dianggap 'hilang moral' malah akan menerima hukuman dari '*supernatural power*'.

⁴⁴M.D.Purba, 1977, *Mengenal Kepribadian Asli Rakyat Simalungun*, Penerbit: M.D.Purba : Medan. hlm.10.

⁴⁵J. Berlizon Saragih dalam loka karya "habonaron do bona" FKIP Universitas Simalungun Pematang Siantar 16 Maret 1984, hlm. 10 dan 30.

Orang Simalungun memiliki banyak ungkapan tentang usaha-usaha pelestarian sikap hidup yang berlandaskan *HdB*. Ungkapan itu merupakan kalimat singkat, padat dan bermakna yang dapat digunakan pada kehidupan sehari-hari baik dalam upacara adat, *harungguan* (musyawarah), dan sebagai sarana pendidikan. Ada kalanya juga penyampaian tujuan atau harapan dapat dilambangkan oleh pemberian sesuatu benda misalnya: pemberian *bulang*, pemberian *gotong*, pemberian *agadi*, pemberian *anduri*, dan sebagainya⁴⁶. Pelaksanaan adat atau kaitannya dengan pemberian barang harus ada keseimbangan (*tepo seliro*). Jadi tanggung rasa selalu dituntut dalam pelaksanaan adat berlandaskan *HdB*. Berikut ini, beberapa ungkapan yang ditemukan pada kehidupan orang Simalungun:

Ungkapan	Pengertian	Makna
<i>Parlobei nadilat bibir ase marsahap</i>	Lebih dahulu dijilat bibir baru berucap.	Cermat, teliti, hati-hati
<i>Ulang manundalhon arian</i>	Jangan membelakangi atau meninggalkan dasar (tambatan)	Berpegang teguh pada prinsip <i>HdB</i> dalam semua kehidupan
<i>Ulang songon tampue jantan, pande maruba-ruba lang pande marsidobi</i>	Jangan seperti burung Tempua Jantan, pandai memulai, tidak becus mengakhiri.	Bekerja keras, ulet, jangan setengah-setengah mengerjakan sesuatu.
<i>Itoktok galuh itanjuma, mangirora ussim i harangan.</i>	Dipotong pisang di ladang, pisang di hutan pun turut merasakan.	Teposeliro, tenggang rasa.
<i>Ulang songon</i>	Jangan seperti	Berterima

⁴⁶ Ibid.

<i>pangundalitni buah/sarindan, matei pangundalitan.</i>	pokok buah penumpang atau benalu, mati tempat penumpangnya.	kasih kepada yang pernah menolong
<i>Matei joring mangkopkop buahni</i>	Mati Jengkol demi buahnya.	Pengabdian atau pengayoman kepada bawahan
<i>Bijak mosor pinggol asal ulang mosor hata.</i>	Lebih baik kuping dipotong daripada ingkar janji.	Janji harus ditepati dengan sejujur- jujurnya
<i>Sada sitoktok hitei ganup marujahon- si/maniti honsi</i>	Satu pembuat titi semua orang menggunakannya	Berdedikasi, jiwa pengabdian dan kepeloporan
<i>Marlapis do bajut ni Simalungun</i>	Berlapis tempat sirih orang Simalungun	menyimpan rahasia sebagai pimpinan dan mempunyai kebijakan dan kebajikan

Berdasarkan pendapat Purba (1984) yang melakukan pendekatan dari sudut etimologi bahwa *HdB* berasal dari kata ‘bonar’ artinya bagaimana seharusnya, jadi bukan asal benar; ‘ha’ adalah awalan yang bermakna ‘menekankan’ ‘on’ dalam bahasa Indonesia. Konfiks ‘ha-on’ adalah seperti konfiks ‘ke-an’ artinya menyatakan kumpulan tentang nilai ‘bonar’, ‘bona’ artinya ‘harohan’-‘hasusuran’ dalam bahasa Indonesia ‘pangkal, asal, sumber atau dasar’. Jadi ‘habonaron do bona’ artinya adalah ‘kebenaranlah menjadi pangkal dan bukan pangkal itu menjadi

kebenaran'. Berdasarkan pendekatan etimologi demikian bahwa '*habonaron do bona*' merupakan sumber motivasi untuk melaksanakan setiap kegiatan. Suatu tindakan atau perbuatan harus lebih dahulu diteliti atau dikaji apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan secara manusiawi atau hukum dan apakah tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Pangkal itu sebagai kebenaran belum tentu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kehendak manusia dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa⁴⁷.

Berdasarkan pendekatan filosofis bahwa setiap bangsa mempunyai pandangan hidup dan ada kalanya bertautan satu sama lain. bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka etnis masing masing mempunyai kearifan lokal filosofi etnisnya, namun dalam hal yang lebih luas menjadi bangsa Indonesia maka Pancasila merupakan filosofi bangsa, sebab sudah berurat berakar pada kasnah budaya etnis yang ada di Indonesia dan digali dari bumi Indonesia.

Orang Simalungun merupakan bagian dari bangsa Indonesia memiliki tatanan kehidupan dalam sistem sosial yang dianut yaitu '*tolu sahundulan dan lima saodoran*'. Hal demikian tentu orang Simalungun bercita-cita untuk membawa misi budaya: kebahagiaan, kesentosaan, kesejahteraan, dan kedamaian. Cita-cita demikian tentu saja bersifat universal sebagai *searching for justice* atau *searching for peace*. Bagaimana caranya untuk memperoleh itu maka timbullah berbagai pandangan hidup bangsa dan negara atau suku bangsa. Melalui pandangan hidup *HdB* orang Simalungun dapat dan berharap memperoleh kebahagiaan, kesentosaan, kesejahteraan, dan kedamaian. Jadi bila mana setiap orang Simalungun dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai *HdB* tentu saja tidak ada lagi sumber keresahan, terjadilah kerjasama yang seadil-adilnya sehingga

⁴⁷D.Kenan Purba dalam loka karya "habonaron do bona" FKIP Universitas Simalungun Pematang Siantar 16 Maret 1984, hlm. 12.

masyarakat dapat menemukan kebahagiaan, kesentosaan, kesejahteraan, dan kedamaian. Ada pantun orang Simalungun mengatakan:

<i>Sihala i dipar ai</i>	Kencur di sana
<i>Sihala i dipar on</i>	Kencur di sini
<i>Sonaha i dipar ai</i>	Bagaimana di sana
<i>Sonai homa i dipar/i lopah on</i>	Begitupula-lah di sini.

Pantun ini mengandung makna tentang tepaseliro atau tenggangrasa. Penulis seperti Damanik (1984) memberikan pendapat mengenai *HdB* sebagai berikut :

1. *HdB* mengandung nilai etis (*etische warden-etische values*), dia member contoh adanya nilai baik lawan nilai buruk, nilai benar lawan nilai bohong.
2. *HdB* adalah nilai hakiki dipakai sebagai landasan, sebagai awal, titik tolak dalam perilaku manusia untuk mencapai tujuan; '*justice for all*' (keadilan untuk semua orang) dalam konteksnya dengan KUHP adalah sebagai jaminan dalam berlindung atas hak-hak azasi manusia.
3. '*HdB* dalam arti kejujuran atau objektivitas dalam konteksnya dengan *the freedom of the judge*. Kebebasan hakim untuk menemukan fakta-fakta yang benar dan nyata dalam sesuatu kasus perkara Pidana dan Perdata, dan berlandaskan itu merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, dan pada akhirnya menjatuhkan putusan sebagai karya keadilannya dalam perkara tersebut, yang justru berkepal "Demi keadilan berdasarkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
4. *HdB* dalam konteksnya dengan '*the rule of law*' kekuasaan hukum (perundang-undangan) diatas semua bentuk kekuasaan atau kekuatan. Dalam hal ini '*habonaron*' diartikan sebagai keseimbangan atau keserasian atau keselarasan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara dan warganya. Ciri-ciri kebenaran '*habonaron*'

sebagaimana dapat tercermin dalam suatu negara yang berdasarkan hukum, dan bukan berdasarkan kekuasaan semata-mata. Maka dengan demikian prinsip *HdB* adalah salah satu sokoguru dari negara hukum Indonesia yang bermoral Pancasila.⁴⁸

Pada akhirnya dalam diskusi ini dapat disimpulkan bahwa konsep *HdB* adalah berakar dari orang Simalungun, dan digali dari apa yang sudah terjadi semenjak ada orang Simalungun, dan itu sampai saat ini tetap dipelihara dan sebagai bukti telah dijadikan sebagai simbol Pemerintah Kabupaten Simalungun. Dan juga digunakan sebagai lambang Universitas Simalungun Pematang Siantar, yang merupakan lembaga pendidikan tinggi, yang dilaksanakan melalui pelaksanaan Lokakarya *HdB* pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tanggal 16 Maret 1984.

2. *Pewarisan nilai-nilai falsafah HdB*

Berkaitan dengan pewarisan *HdB* dapat dilakukan melalui proses sosialisasi, pembudayaan, dan pendidikan. Setiap kelompok etnik memiliki sistem kebudayaan tertentu yang berbeda dengan sistem kebudayaan yang dimiliki oleh etnik lainnya. Di dalam suatu masyarakat terdapat individu dan kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang melestarikan kebudayaan masyarakat tersebut.

Orang Simalungun memiliki sistem kebudayaan, sebagai suatu kompleks masyarakat yang menjaga dan memegang teguh nilai-nilai kebudayaannya. *HdB* merupakan falsafah hidup orang Simalungun yang menganut prinsip menjunjung tinggi kebenaran dipegang teguh di tengah-tengah kehidupan modern pada saat ini. Selanjutnya, orang Simalungun perlu

⁴⁸Djariaman Damanik, *Habonaron Do Bona Ditinjau dari Pendekatan Secara Falsafi/Filsafat*, makalah dalam loka karya "habonaron do bona" FKIP Universitas Simalungun Pematang Siantar 16 Maret 1984, hlm. 19-20.

melestarikan nilai-nilai *HdB* dengan mewariskannya kepada generasi muda disertai norma dan aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan seperti dalam adat atau sistem sosial yang masih tetap menjunjung tinggi *HdB*. Berdasarkan fungsinya, *HdB* bisa diartikan sebagai seperangkat norma yang dijadikan pedoman hidup orang Simalungun atau acuan dalam berperilaku yang diperoleh melalui sebuah proses belajar yang membutuhkan kurun waktu tertentu.

Berdasar konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa *HdB* membutuhkan adanya suatu proses belajar dalam kurun waktu tertentu agar dapat diterima generasi berikut. Dengan kata lain, dalam proses belajar unsur-unsur *HdB* tersebut terjadi pewarisan nilai-nilai budaya dan adat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, orang tua yang mengajarkan nilai filosofi *HdB* pada anaknya. Proses pewarisan nilai *HdB* tersebut berlangsung secara turun-temurun.

Proses sosialisasi

Falsafah *Habonaron do Bona* secara terus menerus perlu ada proses sosialisasi yang mantap. Proses sosialisasi adalah proses belajar kebudayaan dalam hubungan dengan sistem sosial⁴⁹. Proses sosialisasi dimulai dari orang pribadi dari masa anak-anak hingga masa tuanya belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan berbagai orang lain di sekelilingnya yang menduduki berbagai peranan sosial dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁰ Selanjutnya, orang itu mulai berhubungan dengan orang lain di sekitar lingkungan kehidupannya dan belajar bagaimana untuk bertindak atau berbudaya di dalam masyarakat sesuai falsafah *HdB*. Di dalam proses sosialisasi seseorang akan belajar untuk memahami, menghayati, menyesuaikan, dan

⁴⁹Kontjaraningrat, 1979, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, hlm.243.

⁵⁰Lihat Elly M.Setiadi dan Usman Kolip, 2013, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, hlm.155.

melaksanakan tindakan sosial yang sesuai dengan pola perilaku *HdB* yang diakui masyarakatnya. Proses sosialisasi tersebut lambat laun akan tertanam dalam diri individu yang berakibat pada pewarisan suatu kebudayaan tertentu yang berlangsung sepanjang hidup manusia.

a). Proses membudayakan (*enkulturasi*)

Proses enkulturasi dalam bahasa Indonesia adalah pembudayaan atau *institutionalization*. Proses enkulturasi adalah proses individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Secara tidak langsung seorang individu sudah mulai memperoleh pewarisan kebudayaan dalam kehidupannya karena menyesuaikan diri dan bersikap sesuai dengan tuntutan norma atau adat kebudayaan yang berlaku di masyarakatnya⁵¹.

Proses enkulturasi sudah dimulai oleh warga masyarakat, dimulai di dalam lingkungan keluarganya dan teman-temannya bermain, yang awalnya belajar meniru berbagai macam tindakan orang-orang di sekitarnya sehingga tindakannya menjadi suatu pola yang teratur dan norma yang mengatur tindakannya ditetapkan. Falsafah *HdB* dipelajari dengan mendengarkan pembicaraan orang lain mengenai hal tersebut dalam lingkungan pergaulannya pada saat yang berbeda-beda. Misalnya, dalam hal menyampaikan pendapat di dalam bermusyawarah atau rapat, hendaknya lugas, tegas dan santun. Dengan tindakan tersebut maka diantara peserta rapat tidak ada yang merasa tersakiti dan merasa sakit hati, dan sebagainya, namun tujuan bersama dapat tercapai.

b) Proses internalisasi (pendidikan)

Proses internalisasi atau pendidikan dimaksudkan adalah belajar sepanjang hidup, seseorang sejak lahir sampai hampir

⁵¹Koentjaraningrat, 1979, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru,.hlm.247.

meninggal ia belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi yang diperlukannya sepanjang hidupnya⁵². Sebaiknya juga bahwa falsafah *HdB* yang telah menjadi norma selain diajarkan dalam anggota keluarga, juga dalam lingkungan pergaulan di luar keluarga, dan diajarkan secara formal di sekolah. Di samping aturan-aturan masyarakat dan negara yang diajarkan di sekolah melalui mata pelajaran kewarganegaraan, aturan sopan santun dalam bergaul falsafah *HdB* juga dapat diajarkan secara informal di sekolah di wilayah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsantar.

Dalam proses pembudayaan tersebut setiap orang berusaha untuk mewariskan nilai-nilai kearifan lokal yang harus dipahami diri sendiri dan menularkan kepada orang lainnya, sehingga menjadi milik bersama. Proses pewarisan *HdB* sebagai kearifan lokal bersifat turun-temurun dari generasi tua ke generasi yang lebih muda.

C. Aktualisasi *HdB* menghadapi abad 21

HdB yang telah diuraikan pada bagian yang terdahulu adalah merupakan gambaran yang ideal bagi etnik Simalungun dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Orang yang mengetahui, memahami, dan melaksanakan adalah orang yang memiliki perasaan *Ahap Simalungun*. *Ahap* adalah suatu perasaan sepenanggungan dan seperjuangan⁵³. Namun demikian tentunya pada dewasa ini perlu direfleksi kembali apakah nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah tersebut masih dilaksanakan oleh masyarakat pendukungnya yaitu etnik Simalungun?.

HdB merupakan falsafah yang sangat ideal bagi etnik Simalungun. Barangkali saja pendukungnya saat ini sudah ada yang karena terlalu berhati-hati, takut salah takut bertindak

⁵²Kontjaraningrat, 1979, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, hlm.242.

⁵³Sortaman Saragih, 2008, *Orang Simalungun*, Depok : Penerbit Cv. Citama Vigora. hlm.6-7)

jika gagal menganggap kesalahan sendiri. Kondisi demikian membuat terkesan adanya anggapan cenderung lebih memikirkan diri sendiri.

Sekarang mari kita lihat nilai yang terkandung di dalam falsafah *HdB* yang berjumlah 12 nilai, sebagaimana uraian di diatas yaitu: (1) merupakan *supernatural power* (yang maha kuasa); (2) sebagai tenaga ‘gaib’ untuk membela yang benar atau ‘bonar’; (3) membela orang-orang yang tertindas oleh kekuatan atau kekerasan zalim; (4) merupakan landasan dasar persatuan dan kesatuan; (5) lambat atau cepat yang pasti menang melawan yang bathil; (6) selalu dapat mempertahankan sikap/sifat kesatria, patriotism dan melestarikannya; (7) jiwa terbuka dapat memaafkan, dapat bertenggang rasa dan mempunyai kebajikan dan kebijakan; (8) mengamanatkan untuk suka bekerja keras demi keadilan dan kemakmuran masyarakat; (9) mendidik untuk cinta Tanah Air; (10) mengandung makna cinta persaudaraan dan kekeluargaan; (11) musyawarah dan mufakat untuk memecahkan sesuatu masalah atau persoalan; (12) mewariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi di daerah Simalungun.

Kemudian, bagaimana hal diatas tetap aktual, dan member semangat serta kebanggaan sampai saat ini, dan tetap menjadi sumber inspirasi, sebagaimana pertemuan kita hari ini? Sejarah mencatat bahwa orang Simalungun telah memiliki *ahap* dan *sapangambe* *mankotok hitei* sejak awal, yang diterjemahkan ke dalam organisasi dan struktur sosial yang disebut *tolu sahundulan*, *lima saodoran*, dan keseluruhan relasinya itu membentuk proses adat⁵⁴ dan disitulah kelihatan falsafah ‘*HdB*’.

Salah satu hal dalam menentukan pemimpin di setiap wilayah dalam negara Indonesia, maka selalu memberi perhatian kepada kearifan lokal dalam membina masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan sebagaimana yang dicita-citakan negara RI yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Tokoh

⁵⁴Erond L. Damanik, 2015, *Amarah: Latar, gerak dan ambruknya swapraja Simalungun 3 Maret 1946*, Medan: Simetri Publisher, hlm.10

ideal seperti itu sangat diharapkan muncul, atau dimunculkan dari antara warga masyarakat yang memahami situasi dan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankamnas yang tidak terlepas dari *HdB*.

Sesungguhnya dalam hal pemimpin di wilayah kabupaten dan kota kita berpikir bahwa dimulai dari pemimpin keluarga, pemimpin Rukun Tetangga, pemimpin Rukun warga, pemimpin kelurahan, pemimpin kecamatan, pemimpin kota, atau pemimpin kabupaten, propinsi, dan nasional. Tujuan adanya pemimpin adalah diharapkan dapat membawa warga untuk menciptakan rasa aman, dan tercapainya masyarakat adil dan makmur, makmur dalam keadilan, dan adil dalam kemakmuran. Pada sisi lain warga yang dipimpin pasti tidak dapat dipenuhi semua keinginannya dalam waktu serentak, namun perlu memiliki pandangan adanya kesempatan menikmati pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya.

Saat ini abad ke-21 telah berlangsung 17 tahun, perjalanan masih panjang, generasi akan terus berganti, bilamana generasi sekarang gagal, maka dapat dilihat dari generasi sebelumnya yang tentunya dapat dikatakan gagal mewariskan falsafah hidup dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Hal ini betul-betul menjadi tantangan bagi generasi saat ini. Apa yang harus diperbuat, makalah ini berpandangan bahwa lakukan pewarisan yang baik dan benar tentang nilai-nilai falsafah *HdB*.

Dimulai dari pemimpin keluarga terendah sampai tertinggi, baik dari pemimpin formal, dan non formal, lembaga pemerintah, lembaga swasta, institusi pendidikan, terutama institusi pendidikan lokal 'Simalungun' sebagai basis utama, sehingga muncul kebanggaan akan budaya lokal. Hilangkan pikiran negatif, berpikir positif, kejar kemajuan, pupuk komunikasi yang baik, dimana itu merupakan bagian falsafah *HdB*. Kita bergegas, waktu tetap berjalan, rapatkan barisan, dan diatasnya minta kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa pencipta langit dan bumi, suasana *Bhineka Tunggal Ika* semakin membumi.

D. Penutup

Makalah ini adalah suatu perspektif yang dibangun dari hasil bacaan sebagaimana dalam sumber referensi, dan pengamatan penulis yang diharapkan sebagai sumbangan pemikiran untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia dari sudut pemeliharaan kearifan lokal falsafah *HdB*. Falsafah *HdB*, sesungguhnya merupakan warisan leluhur dari orang Simalungun yang jika dilaksanakan dan dihayati semua anggota masyarakat baik warga maupun pemimpinnya dari yang terendah sampai tertinggi, yang berada di tanah Simalungun sebagai pedoman berinteraksi, maka akan mampu menangkalkan intoleransi, disintegrasi bangsa yang menggejala dewasa ini. Karena itu dalam menapak abad ke-21 semakin diperlukan pewarisan yang sistematis dan terencana. *Mari kita amalkan dan kerjakan!*

Daftar Pustaka

- Bangun, Payung. 1981. *Kebudayaan Batak, dalam Koentjaraningrat (ed), Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- BPS Kabupaten Simalungun Lakip tahun 2016.
- Castels, Lance. 2001. *Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatera: Tapanuli 1915-1940*, Jakarta: Gramedia.
- Damanik, Djariaman. 1984. *Habonaron do Bona ditinjau dari Pendekatan Falsafi/Filsafat*. Makalah dalam lokakarya *Habonaron do Bona*, FKIP Universitas Simalungun Pematang Siantar 16 Maret 1984.
- Damanik, Djahutar. 1974. *Jalannya Hukum Adat Simalungun*, Pematang Siantar: Aslan.
- Damanik, Erond L. 2015. *Amarah: Latar, gerak dan ambruknya swapraja Simalungun 3 Maret 1946*. Medan: Simetri Publisher.
- Dasuha, Juandaha Raya P., dkk (ed.). 2011. *Peradaban Simalungun: Inti Sari Seminar Kebudayaan Simalungun se-Indonesia Pertama Tahun 1964*, Pematangsiantar: KBPS.
- Dasuha, Juandaha Raya P., dan Sinaga. Martin Lukito. 2003. *Tole den Timorlanden das Evangelium: Sejarah Seratus Tahun*

- Pekabaran Injil di Simalungun 2 September 1903-2003*, Pematangsiantar: Kolportase GKPS.
- Hamid, Abd Rahmad., dan Madjid, Muhammad Saleh. 2015. *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Ombak
- Lewis, Bernard. 2009. *Sejarah: Diingat, Ditemukan kembali, Ditemuciptakan*, Yogyakarta: Ombak.
- Purba. D.K. 1984. *Habonaron Do Bona*, makalah, FKIP Universitas Simalungun Pematang Siantar 16 Maret 1984.
- _____. 1987, *Sejarah Asal Usul Terjadinya dan Makna Nama Simalungun*, Pematangsiantar: Partuha Maujana Simalungun.
- _____. 1995. *Sejarah Simalungun*. Jakarta: Bina Budaya Simalungun.
- Purba. M.D. 1977. *Mengenal Kepribadian Asli Rakyat Simalungun*, Medan: M.D.Purba.
- Saragih, J. Berlizon. 1984. *lokakarya Habonaron do Bona*, FKIP Universitas Simalungun Pematangsiantar 16 Maret 1984. (makalah, tanpa penerbit).
- Saragih, Sortaman. 2008. *Orang Simalungun*. Depok: Citama Vigora.
- Setiadi, Elly M. dan Kolip, Usman. 2013. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Sihotang, Dion. P. 2013. *Mengenal Kabupaten Simalungun*, Medan: Mitra.
- Tarigan, Henry Guntur. 1971. *Struktur Social dan Organisasi Sosial Masyarakat Simalungun*, Bandung: IKIP Bandung.
- Tideman. J. 1922. *Simeloengoen: Het Lan der Timoer-Bataks in Zijn Vroegere Isolatie en Zijn Ontwikkeling tot een deel van het Cultuurgebied van de Oostkust van Sumatera*, Leiden: Stoomdrukkerij Louis H. Bacherer.
- Tambak. TBA. Purba. 1982. *Sejarah Daerah Simalungun*. Pematang Siantar: Percetakan HKBP.

BAB VII
HABONARON DO BONA:
Tinjauan Agama Islam

H. Nikmat Saragih

Bahwa di dalam Alqur'an, yang nama suratnya *Al Hujarat* (Kamar-kamar) Ayat 13 juz 26 tertulis sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

Bertaqwa yang dimaksud dalam ayat Alqur'an ini juga dapat diartikan orang yang patuh akan perintah yang Mahakuasa yaitu Tuhan Yang Maha Esa yang diartikan dalam kehidupan sehari-hari tetap dalam kebenaran, seperti:

- Tidak berbohong (berdusta).
- Tidak ingkar janji
- Tidak menipu.

Bahkan di dalam Alqur'an terdapat pada Surah Ali Imran ayat 60, tertulis sebagai berikut:

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya:

Apa yang telah kamu ceritakan itu, itulah yang benar yang datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.

Selanjutnya pada Surah Ali Imran ayat 110 disebut sebagai berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ
لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya:

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Ayat ini juga dapat diartikan, bahwa kita tidak boleh ragu tentang menegaskan kebenaran karena sudah pasti kebenaran itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan diperintahkan kepada seluruh umat-Nya adalah yang benar dan tidak boleh diragukan lagi.

Kesimpulan:

Bahwa falsafah *Habonaron do Bona* yang ada pada orang Simalungun itu ditinjau dari Agama Islam seperti yang tercantum pada ayat-ayat yang tertulis diatas, tidak ada keraguan didalamnya. Oleh karena itu, penting bagi kita melalui FGD ini untuk melanjutkan falsafah ini dalam kehidupan sehari-hari terutama mengimplementasikannya yang dimulai dari keluarga, termasuk lingkungan khusus di Simalungun, dan secara umum semua masyarakat di Indonesia.

BAB VIII
HABONARON DO BONA:
Makna filosofis bagi masyarakat Simalungun

J.S.M.Damanik

Perkembangan setiap negara di dunia selalu identik dengan peradaban bangsa itu sendiri dalam mempertahankan kelangsungan dan eksistensi kehidupan, dari awal sejarah hingga saat ini bagaimana bangsa-bangsa berusaha mempertahankan dan mengembangkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan, secara global dipastikan bahwa setiap bangsa berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi, pangan dan energi dengan segala cara. Itulah peradaban bangsa. Kita melihat Amerika sebagai negara maju semakin hari semakin diliputi kecenderungan perubahan budaya dibanding dengan negara China (Tiongkok), yang kita lihat sekarang ini sudah lebih maju peradaban sukubangsanya. Budaya Tiongkok dengan filosofi menghormati leluhur sampai akhir hayatnya, melambangkan identitas dan kepribadian bangsa menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada suatu bangsa eksis dalam mengatur negara dalam mencapai tujuan.

Di Indonesia yang baru 72 tahun merdeka, dipenuhi gejolak dalam proses menggali jati diri sering terjadi konflik karena belum mampu memahami bagaimana budaya menjadi filosofi hidup bangsa, belum semua warga negara menerima dan memahami serta melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Akibatnya adalah terjadinya persoalan yang menghambat laju perkembangan bangsa. Karena itu, Bangsa Indonesia selalu mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup bangsa dalam upaya mencapai tujuan nasional.

Simalungun sebagai salah satu sukubangsa di Indonesia, sejak awal dan sejarah perkembangannya telah mampu menunjukkan bagaimana peradabannya. Kerajaan Simalungun

mulai *Kerajaan Nagur*, *Kerajaan Maropat* dan *Kerajaan Marpitu*, bahkan setelah kemerdekaan telah mampu hidup bersama dengan sukubangsa lain. Pada tahun 1959 dan 1961 di Kota Medan, Orang Simalungun telah mampu menjadi Walikota demikian pula di instansi lainnya, banyak Orang Simalungun menduduki posisi penting.

Pada akhir-akhir ini, keadaan suku Simalungun semakin lama semakin tidak kelihatan dan telah ketinggalan jauh dengan sukubangsa lain dalam kegiatan budaya maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak kejadian memalukan warga Simalungun, dimana Orang Simalungun terjebak pelanggaran hukum, orang Simalungun terpecah-pecah tidak saling bahu membahu (bekerjasama), orang Simalungun saling menjelekan dan menjatuhkan, terjadi perubahan yang drastis makanya Bahasa Simalungun juga semakin tidak terdengar atau semakin menghilang.

Sejalan dengan persaingan yang makin ketat, para tokoh Simalungun berfikir untuk mencoba membangun dan mereaktualisasikan bagaimana sebenarnya orang Simalungun itu yang memiliki filosofi hidup yakni *Habonaron do Bona*. Hanya sukubangsa Simalungun itu yang memiliki filosofi berbasis kebenaran. Menurut para sesepuh orang Simalungun, bahwa *Habonaron do Bona* ini adalah filosofi yang diterapkan dalam kepemimpinan nasional.

Karena itu, PMS Kota Medan, bersama tokoh Simalungun, berupaya membangun kembali semangat *Habonaron do Bona* agar dapat dijadikan sebagai pedoman hidup warga Simalungun. Pada tanggal 12 Agustus 2017 diadakan FGD yang melibatkan kalangan akademisi untuk mengolah, menggali, dan merumuskan kembali bagaimana mengaktualisasikan *Habonaron do Bona* di abad 21 ini.

Dari hasil pemaparan narasumber, melalui sudut pandang keilmuan tertentu diperoleh makna yang lebih luas dari *Habonaron do Bona* dimana *Habonaron do Bona* telah ditetapkan menjadi filosofi hidup sukubangsa Simalungun sejak

tahun 1960. Kemudian pada tahun 1984 direvisi kembali dan pada tahun 2017 ditinjau sekaligus diaktualisasikan yang bertujuan untuk memutakhirkan semangat *Habonaron do Bona* pada abad 21 yang dinamis ini.

Habonaron do Bona adalah filosofi hidup orang Simalungun yaitu berlandaskan atas kebenaran, yang nilai-nilai kebenaran itu menjadi pedoman sekaligus penuntun hidup berupa:

1. Setiap perilaku masyarakat Simalungun, harus takut akan Tuhan Allah, aktualisasinya adalah menjalankan kewajiban agamanya dengan baik dan benar.
2. Menunjukkan semangat, jiwa dan perilaku jujur, bertanggungjawab, pantang menyerah, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, pekerja keras, ulet dan tahan uji, gemar melakukan kegiatan sosial, selalu berusaha mengatasi kesulitan, sesama serta menghindari perbuatan yang melanggar hukum.
3. Hormat kepada siapapun dan sesama dengan musyawarah Tolu Sahundulan, tidak ada istilah irihati, dengki dan dendam sesama orang Simalungun.
4. Bahasa Simalungun menunjukkan kerendahan hati, saling mengasihi, asih dan asah dengan tegas.

Maka dari FGD ini, PMS Kota Medan merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun, antara lain:

1. Pembinaan budaya Simalungun menjadi tanggungjawab Pemkab Simalungun, yang dibentuk melalui Perda dan didukung APBD.
2. Pembinaan budaya Simalungun dimasukkan dalam pendidikan menengah dan mahasiswa (sebagai kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler).
3. Lembaga masyarakat Simalungun melalui tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya bersama PMS mensosialisasikan budaya Simalungun, dilingkungan keluarga, masyarakat dan pemerintah.

4. Memberdayakan Ormas PMS diseluruh wilayah Indonesia, mulai tingkat provinsi hingga tingkat desa. Aktualisasinya, warga Simalungun, gemar menggunakan bahasa sebagai kebanggaan, perekat dan pengikat persaudaraan, melakukan pemberdayaan dan konsultasi tradisi (kebudayaan) bagi masyarakat Simalungun.
5. Pemkab Simalungun selalu berupaya membuat kegiatan dan mengikutsertakan untuk mengangkat budaya Simalungun ditingkat provinsi dan nasional.

Demikian pula kepada warga Simalungun diharapkan agar memedomani semangat *Habonaron do Bona* pada abad 21, dengan wujud:

1. Banggalah menjadi warga Simalungun.
2. Berbuatlah untuk mengangkat harkat dan martabat Simalungun.
3. Simalungun adalah leluhur kita untuk selalu dihormati, dijaga dan dilestarikan.
4. Hilangnya budaya berarti hilang peradaban berarti kebinasaan karena hukum alam yang menggenapi.
5. Junjunglah *Habonaron do Bona*.

Horas dan Diatei tupa

BAB IX

HABONARON DO BONA (HdB): Sebuah refleksi pada abad 21

Erond L. Damanik

A. Pendahuluan

Habonaron do Bona (selanjutnya disebut *HdB*) atau '*Kebenaran adalah Pangkal*' adalah '*filosofiche grondslag*' atau dasar filosofis yang paling mendasar bagi sikap mental orang Simalungun. Pada *HdB* itu termuat idiologi yakni pokok-pokok pikiran yang bersifat praktikal untuk dilakukan pada setiap aktifitas bermasyarakat, bernegara, berfikir, berperilaku serta bertindak. Sebagai sikap mental, maka *HdB* mencerminkan keluhuran (*adiluhung*) sekaligus menjadi cita-cita (*adicita*) setiap orang Simalungun. Sikap mental ini terbentuk dari komponen sosio-kultural Simalungun sejak abad ke-15 sebagaimana tertulis pada manuskrip kuno *Parmongmong Bandar Sahuda*. Sikap mental, *HdB* berada didalam kepala setiap orang Simalungun yang difungsikan guna menilai dan memahami situasi sosial (*social situation*).

Keutamaan *Habonaron* (kebenaran) pada orang Simalungun bukan tanpa sebab. Hal ini bukan saja karena *Habonaron* telah disebut pada manuskrip kuna Simalungun sebagai cara memahami situasi sosial, juga karena agama (religi) asli orang Simalungun disebut dengan *Habonaron*. Inti pokok ajaran religi *Habonaron* adalah pengarusutamaan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sosialnya, kebajikan sosial antar sesama maupun lingkungan dari penganutnya (*parhabonaron*).

Sebagai sikap mental, *HdB* diturunkan dari dalam kepala setelah menilai dan memahami situasi sosial yang kemudian dielaborasi menurut emosi dan logikanya dan kemudian direalisasikan lewat perilaku dan tindakan kolektifnya. Karena itu, sikap mental yang dikandung *HdB* yakni nilai-nilai

kebenaran (*habonaron*) menjadi tolak ukur (parameter) setiap orang Simalungun guna menilai dan memahami situasi sosialnya. Pada akhirnya, *HdB* merupakan hasil pemikiran mendalam orang Simalungun yang dipercaya dan diyakini sebagai realitas sosial (kenyataan, nilai-nilai dan norma-norma) yang luhur, benar, adil dan bijaksana.

Nilai-nilai *HdB* itu melingkupi setiap kenyataan sosial (*social reality*) seperti politik, hukum, sosial, budaya, seni, agama, pembangunan, adat istiadat, interaksi dan komunikasi sosial, kontestasi, kompetisi, dan lain-lain yang membutuhkan kebenaran sebagai sokogurunya. Setiap kenyataan dari aspek diatas melahirkan situasi-situasi tertentu yakni situasi sosial yang membutuhkan penilaian, pemahaman dan interpretasi sosial. Karena itu, *HdB* adalah falsafah sosial orang Simalungun yakni acuan nilai-nilai kebenaran yang didasarkan secara epitemologis, ontologis dan aksiologis. Ketiga hal ini menjadi inti daripada filsafat yang dalam hal ini menjadi filsafat menurut orang Simalungun. Dengan demikian, falsafah sosial adalah produk filsafat sesuai sosiokultural, sosiohistoris, sosioreligio, sosiopolitik dan lain-lain.

Sebagaimana disebut Suriasumantri (2001) filsafat (nomina) atau falsafah (adjektiva) berasal dari konsep *philosophy* yakni sebuah kata dari bahasa Yunani yakni *philosophia*. Konsep ini terdiri dari dua kata yakni *philos* atau *philia* yang berarti: ‘cinta’, ‘persahabatan’ atau ‘ketertarikan pada’, sedangkan *shopia* berarti ‘kebijaksanaan’, ‘hikmah’, ‘pengetahuan’, maupun ‘pengalaman praktis’. Dalam bahasa Inggris, filsafat disebut dengan *philosophy*. Karena itu, filsafat diartikan sebagai kecintaan terhadap kebijaksanaan atau kebenaran. Selanjutnya, pada *Kamus Umum Bahasa Indonesia* karangan Poerwadarminta (2003)⁵⁵, konsep filsafat diartikan sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi tentang hakikat segala yang ada, sebab asal muasal dan hukumnya.

⁵⁵Lihat W.J.S. Poerwadarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Dengan demikian, manusia filosofis adalah manusia yang memiliki kesadaran diri dan akal sebagaimana manusia itu memiliki jiwa independen dan bersifat spiritual. Karena itu, secara etimologis, filsafat berarti ‘*cinta kebijaksanaan*’ atau ‘*kebenaran*’.

Jika filsafat diartikan sebagai upaya manusia memahami segala sesuatu secara kritis, sistematis dan radikal, maka falsafah adalah hasil (*output*) dari proses itu. Proses dimaksud adalah berfikir kritis, aktif, dan sistematis dengan mengindahkan prinsip logika (*rasio*) guna mengevaluasi, mengerti, dan memahami serta kemudian mempertimbangkan ‘sesuatu’ untuk diterima atau ditolak (Takwin, 2001)⁵⁶. Karena itu, falsafah dimaksudkan mengemukakan kebenaran dan memberikan argumentasi dan alasan terhadap kebenaran dimaksud secara logis.

Dalam hal ini, falsafah cenderung dikategorikan sebagai filsafat praksis mencakup: i) norma (akhlak), ii) etika, iii) sosial dan politik, serta iv) urusan rumah tangga. Falsafah praksis ini berbeda dengan filsafat teoritis guna mencari kebenaran sains, eksakta, ketuhanan maupun metafisika. Karena itu, falsafah memuat hal-hal pokok seperti: i) pelukisan hakekat realitas secara nyata, ii) menentukan batas dan jangkauan pengetahuan, sumberdaya, hakikat, keabsahan dan nilai, iii) kritis terhadap pengandaian dan pernyataan yang diajukan, iv) upaya spekulatif dan lengkap penyajian pandangan sistematis tentang realitas, dan v) membantu mengemukakan apa yang dilihat dan dinyatakan.

Sebagaimana disebut Plato (427-348 SM) dalam Hatta (1986)⁵⁷ maupun Bertens (1999)⁵⁸ bahwa filsafat ialah

⁵⁶Lihat Bagus Takwin. 2001. *Filsafat Timur: Sebuah Pengantar ke Pemikiran-pemikiran Timur*. Yogyakarta: Jalasutra.

⁵⁷Lihat Mohammad Hatta. 1986. *Alam Pikiran Yunani*. Jakarta: UI-Press.

⁵⁸Lihat Kimpul Bertens. 1999. *Sejarah Filsafat Yunani* (edisi revisi). Yogyakarta: Kanisius.

pengetahuan guna mencapai kebenaran. Sedangkan menurut Aristoteles (382-322 SM) filsafat adalah pengetahuan tentang kebenaran sedangkan Cicero (106-043 SM) menyatakan filsafat sebagai ibu dari semua pengetahuan. Selanjutnya, menurut Descartes (1596-1650), filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Dengan demikian, filsafat adalah pengetahuan terluhur (adiluhung) dan keinginan untuk mendapatkannya. Selanjutnya, menurut Kant (1724-1804) dalam Mustansyir dan Munir (2000)⁵⁹, Higgin (2000)⁶⁰, Suseno (2005)⁶¹ maupun Hamersima (1983)⁶² kebenaran yang menjadi pokok dan pangkal segala pengetahuan mencakup empat persoalan yakni: i) apa yang harus diketahui?, ii) apa yang harus dikerjakan?, iii) apa yang harus dicapai?, dan iv) apa yang dimaksud dengan manusia itu sendiri?. Dengan demikian, filsafat mempelajari seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis, logis dan metodis.

Guna mencari keterangan dan kebenaran tentang alam semesta misalnya, maka manusia harus melepaskan diri dari hal-hal mistis yang diwariskan secara turun temurun. Demikian pula memahami beragam kejadian misalnya, maka manusia itu harus mencari suatu keterangan dan kebenaran dibalik peristiwa atau kejadian itu. Demikian halnya mengenai interaksi dan komunikasi sosial antar sesama manusia, maka setiap manusia harus menemukan kebenaran tentang interaksi

⁵⁹Lihat Rizal Mustansyir dan Misnal Munir. 2012. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁶⁰Lihat Graham Higgin.2000. *Porcupines: A Philosophical Antologi*. England: Penguin Books.

⁶¹Lihat Franz Magnis Suseno. 2005. *Pijar-pijar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.

⁶²Lihat Harry Hamersma. 1983. *Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern*. Jakarta: Gramedia.

dan komunikasi yang dibangunnya (Hardiman, 1990)⁶³. Keadaan seperti ini menjadi penting dan signifikan bukan saja sekedar melontarkan pertanyaan tentang tuhan, alam dan manusia, eksistensi manusia termasuk interaksi sosialnya, tetapi juga sekaligus memberikan evaluasi dan kritik dalam memahaminya. Dari sana kemudian terbentuk *image* (citra diri) manusia yang kritis, mengutamakan kebenaran sebagai pangkal segala sesuatu sekaligus pribadi-pribadi yang berfikir logis.

Habonaron do Bona (HdB) atau '*Keberanan adalah Pangkal*', merupakan falsafah sosial orang Simalungun. Sebagai falsafah sosial (*social philosophy*), *HdB* mengandung kebenaran (*truth*) sebagai pangkal (*basic*) pada berbagai aspek kehidupan sosial. Kebenaran itu sebagaimana disebut Suriasumantri (2001)⁶⁴ mencakup pengetahuan (epistemologi), etika (moral), estetika (seni), politik (pemerintahan), agama, hukum (norma) pendidikan, dan sejarah. Karena itu, falsafah *HdB* adalah sumber dari segala sumber pengetahuan tentang Tuhan, alam dan manusia menurut orang Simalungun. Kebenaran ini adalah produk eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi terhadap situasi sosial (*social situation*) yang menyertai perjalanan sejarah dan kebudayaan Simalungun itu.

Sebagai falsafah sosial, maka *HdB* memiliki karakteristik yaitu: i) menyeluruh (komprehensif), ii) mendasar, dan iii) spekulatif. Karakteristik pertama yakni komprehensif diartikan bahwa nilai-nilai *HdB* melingkupi cara berfikir, berperilaku dan bertindak orang Simalungun, sedangkan mendasar diartikan bahwa kebenaran adalah pondasi (*basic*) setiap pemikiran, perilaku dan tindakan yang bersifat universal dan spekulatif diartikan sebagai kemampuan mendudukkan kebenaran pada tempatnya. Dengan begitu, ketiga karakteristik ini dipahami sebagai cara mengenali, cara memercayai maupun cara berfikir

⁶³Lihat F. Budi Hardiman. 1990. *Kritik Idiologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*. Yogyakarta: Kanisius.

⁶⁴Lihat Jujun S. Suriasumantri. 2001. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

yang tidak mudah percaya (skeptis) tetapi justru harus bertolak dari kebenaran sesuai dengan cara pandang orang Simalungun itu. Jadi, *HdB* bagi orang Simalungun mencerminkan perilaku sosial (*social behavior*) yakni kesesuaian antara pemikiran, emosi dan tindakan sosial (*social action*) dengan mengarusutamakan kebenaran sebagai hakikat hidupnya.

Formasi *HdB* sebagai falsafah sosial orang Simalungun bukanlah sesuatu yang dibentuk begitu saja, tetapi berasal dari leluhur Simalungun sebagaimana tertulis pada manuskrip *Parmongmong Bandar Sahuda*. Dengan demikian, *HdB* adalah rumusan bijaksana leluhur Simalungun yakni mereka yang *sophist* atau cendekiawan (*maujana*) sesuai ukuran jamannya. Mereka ini adalah cerdik pandai yang menggunakan kecendekiawannya guna merumuskan dan menimbang realitas sosial dan bukan justru menggunakan kecendekiawan itu guna menyesatkan orang lain (Muthahhari, 2002)⁶⁵.

Dengan demikian, para *maujana* (cendekiawan) adalah pribadi-pribadi yang lebih cinta kepada kebenaran atau kebijaksanaan sebagaimana pendahulu Simalungun yang menjadikan *HdB* sebagai acuan hidupnya. Hal ini karena, para *maujana* itu adalah filsuf sosial orang Simalungun yang sepatutnya ditiru masyarakat Simalungun. Karena itu pula, orang Simalungun telah merumuskan dan menetapkan *HdB* sebagai falsafah sosialnya. Bukankah generasi milenial sekarang ini berintikan kompetisi! *Lantas* bagaimana pribadi-pribadi orang Simalungun menghadapi pragmatisme sosial, penumpukan modal (kapital), liberalisme ekonomi, demokrasi universal maupun pertarungan idiologi, sejarah dan peradaban sebagaimana disajikan Bell (1962)⁶⁶, Fukuyama (1992)⁶⁷ maupun

⁶⁵Lihat M. Muthahhari. 2002. *Filsafat Hikmah Pengantar Pemikiran Shadra*. Bandung: Mizan.

⁶⁶Lihat Daniel Bell. 1962. *The End of Ideology*. London: The Free Press.

⁶⁷Lihat Francis Fukuyama. 1992. *The End of History and the Last Man*. London: Free Press.

Hungthinton (1996)⁶⁸. Pertanyaanya ialah, apakah falsafah dan idiologi *HdB* masih relevan di abad 21?.

B. Formasi falsafah *HdB*

Secara etimologis, *HdB* berarti '*Kebenaran adalah pangkal*'. Ini berarti bahwa, orang Simalungun menerapkan '*kebenaran*' sebagai acuan perilaku sosial yakni kesesuaian antara pemikiran, emosi dan tindakan sosialnya. Karena itu, *HdB* adalah sumber norma sosial, etika sosial, dan pengetahuan. Dengan demikian, *HdB* menginspirasi setiap orang Simalungun berperilaku dan bertindak dengan '*bonar*' (benar). *HdB* mengandung makna (*meaning*) yaitu pengalaman dan ketertarikan pada kebijaksanaan atau kebenaran. Karena itu, *HdB* mengandung muatan (*content*) sebagai referensi personal (*personal references*) yakni acuan berfikir, berperilaku dan bertindak secara benar atau bijaksana.

Pada orang Simalungun, *HdB* telah disepakati sebagai falsafah sosial pada tahun 1960. Pada saat itu, melalui sebuah kajian dan lokakarya tentang *HdB* dan kemudian hasilnya disyahkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Simalungun No. 5 tahun 1960 tertanggal 14 Desember 1960⁶⁹. Pelembagaan *HdB* sebagai falsafah sosial orang Simalungun mengandung makna sebagai sumber norma, etika, epistemologi, ontologi maupun aksiologi yakni karakter (kepribadian) yang mengutamakan kebenaran (*habonaron*) sebagai pangkal (*bona*), tetapi juga berimplikasi pada penulisan konsep itu pada logo atau simbol yang melambangkan *ha-Simalungun-on* (ke-Simalungun-an). Dengan demikian, falsafah sosial itu tercantum pada logo Kabupaten Simalungun, dan seharusnya terdapat pula pada logo *Partuha Maujana Simalungun* (Lembaga Cerdik Pandai Simalungun), logo

⁶⁸Lihat Samuel P. Huntington. 1996. *The Clash of Civilization and Remarking of World Order*. New York: Simon & Schuster.

⁶⁹Pada saat itu, Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Simalungun adalah Radjamin Purba (purnawirawan berpangkal Letnan Kolonel).

Universitas Simalungun dan lain-lain yang mengatasnamakan etnik Simalungun.

Sebagaimana tertulis dalam hasil pengkajian falsafah *HdB* tahun 1960, diketahui bahwa falsafah sosial itu telah tercantum (tertulis) pada manuskrip tua (*pustaka*) di Simalungun. Manuskrip dimaksud adalah *Parmongmong Bandar Sahuda* (juru cerita dari Bandar Sahuda) yang berasal dari Pamatang Bandar Sahuda di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun⁷⁰. Dikisahkan bahwa, konsep *HdB* ialah pernyataan yang diucapkan burung *Naggordaha* (Garuda), pada saat Raja Sangma Jadi Damanik dari *Kerajaan Purba Deisa Na Ualuh* (Kerajaan Tua Delapan Desa)⁷¹ berperang melawan Raja Samidora (Kerajaan Samudra Pasai, Aceh). Burung *Naggordaha* menyertai Raja Sangma Jadi Damanik dalam peperangan yang menewaskan Kerajaan Samudra Pasai⁷². Dengan demikian, *HdB* sebagai falsafah orang Simalungun dewasa ini bukanlah

⁷⁰Manuskrip itu dimiliki salah satu ahli waris *Partuanon* Bandar yakni Haji Alib Damanik. Manuskrip tersebut bertarik (tahun) 1400 atau abad 15 Masehi. Pada awalnya, manuskrip ini tertulis pada *laklak* (kulit kayu alim yang diawetkan sebagai wadah menulis) yang biasanya dilakukan oleh *Gurubolon* (*parmongmong*). Lihat Djariamman Damanik, Jan Berlizon Saragih, dkk. 1984. *Hasil Lokakarya Habonaron do Bona*. Pematangsiantar: Universitas Simalungun.

⁷¹Yang dimaksud dengan *Kerajaan Purba Desa Na Ualuh* ialah leluhur Simalungun yang menempati delapan penjuru mata angin di Simalungun. Uraian seperti ini terdapat pula dalam *Pustaka Parpandanan Na Bolag* yang mengisahkan sejarah dan asal usul Orang Simalungun. Lihat Erond L. Damanik. 2017. *Nilai budaya: Hakikat karya dan orientasi hidup Orang Simalungun*. Medan: Simetri Institut.

⁷²Apabila dikaji lebih mendalam, maka periode peperangan *Kerajaan Purba Deisa Na Ualuh* dengan Raja Samidora dari Aceh ini ialah awal kehancuran *Kerajaan Nagur* dan bangkitnya *Kerajaan Maropat* (Kerajaan yang Empat) di Simalungun. Lihat Erond L. Damanik dan Juandaha Raya Purba Dasuha. 2016. *Kerajaan Siantar: Dari pulau Holang ke Kota Pamatangsiantar*. Medan: Simetri Institut.

ahistoris tetapi telah memiliki sejarah panjang yakni sejak abad ke-15 masehi.

Falsafah *HdB* menjiwai orang Simalungun yang terwakili melalui burung *Nanggordaha* (Garuda). Sebagaimana dalam masyarakat tradisional, burung Garuda dipercaya memiliki kekuatan luar biasa dan sangat dekat dengan kehidupan manusia. Burung Garuda atau *Nanggordaha* melambangkan kebajikan, pengetahuan, dan kekuatan. *Nanggordaha* didaulat sebagai raja segala makhluk yang terbang. Dalam beberapa kelompok masyarakat di dunia, burung Garuda diyakini mampu membawa seorang raja dalam peperangan sebagaimana tersebut dalam legenda Tiongkok maupun beberapa negara di Eropa. Karena keyakinan itu, tidak mengherankan apabila Burung Garuda diadopsi sebagai lambang negara.

Indonesia misalnya, mengangkat dan menetapkan Burung Garuda⁷³ sebagai lambang negara dimana *Pancasila* (*Lima Asas*) sebagai dasar falsafah bernegara. Elaborasi ini berasal dari interpretasi Soekarno terhadap Kerajaan Majapahit yang mempersatukan Nusantara pada abad-14. Demikian pula bahwa Garuda adalah kendaraan Dewa Wishnu yakni dewa pemelihara dan pengawal semesta. Karena itu, Garuda adalah raja segala burung yang memiliki kekuatan, pengetahuan dan kebajikan. Oleh karena itu, kontruksi Garuda sebagai simbol negara dan Pancasila sebagai dasar falsafah bernegara Indonesia merupakan kontruksi bung Karno terhadap realitas etnik, kultul, bahasa, agama, klan, maupun teritorial Indonesia.

Sama dengan orang Simalungun yang mengelaborasi burung *Nanggordaha* (Garuda) sebagai kesatria yang melambangkan kekuatan dan keperkasaan dimana *HdB* menjadi klausa pemersatu masyarakat Simalungun di *Deisa Na Ualuh* (Desa di

⁷³Burung Garuda sebagai lambang negara diresmikan pemakaiannya pada tanggal 11 Februari 1950 pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat dan pemakaiannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1958. Burung Garuda dirancang Sultan Hamid II dan disempurnakan Bung Karno.

Delapan Penjuru Mata Angin) yang berbeda dialek (logat), wilayah subkultur, klan, dan teritorial. Dengan demikian, *HdB* sebagaimana dirumuskan pada Lokakarya tahun 1960 merupakan kekhususan orang Simalungun yang menjiwai kepribadiannya. Klausa *HdB* tidaklah ahistoris namun sudah menjelma pada orang Simalungun sejak abad ke-15.

Sebagaimana disebut Saragih (2017)⁷⁴, klausa *HdB* merupakan fungsi ujaran pernyataan (*statement*) yang memberikan informasi yang disampaikan secara deklaratif. Klausa *HdB* terdiri dari tiga kata *Habonaron* (kebenaran), *do* (pemarkah, penegas) dan *bona* (pangkal). Karena itu, klausa *HdB* diartikan sebagai '*kebenaran adalah dasar*' (*dari segala sesuatu*) atau '*the truth is the basis*' (*for anything*).

Menurut Saragih (2017), *HdB* secara semiotik memberikan gambaran sebagai titik awal yang dari titik awal atau titik tolak pesan yang didatangkan, diturunkan atau dikembangkan sehingga menjadi unit yang lebih besar. Karena itu, *HdB* bagi orang Simalungun berfungsi mengembangkan sesuatu seperti pemikiran, gagasan, kegiatan, tindakan yang dimulai dari kebenaran (*habonaron*) yang mana kebenaran itu sangat tergantung pada suatu disiplin ilmu.

Demikian pula secara filosofis, Saragih (2017) menyebut bahwa *HdB* mencakup sekurang-kurangnya tiga hal yakni epistemologis, ontologis dan aksiologis. Secara ontologis, *HdB* dimaksudkan sebagai kebenaran yang muncul dari pengembangan kebenaran itu sendiri yang terbentuk dari metode pengembangannya. Karena itu, secara aksiologis, maka *HdB* menentukan tujuan dan maksud yang direalisasikan melalui klausa *HdB*. Dengan demikian, Saragih (2017) menyimpulkan bahwa klausa *HdB* dari perspektif linguistik,

⁷⁴Lihat Amrin Saragih. 2017. *Habonaron do Bona: Perspektif linguistik, semiotik dan filosofis*. Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion: Aktualisasi dan Implementasi *Habonaron Do Bona* dalam Kehidupan Masyarakat Simalungun Abad 21, Hotel Polonia, Medan 12 Agustus 2017.

semiotik dan filosofis adalah umum dan universal yakni kebenaran merupakan titik awal segala sesuatu proses. Proses dimaksud ialah sebagai sumber dari segala sumber ilmu, etika, moral, pengetahuan, perilaku sosial, tindakan sosial dan lain-lain yang operasionalnya harus dirumuskan dengan mencerminkan kepribadian kultural orang Simalungun.

C. Referensi nilai dan etika sosial

HdB merupakan acuan nilai (*value*) dan etika (*ethic*) sosial bagi orang Simalungun. Sebagai acuan nilai, maka *HdB* menjadi referensi personal maupun simbol sosial terutama dalam berinteraksi dan berkomunikasi antar sesama Simalungun maupun non-Simalungun. Sebagai acuan nilai sosial, maka *HdB* memiliki seperangkat tatanan (indikator) yang ada dalam kepala setiap orang Simalungun. Karena itu, nilai-nilai sosial yang dikandung *HdB* bersifat prosedural untuk menilai perilaku, tindakan dan pemikiran, baik bagi dirinya maupun orang lain.

Nilai sosial (*social values*) adalah nilai dianut suatu masyarakat menyangkut sesuatu yang dianggap baik ataupun buruk. Demikian pula nilai itu menjadi indikator menilai tentang suatu yang benar ataupun sesuatu yang salah. Karena itu, nilai sosial menjadi seperangkat alat untuk mengarahkan masyarakat dalam berfikir dan berperilaku. Demikian pula bahwa nilai sosial bermanfaat sebagai penentu dalam peranan sosial (*social role*). Dengan begitu, nilai sosial berfungsi memotivasi seseorang mewujudkan harapan sesuai dengan peran sosialnya. Selain itu, nilai sosial berfungsi sebagai alat penumbuh solidaritas pada masyarakat. Nilai sosial juga berfungsi sebagai pengontrol perilaku manusia dengan daya tekan dan daya ikat tertentu agar berperilaku sesuai dengan nilai yang dianutnya.

Pada konsepsi seperti ini, *HdB* menjadi acuan nilai sosial orang Simalungun. Nilai *Habonaron* sebagaimana disebut Saragih (2017) adalah universal, umum dan mendasar yaitu

pangkal dari segala unit awal. Dengan begitu, kebenaran (*habonaron*) adalah acuan bertindak, berperilaku dan berfikir menurut orang Simalungun. Pada akhirnya, *HdB* ini menjadi motivasi mewujudkan peran sosial (*social role*), solidaritas sosial (*social solidarity*) serta kesadaran sosial (*social consciousness*). Spirit ini menjadi etos kerja (*work ethic*) dimana tidak terdapat perasaan takut karena adanya prinsip kebenaran yang dianut dan kebenaran itu bersifat universal, mendasar dan umum.

Nilai dasar (*core value*) *HdB* adalah 'kebenaran' (*habonaron*). Sebagai nilai sosial, maka *HdB* menjadi *image* yang mencerminkan keunikan orang Simalungun. 'Kebenaran' itu menjadi ekspresif yang berintikan kebenaran sebagai nilai intrinsik dalam berperilaku, bertindak dan berfikir. Dalam hal ini, *core value* adalah hal-hal yang dihargai, dijunjung tinggi, dijalankan, dan merupakan jiwa dari masyarakat Simalungun. Karena itu, *core value HdB* adalah sesuatu yang otentik dan original dari jiwa orang Simalungun. Nilai ini terus dipelihara dan dipertahankan ditengah-tengah arus dinamika sosial dan budaya. *Core value* itu yakni 'kebenaran' sangat universal, mendasar dan asasi. Dengan karakteristik ini, *HdB* memiliki fungsi dasar yaitu sebagai:

1. Fungsi penunjuk arah dan pemersatu, yakni cara berpikir, berperilaku dan bertindak bagi anggota masyarakat yang bersumber dari nilai sosial yang berlaku. Karena itu, setiap anggota maupun pendatang baru memiliki kewajiban moral untuk mempelajari dan memahami aturan sosiokultural masyarakat di Simalungun yang harus dijunjung tinggi. Dengan kata lain, mereka harus menyesuaikan diri dengan norma, pola pikir, dan pola tingkahlaku yang diinginkan. Karena itu, *HdB* akan mengikat (pemersatu) solidaritas masyarakat.
2. Benteng perlindungan, bahwa nilai sosial *HdB* menjadi perlindungan bagi pendukung kebudayaannya. Daya dukung berupa loyalitas masyarakatnya tampak pada

perjuangan (mati-matian) mempertahankan nilai-nilai sosial yang ada padanya. Setiap masyarakat Simalungun harus patuh dan loyal terhadap nilai sosial *HdB* maupun berjuang bagi kelangsungan dan kelestarian masyarakat, kultur, agama, klan dan lain-lain di Simalungun.

3. Pendorong, yaitu bahwa nilai sosial *HdB* berfungsi sebagai motivator sekaligus menuntun pendukungnya guna berbuat baik. Karena nilai sosial adalah sesuatu yang adiluhung, maka terbentuklah harapan yang baik dalam diri manusia itu. Dengan nilai-nilai luhur itu, terbentuk manusi Simalungun yang beradab. Hal ini karena *HdB* memiliki nilai sosial seperti keadilan, kedisiplinan, kejujuran, kebenaran, etos kerja, dan lain-lain. Nilai sosial ini dapat mengarahkan masyarakat untuk berfikir dan bertingkah laku memenuhi peran sosialnya, ataupun sebagai alat solidaritas dikalangan masyarakat yang lebih luas ataupun pengontrol tingkah laku.

Sarjana seperti Kluckhohn (1962)⁷⁵ menyebut bahwa nilai bukanlah keinginan, tetapi apa yang diinginkan. Dengan begitu, nilai tidak semata-mata yang diharapkan, tetapi sekaligus diupayakan sebagai sesuatu yang pantas ataupun sesuatu yang benar bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Karena itu, nilai sosial merupakan petunjuk-petunjuk umum yang telah berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam lingkup sehari-hari. Dalam hal ini, *HdB* adalah tatanan nilai tentang apa yang diinginkan orang Simalungun yakni, berfikir, berperilaku dan bertindak dengan benar.

Karena *HdB* merupakan eksplorasi kebudayaan Simalungun, maka *HdB* itu sendiri menjadi sistem nilai budaya yang menjadi pedoman tertinggi perilaku dan tindakan orang Simalungun. Dengan demikian, *HdB* menjadi pegangan hidup dalam

⁷⁵Lihat Clyde Kluckhohn. 1962. The Human Meaning of The Social Science, Universal Categories of Culture, dalam A.L. Kroober (editor), 'Anthropology Today'. Chichago: Chichago University Press.

menentukan sikap hidup sehari-hari dan juga menjadi nilai interaksi sesama manusia menurut orang Simalungun. Sebagai nilai sosial, *HdB* tidaklah lahir begitu saja tetapi merupakan sesuatu yang diajarkan antar generasi terutama oleh orangtua kepada anaknya, maupun institusi (lembaga) seperti *Partuha Maujana Simalungun* kepada seluruh orang Simalungun itu sendiri. Dengan demikian, setiap individu orang Simalungun membutuhkan sistem yang mengatur atau mengarahkannya untuk bertindak guna menumbuhkembangkan kepribadian yang baik dalam bergaul dan berinteraksi. Sebagaimana disebut Damanik (2017)⁷⁶, dalam kehidupan masyarakat Simalungun, *HdB* merupakan nilai luhur, sebuah ajaran kolektif yang tidak saja sebagai acuan berperilaku tetapi juga menjadi “*ajaran spiritual*” yang dijadikan sebagai falsafah hidup suku Simalungun dan pada gilirannya dapat membentuk jati diri kolektif *halak* (suku) Simalungun.

Sebagai acuan nilai sosial, *HdB* memiliki karakteristik yakni: i) merupakan hasil interaksi sosial orang Simalungun, ii) ditularkan antar generasi yang bersumber dari leluhur, iii) terbentuk melalui proses belajar (sosialisasi), iv) merupakan motivasi untuk pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial, v) variasi khas kebudayaan Simalungun, vi) mempengaruhi pengembangan diri orang Simalungun, vii) berpola karena berkaitan antara satu dengan yang lain sehingga membentuk sistem sosial, dan viii) mempengaruhi kepribadian individu dan kelompok.

Bila merujuk Bertens (2007)⁷⁷ dimana nilai (*values*) sekurang-kurangnya memiliki tiga ciri, maka *HdB* sebagai

⁷⁶Lihat Ibnu Hajar Damanik. 2017. *Habonaron do Bona: Mewujudkan Manusia Simalungun Yang Unggul dan Kompetitif Menjawab Tantangan Abad ke-21*. Makalah. Disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) “Aktualisasi dan Implementasi Habonaron do Bona pada Masyarakat Simalungun di Abad ke-21”, Sabtu 12 Agustus 2017 di Hotel Polonia Medan

⁷⁷Lihat Kimpul Bertens. 2007. *Etika*. (cet. 10). Jakarta: Gramedia.

acuan nilai pun memiliki tiga karakteristik, yaitu: *pertama*, *HdB* berkaitan dengan subyek yang membentuk nilai. Dalam hal ini, subyek adalah situasi dan kondisi eksternal yang memengaruhi terbentuknya nilai. Situasi eksternal itu adalah seperti budaya, persaingan, agama, seni, politik, hukum, pemerintahan, etnik dan lain-lain, *kedua*, nilai tampil dalam suatu konteks praktis, dimana subyek ingin membuat sesuatu. Dalam hal ini, nilai-nilai terhadap subyek yang berada diluar dirinya akan melahirkan nilai terutama apakah yang bersangkutan itu menunjukkan cara berfikir, bertindak dan berperilaku yang benar, dan *ketiga* bahwa nilai menyangkut sifat-sifat yang 'ditambah'. Dalam hal ini, *HdB* memiliki penilaian ekspansif terhadap subyek yang tidak dimiliki oleh objek pada dirinya karena dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya.

Selain sebagai acuan nilai sosial, *HdB* merupakan sumber etika sosial (*social ethic*) yakni sumber ilmu untuk menentukan yang baik dan buruk ataupun tentang hak dan kewajiban moral. Sebagai etika sosial, *HdB* memuat tiga unsur yakni: i) indikator tentang apa yang baik dan buruk, ii) kumpulan azas dan nilai, dan iii) nilai mengenai benar dan salah. Ketiga unsur *HdB* ini adalah etika terhadap alam maupun interaksi sesama manusia dimana mereka hidup.

Sebagaimana disebut Suseno (1987)⁷⁸ dan Bertens (2007), etika dipandang dalam tiga kategori yakni: i) etika praksis, ii) etika sebagai refleksi, dan iii) etika sebagai ilmu. Sebagai etika praksis, maka *HdB* memuat nilai-nilai dan norma moral yang harus maupun tidak dipraktekkan. Karena itu, *HdB* adalah acuan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kepatutan nilai dan norma moral. Sedangkan sebagai etika refleksi ialah pemikiran moral. Pada konsepsi ini, etika menjadi refleksi berfikir terhadap sesuatu yang boleh ataupun dilarang untuk dilakukan. Dalam hal ini, *HdB* sebagai etika refleksi berbicara, menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku seseorang.

⁷⁸Lihat Franz Magnis Suseno. 1987. *Etika Dasar*. Yogyakarta: Kanisius.

Karena itu, orang Simalungun memiliki penilaian terhadap kepatutan perilaku, tindakan dan pemikiran yang tumbuh pada setiap orang Simalungun itu. Sedangkan etika sebagai ilmu terkait erat dengan filsafat yaitu kecintaan terhadap hikmah, kebijaksanaan ataupun keteladanan. Dalam hal ini *HdB*, sebagaimana dijelaskan diatas mencerminkan kecintaan orang Simalungun terhadap kebenaran yakni motivasi bertindak, berperilaku maupun berfikir secara benar.

D. Transformasi sebagai spirit keberhasilan

HdB adalah falsafah sosial yang dielaborasi dari kebudayaan Simalungun. Karena itu, *HdB* adalah nilai budaya (*cultural value*) orang Simalungun yang berkenaan dengan: i) basis perilaku seseorang, ii) pola perilaku seseorang, iii) kontrol perilaku bagi seseorang, dan iv) komponen intelektual dan emosional bagi seseorang. Karena itu, seperti disebut Kluchkhon (1962), bahwa setiap sistem nilai budaya terkait erat dengan lima masalah dasar (hakekat) dalam kehidupan manusia yang menjadi basis dari variasi-variasi kehidupan sosialnya.

Kelima masalah dasar dimaksud adalah: a) hakikat hidup manusia, yaitu: kebudayaan menjadi acuan pencapaian tujuan bersama, sesuatu yang indah, menyedihkan, dan lain-lain, b) hakekat karya manusia, yaitu kebudayaan menjadi acuan karya untuk memungkinkan manusia dapat hidup, mencapai kehormatan, atau gerak hidup untuk mencapai karya lainnya, c) hakekat ruang dan waktu, yaitu kebudayaan menjadi acuan masa lalu, masa kini dan masa depan dimana kehidupan sosial harus dibentuk, diulangi atau dikonstruksi, d) hakekat manusia dengan alam yaitu kebudayaan menjadi acuan tentang alam yang dahsyat, misteri ataupun kabut yang harus ditaklukkan, penyerahan diri ataupun mencari keselarasan dengan alam, dan e) hakikat relasional sesama manusia yaitu kebudayaan menjadi acuan relasi vertikal maupun horijontal sesama manusia seperti tokoh pemimpin, relasi dengan tetangga, relasi ketergantungan

dengan manusia lain dan sebagainya. Dengan demikian, merujuk pada pernyataan Kluckhohn (1962) maka *HdB* merupakan sistem nilai kultural orang Simalungun yang terkait dengan kelima hal dimaksud. Pada konsepsi ini, *HdB* adalah *personal reference*, sumber motivasi dan pandangan hidup maupun konstruksi simbol sosial.

Seperti disebut Damanik (2017), nilai-nilai pokok *HdB* dapat dielaborasi ke dalam beberapa aspek perilaku yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan seperti antara lain: a) menjunjung tinggi tata krama, b) menghormati orangtua dan orang lain, c) menghormati guru, d) membantu orang lain (*manappati*), e) tidak menyakiti atau membunuh, f) tidak menyinggung perasaan atau menyakiti hati, g) tidak meminta-minta (*ulang tedek-tedek*), h) tidak menyusahkan orang lain (*ulang manusahi*), i) tidak berbohong (*ulang marguak*), j) tidak berlaku atau berkata kasar atau memaki orang lain, k) tidak membungakan uang, mencuri, atau korupsi, l) tidak menipu dan mengkhianatai orang lain dan lain-lain.

Selanjutnya, menurut Damanik (2017), untuk menjadikan *HdB* menjadi patron yang senantiasa mewarnai dan menjadi acuan perilaku tiap warga Simalungun atau *halak* Simalungun yang hidup dengan *ahap* Simalungun, maka diperlukan usaha yang sistematis, terencana, dan terintegrasi. Hal yang pokok adalah bagaimana menjadikan *HdB* menjadi nilai bersama, milik bersama (*shared values*), maka harus dibangun komitmen bersama yang kuat untuk mengintegrasikan nilai *HdB* kedalam cara berpikir, bersikap, dan berperilaku. Ketiga unsur perilaku itu merupakan komponen kunci untuk menjadikan nilai *HdB* menjadi Karakter Simalungun. Dalam perspektif karakter, maka orang Simalungun harusnya memiliki tiga hal yakni: (1) mengetahui hal-hal yang baik dari *HdB*, (2) mempunyai kecenderungan sikap dan perilaku seperti terkandung dalam nilai *HdB*, dan (3) selalu berperilaku atau menampilkan

perilakunya seperti yang diketahui dan dipahaminya dari nilai-nilai *HdB*.

Membandingkan *HdB* sebagai virus sukses (virus keberhasilan) dengan kajian McClelland (1961)⁷⁹ di Kakinada, Teluk Benggala India misalnya, menyebutkan adanya ‘dorongan hati menuju modernisasi’ (*need for Achievement*) yang disingkat dengan *n Ach*. *Need for Achievement (n Ach)* adalah kebutuhan akan prestasi (*need for achievement*) yaitu dorongan untuk mengungguli, lebih berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar, berusaha keras untuk sukses. Virus *n Ach* sangat terkait dengan kebajikan diri yaitu sikap mental terhadap prestasi. Karena itu, *n Ach* adalah semacam virus yang telah ada dan meresap pada setiap individu yang tidak dipengaruhi oleh pendidikan, ras, kenangan historis, penaklukan militer, lingkungan geografis dan lain-lain, tetapi justru telah ada pada setiap individu. Tetapi *n Ach* ini sangat dipengaruhi oleh: i) adanya perasaan yang mendalam bahwa derajat mereka lebih tinggi dari orang lain yang ada disekitar mereka, ii) dengan suatu cara tertentu merekalah yang memegang kunci yang tidak saja berfungsi bagi dirinya tetapi juga bagi orang lain. Kedua hal ini menjadi faktor yang harus ada untuk sukses dibidang ekonomi yaitu keinginan untuk membuktikan bahwa diri sendiri lebih baik daripada orang lain, dan kebutuhan untuk menghasilkan kebaikan bersama (sekurang-kurangnya bagi golongan minoritas) yang sering dilaksanakan dengan cara yang lebih keras.

Menurut McClelland (1961), keadaan seperti ini menyebabkan virus mental *n Ach* mendorong laju modernisasi yang menyebabkan cepatnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Dalam bahasa yang lain disebut bahwa pertumbuhan dan konsumsi ekonomi yang tinggi sekalipun, dipastikan oleh adanya kebajikan diri yang memoles *n Ach* yang dimilikinya. Karena itu, setiap orang harus memiliki perasaan yang ketat

⁷⁹ Lihat David C. McClelland. 1961. *The Achieving Society*. Princenton: D. Van Nostrand Company.

dan doktriner (misalnya seperti kaum minoritas) agar mereka dapat menganggap diri unggul sehingga dengan demikian meningkatkan *n Ach* mereka. Sesungguhnya, motivasi intrinsik berasal dalam diri individu yang bersumber dari nilai budaya yang telah tertanam atau teinternalisasi dalam kebajikan diri. Motivasi ini adalah yang terutama dalam mengerakkan etos kerja guna mencapai prestasi yang pada gilirannya berkontribusi terhadap perubahan (modernisasi). Namun demikian, faktor-faktor lain terutama yang bersifat ekonomi sebagai faktor pengubah sosial dan budaya juga tidak dapat diabaikan begitu saja.

Berdasar pada adanya nilai budaya yang memengaruhi etos kerja, maka seseorang yang disebut memiliki etos kerja ialah individu atau kolektifitas yang mencirikan: i) esensi waktu yaitu orang yang menghargai waktu yang dipergunakan untuk bekerja, ii) moralitas yang bersih yaitu dasar kerja yang disertai oleh etika moral sebagai sikap mental kerja, iii) kejujuran yaitu panggilan kerja yang mendasari munculnya keterikatan, iv) komitmen yaitu keinginan yang mengikat tekad guna membentuk vitalitas kerja, dan v) konsisten yaitu pendirian yang kuat terhadap asas, pantang menyerah dan idealis.

Sistem nilai budaya yang sangat penting bagi kelompok kebudayaan Simalungun adalah *HdB* (kebenaran adalah pangkal segalanya) yakni tujuan dan pandangan hidup secara turun temurun. Orientasi hidup yang mengacu kepada '*kebenaran*' ini menjadi inti adat dan sosial pergaulan hidup masyarakat Simalungun. Karena itu, *HdB* adalah pedoman hidup, *folkways* dan idiologi orang Simalungun yaitu semacam doktrin budaya agar setiap orang Simalungun merasa, melihat dan berfikir secara benar, baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungannya. Karena itu, *habonaron do bona* adalah referensi personal, sumber motivasi dan pandangan hidup, maupun konstruksi simbol sosial.

HdB sebagai referensi personal, sumber motivasi dan pandangan hidup maupun konstruksi simbol sosial adalah

ideologi atau cita-cita yang dicapai dalam kehidupan sosial maupun adat. Karena itu, falsafah *HdB* terwujud dalam merawat interaksi sosial dan pergaulannya yang mengutamakan keseimbangan sosial (*social equilibrium*) sehingga dengan cara itu mereka dapat eksis dalam menjalani kehidupan bersama dengan orang (etnik) lain. Selanjutnya, dalam kehidupan adat istiadat, falsafah *HdB* tampak pada peran dan kedudukan setiap struktur dari: *tondong*, *tondong ni tondong*, *boru*, *boru ni boru* dan *sanina* yang disebut dengan struktur sosial *pentagon* (struktur sosial segilima).

Dalam bidang politik seperti disebut Purba (2017)⁸⁰ bahwa politisi Simalungun harus mengikuti nilai-nilai dan etika politik sesuai *HdB* yang tercermin sebagai berikut: i) menjadi pemimpin di Simalungun tidak cukup menjadi tokoh Simalungun saja, tetapi harus jadi tokoh nasional yang diterima berbagai suku yang di dominasi oleh suku Jawa dan Toba di daerah ini, ii) mindset harus berubah menjadi pemimpin di NKRI, bukan di kerajaan Simalungun. Artinya *mar-Simalungun* itu selalu dalam konteks *mar-Indonesia*, iii) dalam sistem politik nasional, peran partai masih sangat penting di masa depan. Untuk ini perlu dipikirkan mulai sekarang agar pemuda Simalungun terjun ke partai untuk jadi pemimpin masa depan. Karena partai belum berhasil mengkader pemimpin daerah yang handal, ketokohan calon pemimpin perlu sebelum memasuki partai. Jadi ada dua jalan, ketokohan dulu baru masuk partai atau masuk partai untuk menjadi tokoh politik, iv) dengan prinsip *HdB* manusia Simalungun seharusnya mampu jadi pemimpin nasional atau regional, dan ini harus diprogramkan oleh ormas Simalungun mulai sekarang, dan v) Revolusi Mental yang diterapkan sekarang dalam kehidupan

⁸⁰Lihat Sarmedia Purba. 2017. *Habonaron do Bona: Perspektif politik di Simalungun*. Makalah. Disampaikan pada *Focus Group Discussion (FGD)* yang diadakan MHN PMS, Medan, 12 Agustus 2017 di Hotel Polonia Medan.

bernegara seharusnya *HdB* dapat menjadi sumber inspirasi bahwa akhirnya kebenaran adalah pangkal segalanya.

Dalam aspek adat istiadat, nilai-nilai *Hdb* seperti disebut Dasuha (2017)⁸¹ tatanan struktur *tondong*, *boru* dan *sanina* disebut *tolu sahundulan* yang berbentuk segitiga, yang tampak pada pelaksanaan adat kecil (*horja adat na etek*), yang harus ditopang oleh *tondong ni tondong* dan *boru ni boru* yang berbentuk trapesium dalam pelaksanaan *horja adat na banggal* (kerja adat besar). Karena itu, kehidupan sosial orang Simalungun harus saling menopang seperti sebuah rumah tangga (yang terdiri dari *tondong*, *boru* dan *sanina*) yakni jalinan utuh dan terikat antara *bride giver* (pemberi istri), *receive giver* (penerima istri) dan kerabat semarga (*sanina*), yang harus ditopang oleh *tondong ni tondong* dan *boru ni boru* yaitu keluarga luas (*extended family*) orang Simalungun (Sumbayak, 2005)⁸²

Sebagai sistem nilai budaya, falsafah *HdB*, secara khusus menyoal etika pergaulan sehari-hari, memunculkan moralitas etnik yang disebut dengan *ahap* yaitu semacam virus yang ada dalam jiwa orang Simalungun. Nilai budaya *ahap* adalah perasaan menjadi bagian utuh dari etnik Simalungun tanpa memandang klan, suku, agama, keyakinan, status sosial dan lain-lain. Dengan begitu, *ahap* memiliki makna universal (mendunia) sebagai proses dari nalar berfikir guna menimbang dan memahami orang lain.

Menyoal tentang interaksi sosial, sistem nilai budaya *HdB* membentuk pribadi-pribadi orang Simalungun dengan karakter yang mudah bergaul, menemukan peluang (*opportunity*) dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap penggunaan

⁸¹Lihat Juandaharaya P. Dasuha. 2017. *Habonaron do Bona: Makna filosofis pada pelaksanaan adat istiadat Simalungun*. Makalah. Disampaikan pada *Focus Group Discussion (FGD)* yang diadakan MHN PMS, Medan, 12 Agustus 2017 di Hotel Polonia Medan.

⁸²Lihat Djapiten Sumbayak. 2005. *Refleksi Habonaron do Bona dalam adat Budaya Simalungun*. Pematang Siantar.

bahasa orang lain. Dengan kemampuan ini, mereka dapat diterima pada setiap kelompok etnik (*ethnic group*) dimanapun di Sumatera Utara maupun Indonesia.

Sistem nilai budaya *HdB* sebagai referensi personal, sumber motivasi dan pandangan hidup maupun konstruksi simbol sosial adalah sumber hukum (norma) yang mengilhami dan menginspirasi orang Simalungun untuk bersikukuh pada kebenaran. Karena itu, mereka cenderung mereduksi konflik atau pertikaian intra dan ekstra etnik. Dari falsafah itu dan kemudian menjadi sumber cita-cita pada kehidupan sosial yang serasi, aman dan toleran, maka orang Simalungun cenderung mereduksi konflik dalam hidupnya.

Sistem nilai budaya *HdB* menjadi sumber motivasi dan pandangan hidup. Di dalam sistem nilai budaya itu, terdapat referensi hidup berupa pencapaian *hatunggunon* (kehormatan) dan *hinadongan* (kekayaan) yang harus dicapai (diperoleh) dengan cara bonar (benar). Namun demikian, *hatunggunon* (kehormatan) dan *hinadongan* (kekayaan) sebagai instrumen dan mekanisme falsafah *HdB*, dimaknai sebagai kehormatan dan kekayaan yang diraih (sendiri), sehingga hanya dinikmati (sendiri). Kekayaan (*hinadongan*) yang dicapai orang Simalungun dipergunakan untuk membentuk atau memperluas *tuah ni hinadongan* di perantauan.

Adanya adanya etos kerja yang tinggi sebagai internalisasi nilai budaya *HdB* yang tinggi akan melahirkan prestasi kerja yang tinggi pula. Pada gilirannya, kondisi seperti inilah yang melahirkan manusia-manusia Simalungun yang modern. Gambaran manusia modern sebagaimana disebut Inkeles dan Smith (1976)⁸³ adalah: i) kesiapan menerima pengalaman baru dan keterbukaan terhadap inovasi dan perubahan, ii) kesiapan membentuk atau mempertahankan pendapat mengenai

⁸³Lihat Aleks Inkeles and David H. Smith. 1974. *Becoming Modern: Individual Change in Six Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press.

berbagai masalah yang menyangkut kepentingan umum, mencari bukti yang mendukung pendapat itu, mengakui keanekaragaman pendapat yang ada; dan menilai keanekaragaman pendapat itu secara positif, iii) orientasi khusus terhadap waktu: lebih menekankan pada masa kini dan masa depan ketimbang masa lalu, mengutamakan jadwal, dan kecepatan waktu, iv) kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri dan bersama orang lain untuk menata hidupnya menghadapi tantangan yang muncul, v) berencana, mengantisipasi dan menata kegiatan masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan individual maupun kemasyarakatan, vi) mempercayai keteraturan kehidupan sosial yang dapat diramalkan sehingga memungkinkan untuk memperhitungkan tindakan yang akan diambil, vii) rasa keadilan dalam berbagi, yakni kepercayaan bahwa ganjaran akan diterima lebih menurut aturan ketimbang menurut tingkah laku, dan struktur ganjaran akan diperoleh menurut keterampilan dan derajat partisipasi, viii) minat dan nilai tinggi diletakkan pada pendidikan formal dan sekolah, dan ix) menghormati martabat orang lain, termasuk orang yang berstatus rendah.

Dengan demikian, falsafah *HdB* adalah referensi personal sekaligus spirit keberhasilan. Sebagai referensi personal, *HdB* adalah sumber motivasi dan pandangan hidup maupun konstruksi simbol sosial. Kemudian, sebagai spirit keberhasilan, maka *HdB* adalah virus sukses yang memotivasi masyarakat Simalungun berperfikir, berperilaku dan bertindak dengan benar. Dengan demikian, *HdB* adalah sumber hukum, idiologi dan cita-cita bagi orang Simalungun. Karena itu, *HdB* adalah kaidah, hukum atau norma dalam bertindak, berfikir dan berperilaku. Di dalam falsafah itu, tercantum cita-cita, gagasan dan impian orang Simalungun dengan berperilaku benar (*bonar*) untuk mendapatkan *hatunggunon* dan *hinadongan*. Semangat (*spirit*) *habonaron do bona* dibentuk melalui etika (*ethic*) *haroon* (gotongroyong) yaitu kerjasama dalam mencapai

tujuan (*sapangambei manoktok hitei*). Karenanya, etika kerja orang Simalungun adalah *Haroan* sebagai spirit (semangat) meraih keberhasilan hidup. *Haroan* itu sendiri berasal dari penjabaran falsafah sosial Simalungun yakni *Habonaron do Bona*.

E. Menempatkan *HdB* pada kenyataan sosial

Seperti disebut Saragih (2017) bahwa klausa *HdB* mengandung pengertian yakni: '*kebenaran adalah dasar*' (*dari segala sesuatu*) atau '*the truth is the basis*' (*for anything*). Dalam hal ini, '*kebenaran*' (*habonaron*) adalah universal dan mendasar. Dalam Ilmu Pengetahuan misalnya, kebenaran menjadi tolak ukur (parameter) guna memandang realitas (kenyataan) sosial. Dengan begitu, kebenaran adalah absolut, tidak dapat ditawar-tawar atau diselewengkan dan menjadi inti kenyataan sosial (*social reality*). Kebenaran menjadi pangkal tolak pemikiran untuk kemudian menetapkan perilaku dan tindakan. Dalam hal ini, perilaku dan tindakan dimaksud dapat menyoal kebenaran hukum, adat istiadat, politik, seni, sejarah, kebudayaan, agama, kompetisi (persaingan), *manual procedure*, kontestasi, interaksi dan komunikasi dan lain-lain. Kebenaran yang dimaksudkan pada setiap aspek ini adalah kenyataan sosial yang harus di-bentuk guna menafsirkannya secara sosial kultural.

Merujuk Berger dan Luckman (1990)⁸⁴, kenyataan sosial diartikan sebagai suatu kontruksi sosial terhadap realitas (*social construction of reality*) yang formasinya dibuat manusia sesuai perjalanan sejarahnya dari suatu era ke era yang lain menuju masa depan. Kenyataan sosial itu merupakan proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu atau sekelompok individu secara terus menerus menciptakan suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.

⁸⁴Lihat Peter L. Berger dan Thomas Luckman. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah risalah tentang Sosiologi pengetahuan*. (terjemahan). Jakarta: LP3ES

Karena itu, sifat dasar kehidupan bermasyarakat adalah dialektik bahwa masyarakat adalah produk manusia dan manusia adalah produk masyarakat. Demikian pula bahwa manusia adalah pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi sebagaimana kenyataan objektif mempengaruhi kembali manusia melalui proses internalisasi. Jadi, kenyataan sosial adalah dialektika antara diri (*the self*) dengan dunia sosio-kultural yang berlangsung dalam suatu proses mencakup tiga momen yakni eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Karena itu, masyarakat adalah proses yang berlangsung dalam ketiga momen itu serta legitimasi yang berdimensi kognitif dan normatif.

Merujuk pada pendapat Berger dan Luckman (1990) maka falsafah sosial *HdB* adalah internalisasi nilai sosio-kultural Simalungun guna memahami realitas (kenyataan) sosialnya. Falsafah sosial ini terbentuk atas realitas sosiohistoris, sosioreligio, sosiokultural, dan sosiopolitik yang memengaruhi perjalanan sosial orang Simalungun. Suatu keadaan yang tidak dapat dipungkiri bahwa orang Simalungun termasuk dalam masyarakat *Proto-Malay* yang bermigrasi dari Taiwan ke Sumatra pada 2000 tahun sebelum masehi. Masyarakat pengembara ini kemudian bermukim di pesisir timur Sumatra bagian utara sebagai masyarakat agraris dan nelayan. Menjelang abad ke-10, masyarakat pengembara itu membentuk kesatuan politik bernama Kerajaan Nagur yang menjadi cikal bakal sistem mornarhi di Simalungun (Damanik, 2017)⁸⁵. Demikian pula pada abad ke-14, masyarakat *Ma-Lu-Man* sebagaimana disebut Ma Huan (1970)⁸⁶ dalam memorialnya adalah masyarakat agraris yang hidup damai, berbaur dan kohesif dengan masyarakat Melayu di pesisir timur Sumatra Utara.

⁸⁵Lihat Erond L. Damanik. 2017. *Agama, perubahan sosial dan identitas etnik: Moralitas agama dan kultural di Simalungun*. Medan: Simetri Institut.

⁸⁶Lihat Ma Huan. 1970. *Ying Yai Sheng Lan: The Overall Survey of the Oceans Shores*. (Feng Cheng-Chun, ed). Cambridge: Hakluyt Society.

Pada tahun 1823, masyarakat ini disebut *Se-mi-lo-ngan* atau *Se-ma-lo-ngan* sebagaimana disebut Anderson (1971)⁸⁷ adalah masyarakat pengrajin dan agraris.

Kemudian pada tahun 1885, wilayah masyarakat ini berbaur dengan orang Eropa dalam upaya budidaya perkebunan (*cuulturgebied*) seperti teh, kelapa sawit, karet, coklat dan sisal (Kian-wie, 1977)⁸⁸. Kondisi perkebunan ini menjadi awal modernisasi gaya Barat pertama kali di Simalungun yang berbarengan dengan masuknya agama samawi seperti Islam, Kristen Protestan maupun Katolik (Dasuha dan Sinaga, 2003)⁸⁹. Selanjutnya, tidak kurang setahun pasca Kemerdekaan Indonesia, terjadi pembunuhan bangsawan di Simalungun (Damanik, 2015; 2017)⁹⁰ yang berdampak pada stagnasi dinamika sosial maupun politik di Simalungun berupa meredupnya kepemimpinan kolektif ataupun hilangnya tanah-tanah di Simalungun ke etnik pendatang.

Pada saat itu, hegemoni 'Toba' di Simalungun sedang mengemuka dengan dalih sebagai etnik serumpun yang disebut 'Batak' rupanya menjadikan etnik Simalungun sebagai ordinat etnik Toba karena berasal dari Pusuk Buhit. Berikutnya, pengandaian etnik Simalungun ke salah satu keturunan *si-Radja Batak* ialah menghilangkan 'identitas' etnik Simalungun yang digantikan dengan identitas etnik Toba. Karena itu, tidak

⁸⁷Lihat John Anderson. 1971. *Mission to the east cost of Sumatera in 1832*. London, New York: Oxford University Press.

⁸⁸Lihat Thee Kian-wie. 1977. *Plantation Agriculture and Export Growth: an Economic History of East Sumatera, 1863-1942*. Jakarta: Leknas LIPI.

⁸⁹Lihat Juandaraya P. Dasuha dan Martin Lukito Sinaga. 2003. *Tole den Timorlanden das Evangelium: Sejarah Seratus Tahun Pekabaran Injil di Simalungun, 2 September 1903-2003*. Pamatang Siantar: Kolportase GKPS.

⁹⁰Lihat Erond L. Damanik. 2015. *Amarah: latar, gerak dan ambruknya swaprja Simalungun, 3 Maret 1946*. Medan: Simetri Institute. Lihat juga Erond L. Damanik. 2017. *Dalih Pembunuhan Bangsawan: Perspektif hapusnya swapraja Simalungun Maret 1946*. Medan: Simetri Institut.

mengerankan apabila orang Simalungun mengalami 'krisis identitas' hingga tahun 1960-an.

Sebagaimana diketahui bahwa, sejak tahun 1952 telah muncul upaya pembebasan etnik Simalungun dari hegemoni etnik lain. Meskipun upaya pemandirian eksklusi etnoreligio itu baru terjadi pada 1 September 1963⁹¹, tetapi menjadi motivasi menyeluruh bagi orang Simalungun untuk membebaskan diri dari dominasi dan hegemoni etnik lain. Upaya pemandirian ini bukan saja sebagai dampak hegemoni dan dominasi etnik lain di Simalungun, tetapi juga karena realitas sosial bahwa pembunuhan bangsawan di Simalungun banyak dilakukan etnik migran yang kemudian diperparah lagi oleh peristiwa PRRI/Permesta. Situasi etnisitas yang terkoyak karena ambisi dan perasaan superior etnik migran ini menjadi awal keretakan sosial hubungan antar etnis antara Simalungun dengan migran. Karena itu, mau tidak mau ataupun suka tidak suka, maka pemandirian eksklusi etnoreligio dan perumusan identitas etniknya mutlak dilakukan.

⁹¹Pada tanggal 5 Oktober 1952, HKBP Distrik Simalungun dibentuk menjadi HKBP Simalungun (HKBPS) yang dikepalai seseorang yang disebut Wakil Ephorus dibantu seorang Sekretaris Jenderal. Sejak tahun itu, muncul upaya empat rohaniawan yakni J. Wismar Saragih, Kerpanius Purba, A. Wilmar Saragih dan Jenus P. Siboro memandirikan HKBPS menjadi institusi mandiri yang lepas dari HKBP. Dialog dengan pucuk pimpinan HKBP memakan waktu hingga 10 tahun karena keengganan HKBP memandirikan HKBPS. Namun, kesepakatan memandirikan baru terjadi pada bulan September 1962. Namun, meninggalnya A. Wilmar Saragih yang menjabat Wakil Ephorus HKBPS menyebabkan pemandirian itu tertunda. Barulah pada 1 September 1963, pemandirian HKBPS menjadi GKPS benar-benar dilakukan. Pada saat itu, HKBPS yang beralih menjadi GKPS dipimpin Jenus P. Siboro dan Lesman Purba. Lihat Jan J. Damanik dan Salmon Sinaga. 2013. *Permahan Ulang Gabe Iparmahani: Mengenang dan Belajar dari Pelayanan Pdt. A. Wilmar Saragih, 1916-1962*. Medan: Galasibot.

Dengan demikian, pemandirian eksklusi etnoreligio pada tahun 1963 itu bukan saja pada berdirinya institusi etnoreligio tetapi sekaligus menjadi penjuru (*corner stone*) bagi perumusan identitas etnik maupun kembalinya figur-figur cerdik pandai (*maujana*) berkuasa di Simalungun. Tidak mengherankan pula bahwa pasca pemandirian eksklusi etnoreligio itu, etnik Simalungun harus bekerja keras membebaskan etniknya dari dominasi dan hegemoni etnik lain, lewat Seminar Kebudayaan, penataan atribut kultural, tata kelola *Rumah Bolon*, pendirian *Partuha Maujana Simalungun*, revitalisasi seni suara dan gerak (*tortor*), pendirian Universitas Simalungun dan lain-lain yang sangat mungkin dilakukan lewat kepemimpinan Radjamin Purba sebagai Bupati Simalungun bersamaan dengan tokoh intelektual yang umumnya rohaniawan Kristen Simalungun.

Pemikiran dan tindakan yang dilakukan sejumlah intelektual Simalungun seperti J. Wismar Saragih, Kerpanius Purba, A. Wilmar Saragih, Lesman Purba, Jenus P. Siboro, Radjamin Purba dan lain-lain mencerminkan nilai-nilai *Habonaron* yang menjadi inti pokok falsafah sosial orang Simalungun. Nilai-nilai *Habonaron* pada mereka itu terutama bertujuan untuk menegaskan wibawa orang Simalungun meskipun menghadapi hambatan, tantangan, rintangan yang sangat berat karena berhadapan dengan dominasi dan hegemoni yang menyebut diri lebih superior. Dengan sekuat tenaga, modal dan pemikiran yang terbatas, mereka merumuskan dan berjuang memajukan kebudayaan, teritorial dan etnik Simalungun.

Pada aktifitas kehidupan sehari-hari, kebenaran menjadi indikator pergaulan hidup. Sebagaimana diketahui, interaksi dan komunikasi sosial yang baik hanya dapat dibangun dengan kebenaran yaitu menyampaikan informasi dan data-data yang aktual dan akurat. Hal ini karena, kebenaran informasi dan data-data yang disampaikan menjadi hal pokok interaksi dan komunikasi sosial. Hanya dengan *habonaron*-lah, pribadi-pribadi Simalungun dapat eksis dalam lingkungan sosial, kompetisi maupun kontestasi sosial politik.

Dalam melakukan interaksi dan komunikasi sosial, setiap pribadi (*the self*) dapat saja melakukan interaksionisme simbolik seperti disebut Mead (1932)⁹² dan Blumer (1957)⁹³ ataupun dramaturgis seperti disebut Goffman (1959)⁹⁴. Ketiga sarjana ini memandang interaksi *the self* (pribadi) sebagai internalisasi struktur sosial dan kultural. Artinya bahwa interaksi sosial terbentuk karena adanya pengejawantahan nilai struktur sosial dan kultural sebagai cara memahami psikologi sosial. Menurut Mead setiap pribadi (*the self*) merupakan proses sosial yakni sebuah proses dimana pelakunya memperlihatkan pada dirinya sendiri hal-hal yang diadapinya dan karena situasi itu, pribadi dimaksud merencanakan dan bertindak melalui interpretasi sosialnya.

Dalam hal ini, pribadi-pribadi yang berinteraksi sosial itu adalah aktor atau pelaku yang melakukan interaksi sosial dengan dirinya sendiri dengan mengambil peran orang lain. Kemudian, perencanaan tindakan dan tindakan sosial itu sendiri adalah respon atas tindakan-tindakannya. Jadi, setiap pribadi (*the self*) yang berinteraksi itu menunjukkan interaksi pribadi (*self interaction*) yang menunjuk pada diri mereka tentang psikologi sosialnya. Pribadi-pribadi (*the selfs*) ini bersifat aktif dan kreatif dan tidak satupun variabel-variabel sosial, kultural dan psikologis yang dapat memutuskan tindakan itu. Jika Mead (1932) dan Blumer (1957) cenderung melihat interaksi sosial *the self* sebagai bentuk interaksionisme

⁹²Lihat George Herbert Mead. 1932. *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press.

⁹³Lihat Herbert Blumer. 1957. "Collective Behavior", dalam Gitler J.B. (ed.), *Review of Sociology: Analysis of a Decade*. New York: John Wiley and Son.

⁹⁴Lihat Erving Goffman. 1959. *Presentation of Self in Everyday Life*. Social Science Research Center, University of Edinburgh. Anchor Books paperback, New York: Doubleday & Company Inc.

simbolik, maka Goffman (1959) melihat interaksi *the self* itu sebagai interaksi dramaturgis.

Menurut Goffman (1959) kehidupan sosial ialah ibarat kehidupan teater yakni interaksi sosial yang mirip dengan pertunjukan di atas panggung dengan menampilkan peran-peran yang dimainkan para aktor. Kehidupan sosial itu dibagi dua menjadi 'wilayah depan' (*front region*) dan 'wilayah belakang' (*back region*). Wilayah depan merujuk kepada peristiwa sosial yang menunjukkan bahwa individu bergaya atau menampilkan peran formalnya. Mereka sedang memainkan perannya di atas panggung sandiwara di hadapan khalayak penonton. Sebaliknya wilayah belakang merujuk kepada tempat dan peristiwa yang memungkinkan mempersiapkan perannya di wilayah depan. Wilayah depan ibarat panggung sandiwara (*front-stage*) yang ditonton khalayak penonton, sedang wilayah belakang ibarat panggung sandiwara bagian belakang (*back stage*) atau kamar rias tempat pemain sandiwara bersantai, mempersiapkan diri, atau berlatih untuk memainkan perannya di panggung depan. Karena itu, apa yang ditampilkan pada panggung depan adalah settingan dari panggung belakang.

Bila merujuk aspek historis, maka orang Simalungun memiliki sosok dan tokoh yang patut diteladani seperti Sang Nauuluh Damanik, penguasa subteritorial Simalungun dari Siantar. Ia adalah Raja Siantar yang menolak tunduk dengan menolak menandatangani *Korte Verklaring*, walaupun harus dimakzulkan (diturunkan paksa) dari jabatannya sekaligus dibuang (internir) ke Bengkalis (Damanik dan Dasuha, 2015)⁹⁵. Keteladanan dan ketokohan Sang Nauuluh Damanik kala itu sangat relevan dengan nilai-nilai *HdB* yang menjadi falsafah sosial orang Simalungun.

⁹⁵Lihat Erond L. Damanik dan Juandaharaya Dasuha. 2015. *Kerajaan Siantar: Dari Pulau Holang ke Kota Pematangsiantar*. Medan: Simetri Institute.

Demikian halnya pada era kemerdekaan, sejumlah politisi Simalungun seperti Kaliamsjah Sinaga, Djomat Purba, Madja Purba, Djaidin Purba, T. Mardjans Saragih, Lahiradja Munthe dan lain-lain patut menjadi panutan yang berjuang bagi Simalungun. Meskipun perjuangan mereka kerap kali menemukan hambatan seperti kegagalan perjuangan pemulihan swapraja Simalungun lewat Negara Sumatra Timur (Kaliamsjah Sinaga, Djomat Purba, dan Djaidin Purba) tetapi upaya tersebut menjadi sinyal penting bahwa mereka itu mencerminkan '*habonaron*' bagi martabat orang Simalungun. Demikian pula sejumlah tokoh seperti Djariaman Damanik yang turut mendukung dan memprakarsai partai politik bernaung Simalungun sebagai cara mendukung masuknya sejumlah orang Simalungun di kancah politik nasional sesuai ukuran jamannya.

Pada era modern di Orde Baru muncul tokoh Cosmas Batubara sebagai seorang menteri yang dapat dicontoh sebagai teladan bagi orang Simalungun. Demikian halnya Bungaran Saragih yang muncul dipermukaan politik nasional pada Era Reformasi patut menjadi panutan bagi orang Simalungun. Dalam suatu perbincangan dengan Bungaran Saragih di Medan pada Desember 2016⁹⁶ misalnya, diperoleh informasi menyoal sejumlah hambatan, tantangan dan persoalan ketika diminta kesediaanya menjadi Menteri Pertanian oleh Presiden RI, Abdurahman Wahid (Gus Dur). Akan tetapi, dengan keyakinan terhadap spirit (semangat) *Habonaron*, akhirnya Bungaran Saragih diangkat menjadi Menteri Pertanian hingga tahun 2005 walaupun kepemimpinan Gus Dur beralih ke Megawati Soekarno Putri.

Sejumlah birokrat lain adalah seperti Ibnu Hajar Damanik yang pernah menduduki jabatan Rektor Universitas Negeri

⁹⁶Pertemuan itu terjadi di Hotel J.W Marriot Medan. Penulis sama sekali belum pernah bertemu dengan tokoh ini walaupun sudah sering mendengar ketokohnya baik sebagai seorang menteri maupun pengajar (dosen) di IPB Bogor.

Medan (2011-2015), ataupun seperti Rizal Martua Damanik (salah satu Deputi di BKKBN RI), Abdul Kadir Damanik (salah satu deputi di Kementerian Koperasi RI), Pieter Damanik yang pernah menjadi Duta Besar RI di Philipina dan lain-lain. Barangkali masih terdapat sejumlah nama-nama birokrat dan politisi Simalungun yang mencerminkan *HdB* yang berjuang bagi modernisasi dan kemajuan Simalungun yang tidak dapat ditampilkan dalam naskah ini. Tetapi, juga terdapat sebagian kecil nama-nama birokrat dan politisi Simalungun itu mencederai *HdB* akibat terjebak pragmatisme dan transaksionalisme dewasa ini. Tidak sedikit pula orang Simalungun yang '*berwajah ganda*' (ambigu) seperti menjadi pengusaha hitam, politisi kotor, birokrat korup, patronase barbar (kolusi dan nepotisme serta *Asal Bapak Senang*), dan lain-lain hanya karena menyangkut kepentingan (*interest*) dan lain-lain yang harus memalingkan diri dari nilai-nilai *HdB*.

Berangkat dari uraian diatas, maka menempatkan *HdB* pada era modern sekarang ini ialah mendudukan 'kebenaran' (*habonaron*) sebagai sokoguru setiap kegiatan sosial baik berfikir, berperilaku dan bertindak. Orang Simalungun dalam setiap kompetisi, kontestasi dan profesi, ataupun persaingan mendapatkan pekerjaan dan kekuasaan tidak perlu takut membicarakan serta berbicara tentang kebenaran. Hal ini karena kebenaran itu akan tetap dan selamanya menjadi acuan dalam interaksi dan komunikasi sosial yang sama seperti pencarian kebenaran dalam lingkungan saintifik.

Perdebatan-perdebatan yang terjadi seputar mencari 'kebenaran' adalah persoalan proses dan pada akhirnya kebenaran akan terungkap. Justru, keterungkapan kebenaran itu pada akhirnya akan merujuk pada pencetus (pengagas) awal yang pada kesempatan itu, orang Simalungun sesuai dengan falsafah *HdB* dapat menjadi pertimbangan atau dipertimbangkan. Justru, keteladanan orang Simalungun dewasa ini adalah terletak pada kekukuhan pada kebenaran itu sendiri walaupun harus bersaing dengan kompetitor lain. Pada

bagian ini, masuknya beberapa nama Simalungun pada jajaran politik nasional ataupun menjadi birokrat nasional adalah salah satu kontribusi dari nilai-nilai *HdB* itu sendiri. Dalam arti bahwa, kemampuan mencari jejaring yang tepat yakni siapa yang menjadi ‘sahabat’ ataupun memilih ‘perahu’ yang cocok menjadi ‘pemenang’ dalam persaingan di era globalisasi dewasa ini.

Karena itu, orang Simalungun yang memiliki falsafah *HdB* harus menjadikan *HdB* itu sendiri sebagai virus sukses yang mirip dengan *Need for Achievement* sebagaimana pada masyarakat Kakinada yang disebut McClelland itu. Lain daripada itu, orang Simalungun yang memiliki nilai-nilai *HdB* itu harus piawai membaca dan menafsirkan kenyataan (realitas) sosial (*social reality*) baik secara dramaturgis maupun interaksionisme simbolik. Kemampuan kedua perspektif interaksi dan komunikasi sosial ini dapat menjadikan orang Simalungun sebagai sosok yang tangguh, merdeka, berpengetahuan dan pandai membaca situasi. Ini berarti bahwa, *HdB* tidak saja menjadi sekedar falsafah sosial yakni seloka atau semboyan sosial, tetapi menjadi acuan nilai dan etika sosial sekaligus menjadi spirit atau motivasi berprestasi. Pada konsepsi *HdB* sebagai acuan nilai dan etika sosial maupun motivasi berprestasi ialah berintikan kebenaran (*habonaron*) yakni kemampuan menyuguhkan dan berbicara dengan benar.

F. Refleksi abad 21

HdB adalah klausa yang berarti: ‘*Keberanian sebagai Pangkal*’ (segalanya). Klausa sekaligus falsafah sosial orang Simalungun ini bersifat universal, umum dan mendasar. *HdB* tidak ahistoris, tetapi bersumberkan nilai-nilai kultural Simalungun. Demikian pula *HdB* tidak partisan namun bersifat umum, universal dan mendasar yang menjiwai setiap pribadi-pribadi orang Simalungun. Selain itu, *HdB* tidak temporer tetapi cenderung permanen dan mendasar karena nilai-nilai universalitas yang terkandung didalamnya. Karena itu, falsafah *HdB* dan nilai-nilai

yang terkandung didalamnya masih sangat relevan dengan abad 21 saat ini. Namun demikian, penerapan (implikasi) *HdB* dan nilai-nilai yang dikandungnya itu pada abad 21 ini sepertinya mengalami kesulitan karena pragmatisme, transaksionalisme dan klaim-klaim kebenaran yang terjadi.

Abad 21 sekarang ini lebih dikenal sebagai bagian globalisasi yakni sebuah konsep pemahaman mengenai kompresi ruang dan waktu. Globalisasi menjadi suatu keharusan dan periodisasi perkembangan zaman dimana terdapat intensifikasi proses integrasi masyarakat di berbagai negara menjadi masyarakat dunia. Pada saat ini, dunia seolah kehilangan batas-batasnya dan bergerak menjadi '*global village*' atau Desa Buwana (McLuhan, 1994)⁹⁷. Ketiadaan batas-batas atau sekat waktu dan jarak manusia antara negara dewasa ini menjadi babak baru dalam revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak pada lahirnya generasi milenial. Adapun yang disebut dengan generasi milenial ini adalah individu ataupun manusia virtual (*human virtual*) yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai *electrical fashion* seperti selular pintar (*smarthphone*), telepon genggam (*handphone*), *gadget*, *laptop* ataupun *personal computer* yang tersambung ke 'jaringan internasional' atau internet.

Meskipun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mutakhir di abad 21 ini mempermudah kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya termasuk hankam, tetapi apabila media itu digunakan secara negatif akan menimbulkan manusia atau individu yang kerdil dan tandus pengetahuan. Kemajuan teknologi informasi dalam bidang politik misalnya, semakin membuka mata dunia tentang kehidupan politik itu sendiri. Kampanye hitam (*black campaign*) lewat media menghasilkan manusia milenial yang rasis, fundamentalis, dan radikal sebagai *multiplayer* efek media *hoax*. Dengan mudah, setiap pribadi

⁹⁷Lihat Marshall McLuhan. 1994. *Understanding Media: The Extension of Man*. London: The MIT Press.

mengunggah pendapat, foto termasuk foto editan, ujaran dan lain-lain untuk menyebar kebencian antar sesama manusia.

Penonjolan diri lewat *web* (situs) atau media sosial lain seperti *Facebook*, *twitter*, *Whatsapps*, dan lain-lain dengan *statemen* di berandanya menjadi senjata mudah memamerkan individu. Lewat *chat* atau *short message services (SMS)*, semua klaim kebenaran dapat dengan mudah disebarluaskan. Ironisnya, keterbatasan informasi sekaligus klaim kebenaran yang ditunjukkan lewat media itu seringpula dikonsumsi menjadi kebenaran tunggal tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu. Situasi ini berdampak pada kurangnya penilaian terhadap tokoh dan yang muncul kemudian adalah klaim kebenaran oleh sang tokoh yang ditonjolkan. Inilah yang terjadi pada politisi di Senayan, atau bahkan sewaktu kontestasi Kepala Daerah di Indonesia.

Globalisasi juga berdampak pada terciptanya *consumer society*. Menurut Featherstone (1988)⁹⁸ budaya konsumen (*consumer society*) adalah ciri materialis dan tindakan mementingkan diri sendiri yang hedonistis dimana individu memusatkan kehidupannya pada konsumsi barang-barang. Budaya konsumen yang merupakan jantung dari kapitalisme adalah sebuah budaya yang di dalamnya terdapat bentuk halusinasi, mimpi, artifisialitas, kemasan wujud komoditi, yang kemudian dikonstruksi sosial melalui komunikasi ekonomi (iklan, show, media) sebagai kekuatan tanda (*semiotic power*) kapitalisme. Penulis seperti Baudrillard (1997)⁹⁹ menyebut bahwa masyarakat Postmodernis dewasa ini dikonstruksi menjadi masyarakat konsumtif pada empat hal: i) *food*

⁹⁸Lihat Mike Featherstone. 1988. Budaya Konsumen, Kekuatan Simbolis dan Universalisme, dalam *Teori Masyarakat: Proses Peradaban dalam Sistem Dunia Modern* (Hans-Dieter Evers, ed). Jakarta: Obor Indonesia.

⁹⁹Lihat Jean Baudrillard. 1997. *The Consumer Society: Myths and Structures*. London: Sage Publications.

(makanan dan minuman), ii) *fashion* (pakaian), iii) *electrical fashion* (barang elektronik) dan iv) *recreation* (bepergian).

Keadaan ini berdampak pada adanya gaya hidup (*life style*) yang menurut Chaney (2004)¹⁰⁰ terkait erat dengan citra (*image*). Artinya, konsumsi dewasa ini bukan lagi sebatas pemenuhan kebutuhan material, tetapi cenderung kepada pemenuhan mimpi (*dreams*), hasrat (*desire*), identitas (*identity*) dan komunikasi (*communication*). Keadaan ini berimplikasi pada generasi milenial yang konsumtif yang nirkreatifitas. Pada akhirnya, sikap malas berfikir dan bertindak, atau lebih cenderung pasrah pada nasib menjadi lebih menonjol. Bahkan, sebagian masyarakat di Negara Berkembang seperti Indonesia, perkembangan teknologi informasi dewasa ini berdampak pada terbentuknya manusia konsumtif.

Globalisasi pada dasarnya merupakan istilah bebas nilai yang artinya globalisasi ini tidak terikat pada produk wacana tertentu dan bebas dipakai bagi siapapun untuk melihat perubahan dunia yang semakin solid dan multidimensional dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun hal lainnya sebagai akibat dari adanya kompresi ruang dan waktu yang dihasilkan perkembangan teknologi. Sebagaimana disebut Littlejohn dan Foss (2009)¹⁰¹, salah satu produk globalisasi yang memainkan peranan seperti itu adalah keberadaan media maupun teknologi komunikasi dan informasi. Produk globalisasi ini menjadi signifikan artinya bagi manusia guna mengakomodasi dan memediasi proses penyebaran informasi sehingga menjadi *mainstream* globalisasi itu sendiri. Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini adalah kemuculan klaim-klaim kebenaran atas wacana kebenaran. Hakikat kebenaran sering tertutupi wacana kebenaran karena intensitas waktu yang lebih mengedepankan wacana kebenaran itu. Klaim

¹⁰⁰Lihat David Chaney. 2004. *Lifestyle: Sebuah Pengantar Komprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra.

¹⁰¹Lihat S.W. Littlejohn and K.A. Foss. 2009. *Encyclopedia of communication theory*. CA: SAGE Publications.

kebenaran itu tidak saja menyoal ekonomi (kapitalisme), tetapi juga menerobos jauh ke dalam aspek lain seperti politik, hegemoni bangsa, kebudayaan seperti budaya pop (*cultural pop*) maupun budaya massa (*mass culture*) dan lain-lain.

Demikian pula bahwa globalisasi dengan misi kompetisi yang seharusnya sehat berubah menjadi tidak sehat. Penumpukan kapital lewat monopoli seperti *online shop* sebagai lawan *offline shop* kerap menghadirkan penipuan-penipuan. Teknologi *Pembayaran Elektronik (e-pay)* sebagai dampak Perdagangan Elektronik (*e-Commerce*) menjurus kepada monopoli yang mereduksi penggunaan sumberdaya manusia. Karena itu, lapangan kerja secara informal cenderung berkurang yang digantikan dengan kreatifitas manusia di abad modern. Pada intinya, abad 21 sekarang ini memperlihatkan suatu situasi dan kondisi yang memaksa masyarakat harus berubah mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri. Pada bagian ini, masyarakat dituntut untuk bertindak, berfikir dan berperilaku yang mencerminkan kebenaran. Jika segudang persoalan menyangkut globalisasi dengan corong utamanya dewasa ini adalah teknologi informasi dan komunikasi, maka kedudukan *HdB* sangat penting menyikapi *global village* dewasa ini.

Urgensi dan signifikansi *HdB* itu adalah selalu mencerminkan kebenaran (*habonaron*) sebagai sokoguru pemikiran, perilaku dan tindakan sosial. Hal ini disebabkan bahwa kebenaran tidak akan pernah mati dan tergantikan, tetapi kebenaran itu tetap abadi. Sebagaimana disebut Saragih (2017) bahwa *HdB* adalah '*Kebenaran adalah Pangkal*' maka kebenaran itu sendiri tetap dicari dan menjadi acuan pada kehidupan sosial. Beberapa acuan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut dibawah ini:

1. Nilai-nilai *HdB* dalam menggunakan produk globalisasi harus berintikan kebenaran dan bukan *hoax* (berita bohong). Dalam hal ini, setiap orang Simalungun harus dibekali dengan pengetahuan guna memilah media yang

- memberitakan kebenaran dan bukan wacana kebenaran sebagai klaim terhadap kebenaran itu sendiri.
2. Nilai-nilai *HdB* termasuk tidak melakukan tindakan persekusi (*bullying*) karena tindakan persekusi ini menggambarkan perilaku yang tidak menghargai asasi manusia itu sendiri. Karena itu, orang Simalungun yang memegang teguh prinsip *HdB* ialah pribadi-pribadi yang mengutamakan kebenaran dalam hidupnya termasuk tidak melakukan tindakan pem-bully-an terhadap orang lain di media sosial.
 3. Dalam bidang politik, *HdB* mengandung kebenaran bahwa nilai-nilai *HdB* sangat relevan dengan dunia abad 21. Orang Simalungun yang memegang teguh *HdB* ini tidak akan melakukan praktek-praktek yang merugikan negara dan masyarakatnya, tetapi berani menyuarakan kebenaran demi kepentingan masyarakat dan negara. Nilai-nilai *HdB* pada abad 21 ialah tercermin pada kemampuan membentuk jejaring sosial dan pemilihan institusi sosial sehingga mampu terpilih dan dipilih menjadi politisi dan birokrat yang benar.
 4. Pada aspek sosiokultural, maka konsumerisme pada abad 21 tidak dapat dihindari. Karena itu, setiap pribadi harus bijak dalam pemenuhan kebutuhan material dan bukan pada konsumsi mimpi, hasrat, identitas dan komunikasi. Nilai-nilai *HdB* pada aspek budaya konsumen ini ialah bijak mengkonsumsi produk-produk yang ditawarkan abad modern sekarang. Gaya hidup yang mencitrakan *HdB* adalah kesederhanaan atau kesahajaan tanpa menjadi kampungan. Dengan demikian, *HdB* pada aspek ini lebih mendorong setiap individu lebih bijak dalam menggunakan, mengkonsumsi dan memilih sesuatu yang difokuskan pada utilitasnya.
 5. Persaingan(kompetisi) pada abad terjadi lebih intensif dimana kompetisi itu membutuhkan manusia-manusia yang tangguh dan terandalkan. Mereka ini adalah

manusia yang *up to date* (mutakhir) dan cenderung bertindak menasionalkan atau menginternasionalkan Simalungun. Jadi, nilai-nilai *HdB* pada kompetisi ini adalah mengangkat harkat dan martabat Simalungun pada lingkup global seperti menjadi ilmuwan, birokrat, politisi, profesional, pengusaha yang lintas regional.

G. Penutup

Naskah ini tidak disusun dalam lingkup regional Simalungun saja, tetapi cenderung melihat *HdB* itu pada perspektif global, yaitu Simalungun yang meng-Indonesia atau Simalungun yang meng-internasional. Dalam situasi seperti ini, apakah nilai-nilai *HdB* itu masih relevan dengan situasi sosial di abad 21?.

Naskah ini menyimpulkan bahwa *Habonaron do Bona* adalah sikap mental orang Simalungun. Sikap mental ini ada dalam kepala setiap orang Simalungun yang difungsikan guna menilai dan memahami situasi sosial (*social situation*). Sikap mental ini diturunkan dari dalam kepala setelah menilai dan memahami situasi sosial yang kemudian dielaborasi menurut emosi dan logikanya dan kemudian direalisasikan lewat perilaku dan tindakan kolektifnya. Karena itu, sikap mental yang dikandung *HdB* yakni nilai-nilai kebenaran (*habonaron*) menjadi tolak ukur (parameter) setiap orang Simalungun guna menilai dan memahami situasi sosialnya.

Karena kedudukan *HdB* sebagai virus mental, maka nilai-nilai *HdB* dapat difungsikan sebagai virus mental mencapai keberhasilan (kesuksesan). Kebenaran (*habonaron*) yang menjadi inti sikap mental ini adalah fundamental (mendasar) dan universal yang paling cocok dalam setiap periode dan kondisi apapun. Namun demikian, sebagai virus mental, *HdB* masih memerlukan penjelasan berupa dasar-dasar operasional pada perealisasiannya.

HdB merupakan fungsi ujaran pernyataan (*statement*) yang memberikan informasi yang disampaikan secara deklaratif.

Klausa *HdB* terdiri dari tiga kata *Habonaron* (kebenaran), *do* (pemarkah, penegas) dan *bona* (pangkal) yang diartikan sebagai ‘*kebenaran adalah dasar*’. Klausa ini bersifat umum dan universal yakni kebenaran merupakan titik awal segala sesuatu proses. Proses dimaksud ialah sebagai sumber dari segala sumber ilmu, etika, moral, pengetahuan, perilaku sosial, tindakan sosial dan lain-lain yang operasionalnya harus dirumuskan dengan mencerminkan kepribadian dan karakter kultural orang Simalungun. atas dasar itu, *HdB* pada abad 21 masih sangat relevan kedudukannya pada berbagai situasi sosial seperti politik, hukum, sosial, budaya, seni, agama, pembangunan, adat istiadat, interaksi dan komunikasi sosial, kontestasi, kompetisi, dan lain-lain.

Daftar Rujukan

Anderson. John,

1971 *Mission to the east cost of Sumatera in 1832*. London, New York: Oxford University Press.

Baudrillard. Jean,

1997 *The Consumer Society: Myths and Structures*. London: Sage Publications.

Bertens. Kimpul,

1999 *Sejarah Filsafat Yunani* (edisi revisi). Yogyakarta: Kanisius.

2007 *Etika*. (cet. 10). Jakarta: Gramedia.

Berger. Peter L., dan Luckman. Thomas,

1990 *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah risalah tentang Sosiologi pengetahuan*. (terjemahan). Jakarta: LP3ES

Bell. Daniel,

1962 *The End of Ideology*. London: The Free Press.

Blumer. Herbert,

1957 “Collective Behavior”, dalam Gitler J.B. (ed.), *Review of Sociology: Analysis of a Decade*. New York: John Wiley and Son.

- Chaney. David,
2004 *Lifestyle: Sebuah Pengantar Komprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Damanik. Djariamman., Saragih. Jan Berlizon., dkk.
1984 *Hasil Lokakarya Habonaron do Bona*. Pematangsiantar: Universitas Simalungun.
- Damanik, Jan J., dan Sinaga. Salmon,
2013 *Permahan Ulang Gabe Iparmahani: Mengenang dan Belajar dari Pelayanan Pdt. A. Wilmar Saragih, 1916-1962*. Medan: Galasibot.
- Damanik. Erond L., dan Dasuha. Juandaha Raya Purba,
2016 *Kerajaan Siantar: Dari pulau Holang ke Kota Pamatangsiantar*. Medan: Simetri Institut.
- Damanik. Erond L.
2017 *Nilai budaya: Hakikat karya dan orientasi hidup Orang Simalungun*. Medan: Simetri Institut.
2017 *Agama, perubahan sosial dan identitas etnik: Moralitas agama dan kultural di Simalungun*. Medan: Simetri Institut.
2017 *Dalih Pembunuhan Bangsawan: Perspektif hapusnya swapraja Simalungun Maret 1946*. Medan: Simetri Institut.
2015 *Amarah: latar, gerak dan ambruknya swapraja Simalungun, 3 Maret 1946*. Medan: Simetri Institute.
- Damanik. Ibnu Hajar,
2017 *Habonaron do Bona: Mewujudkan Manusia Simalungun yang Unggul dan Kompetitif Menjawab Tantangan Abad ke-21*. Makalah. Disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) “Aktualisasi dan Implementasi Habonaron do Bona pada Masyarakat Simalungun di Abad ke-21”, Sabtu 12 Agustus 2017 di Hotel Polonia Medan
- Dasuha. Juandaharaya P.
2017 *Habonaron Do Bona: Makna filosofis pada pelaksanaan adat istiadat Simalungun*. Makalah. Disampaikan pada

- Focus Group Discussion (FGD)* yang diadakan MHN PMS, Medan, 12 Agustus 2017 di Hotel Polonia Medan.
- Dasuha. Juandaraya P., dan Sinaga. Martin Lukito,
2003 *Tole den Timorlanden das Evangelium: Sejarah Seratus Tahun Pekabaran Injil di Simalungun, 2 September 1903-2003*. Pamatang Siantar: Kolportase GKPS.
- Featherstone. Mike,
1988 *Budaya Konsumen, Kekuatan Simbolis dan Universalisme*, dalam *Teori Masyarakat: Proses Peradaban dalam Sistem Dunia Modern* (Hans-Dieter Evers, ed). Jakarta: Obor Indonesia.
- Fukuyama. Francis,
1992 *The End of History and the Last Man*. London: Free Press.
- Goffman. Erving,
1959 *Presentation of Self in Everyday Life*. Social Science Research Center, University of Edinburgh. Anchor Books paperback, New York: Doubleday & Company Inc.
- Hatta. Mohammad,
1986 *Alam Pikiran Yunani*. Jakarta: UI-Press.
- Hamersma. Harry,
1983 *Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Hardiman. F. Budi,
1990 *Kritik Idiologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Higgin. Graham,
2000 *Porcupines: A Philosophical Antologi*. England: Penguin Books.
- Huntington. Samuel P.,
1996 *The Clash of Civilization and Remarking of World Order*. New York: Simon & Schuster.
- Inkeles. Alexs and Smith. David H.
1974 *Becoming Modern: Individual Change in Six Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press.

- Kluckhohn. Clyde,
 1962 *The Human Meaning of The Social Science, Universal Categories of Culture*, dalam A.L. Kroober (editor), *'Anthropology Today'*. Chichago: Chichago University Press.
- Kian-wie. Thee,
 1977 *Plantation Agriculture and Export Growth: an Economic History of East Sumatera, 1863-1942*. Jakarta: Leknas LIPI.
- Littlejohn. S.W., and Foss. K.A.,
 2009 *Encyclopedia of communication theory*. CA: SAGE Publications.
- Ma Huan.
 1970 *Ying Yai Sheng Lan: The Overall Survey of the Oceans Shores*. (Feng Cheng-Chun, ed). Cambridge: Hakluyt Society.
- Mead. George Herbert,
 1932 *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press.
- Mustansyir. Rizal., dan Munir. Misnal,
 2012 *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muthahhari. M.,
 2002 *Filsafat Hikmah Pengantar Pemikiran Shadra*. Bandung: Mizan.
- McLuhan. Marshall,
 1994 *Understanding Media: The Extension of Man*. London: The MIT Press
- McClelland. David C.
 1961 *The Achieving Society*. Princenton: D. Van Nostrand Company.
- Poerwadarminta. W.J.S.,
 2003 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Purba. Sarmedi
 2017 *Habonaron do Bona: Perspektif politik di Simalungun*. Makalah. Disampaikan pada *Focus Group Discussion*

(FGD) yang diadakan MHN PMS, Medan, 12 Agustus 2017 di Hotel Polonia Medan.

Saragih. Amrin,

2017 *Habonaron do Bona: Perspektif linguistik, semiotik dan filosofis*. Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion: Aktualisasi dan Implementasi Habonaron Do Bona dalam Kehidupan Masyarakat Simalungun Abad 21, Hotel Polonia, Medan 12 Agustus 2017.

Suseno. Franz Magnis,

2005 *Pijar-pijar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.

Suriasumantri. Jujun S.,

2001 *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Suseno. Franz Magnis

1987 *Etika Dasar*. Yogyakarta: Kanisius.

Sumbayak. Djapiten,

2005 *Refleksi Habonaron Do Bona dalam adat Budaya Simalungun*. Pematang Siantar.

Takwin. Bagus,

2001 *Filsafat Timur: Sebuah Pengantar ke Pemikiran-pemikiran Timur*. Yogyakarta: Jalasutra.

BAB X PENUTUP

A. Kesimpulan

HdB adalah falsafah sosial berupa pandangan dunia (*weltanschauung*) dan pandangan hidup (*lebenanschauung*) orang Simalungun. *HdB* adalah cita-cita orang Simalungun yang berasal dari nilai-nilai luhur kultural. Karena itu, *HdB* adalah adiluhung dan adicita yang bersifat universum. Sebagai universum, *HdB* melintasi setiap identitas kultural dan agama bagi orang Simalungun. Karena itu, *HdB* adalah sikap mental orang Simalungun yang terbentuk guna menilai dan memahami setiap situasi sosial.

HdB ditemukan pada manuskrip (*pustaha*) kuno Simalungun yakni *Parpandangan Na Bolag* (*PNB*) yang mengisahkan formasi Kerajaan Nagur Simalungun (abad 11-17 masehi) serta *Parmongmong Bandar Sahuda* (*PBS*) yang mengisahkan formasi Kerajaan Siantar (abad 15-pertengahan abad 20 masehi). Dalam kedua kitab kuno Simalungun itu, *HdB* ditemukan berulang kali sebagai penegasan hidup tentang pengetahuan (*knowing*), merasa (*feeling*) dan bertindak (*acting*) sesuai dengan kebenaran (*truth*). Karena itu, *Habonaron do Bona* (*the Truth is the Basic*) adalah cerminan atau gambaran pangkal hidup orang Simalungun adalah 'Kebenaran' (*truth*). Jadi, *Habonaron do Bona* (Kebenaran adalah pangkal segalanya) dasar berfikir, merasa dan bertindak bagi orang Simalungun.

Secara linguistik, frasa *HdB* memiliki makna 'Kebenaran adalah pangkal segalanya'. Ia adalah referensi personal dan kolektif orang Simalungun, sumber motivasi dan konstruksi simbol sosial guna menafsir dunia sosial (*understanding of social world*). Karena itu, setiap orang Simalungun dimanapun berada memiliki kewajiban memelihara *Habonaron* (kebenaran) sebagai pangkal (*bona*) dari seluruh aktifitas hidupnya, relasi sosialnya, maupun mencapai tujuan hidupnya.

Demikian pula setiap orang lain yang datang dan bermukim di Tanah Simalungun (*Tanoh Simalungun*), wajib memerankan pengetahuan, merasa dan bertindak sesuai dengan prinsip *HdB*. Dalam arti kata, setiap orang (imigran) yang berbeda kebudayaan dengan Simalungun dan tinggal menetap atau temporer di Simalungun (Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun) wajib mengindahkan falsafah Simalungun ini. Mereka adalah *sidapot soluk* yang wajib menghormati dan menghargai orang Simalungun terlepas dari pekerjaan, aliran politik, jabatan, agama, strata sosial, atribut kultural dan lain-lain.

HdB yang mengakar pada kebudayaan Simalungun sebagaimana dicantumkan pada Kitab *Parpandanan Na Bolag* (*PNB*) dan *Parmongmong Bandar Sahuda* (*PBS*), dirumuskan sebagai falsafah Simalungun dan kemudian menjadi motto Kabupaten Simalungun sejak tahun 1964. Perumusan itu berkaitan dengan *Seminar Kebudayaan Simalungun Pertama* di Siantar. Kemudian, pada tahun 1982, diselenggarakan *Seminar HdB* sebagai cara memutakhirkan falsafah itu pada pandangan dunia dan pandangan hidup orang Simalungun. Dari uraian ringkas ini, *HdB* sebagai falsafah hidup orang Simalungun memiliki makna sebagai berikut:

- a. *HdB* adalah referensi personal, sumber motivasi dan konstruksi sosial untuk menafsirkan dunia sosial (*personal reference, source of motivation and social construction of understanding social world*).
- b. *HdB* adalah adiluhung dan adicita orang Simalungun dalam berfikir (*knowing*), merasa (*feeling*) dan bertindak (*acting*) dalam dunia sosial (*social world*).
- c. *HdB* adalah pandangan dunia (*weltanschauung*) dan pandangan hidup (*lebenanschauung*) orang Simalungun dalam relasi sosial serta pencapaian cita-cita sosial.
- d. *HdB* adalah sumber nilai (*source of value*) yang memiliki makna (*meanings*) dalam kehidupan sosial orang Simalungun.

- e. *HdB* adalah sumber hukum sosial (*social law*) yakni norma-norma yang dipegang (*held norms*) dalam berfikir, merasa dan bertindak pada kehidupan sosial orang Simalungun.

B. Rumusan FGD *HdB* abad 21.

HdB sebagai falsafah hidup orang Simalungun, masih sangat aktual (*up to date*) bagi kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Ibarat virus, *HdB* adalah 'benih' yang disuntikkan ke kepala setiap orang Simalungun sehingga membentuk pribadi atau karakternya yang mencerminkan 'kebenaran' (*habonaron*) sebagai pangkal (*bona*) dalam berfikir, merasa dan bertindak. Karena itu, orang Simalungun memiliki keistimewaan tersendiri yang mengimplementasikan semangat *habonaron* dalam setiap perilaku dan tindakan sosialnya. Dari lima narasumber utama (*keynote speaker*) pada diskusi, berikut disimpulkan dibawah ini:

Pertama, *HdB* sangat aktual di abad 21 dan bersifat universum yang formasinya berasal dari persinggungan antara agama dan kebudayaan Simalungun. Sifat universum ini, melintasi agama Islam, Khatolik, Protestan dan lain-lain maupun melintasi kultur orang Simalungun. Karena itu, *HdB* adalah moralitas agama dan budaya yang menjadi cermin orang Simalungun berperilaku sosial. Kebenaran dalam agama adalah mutlak (absolut). Karena itu, seluruh aktifitas kehidupan harus mengacu pada kebenaran sama seperti manusia beragama yang harus mengalami kebenaran agamanya masing-masing. Karena itu, *HdB* tidak bertentangan dengan agama, tetapi agama menginspirasi *HdB* sehingga tampak berbudaya dan beragama.

Kedua, *HdB* sangat aktual di abad 21 dan menjadi acuan perilaku politik (*political behavior*) orang Simalungun yang mengedepankan tindakan dan perilaku benar (*bonar*). Kebenaran (*habonaron*) dalam kehidupan sosialpolitik terutama di upayakan mencapai kehidupan bersama orang Simalungun. Tujuan utama politik adalah mencapai tujuan bersama yang

diterjemahkan sebagai cara mencapai ‘tujuan bersama orang Simalungun’.

Ketiga, HdB sangat aktual di abad 21 dan menjadi virus kepribadian dan karakter orang Simalungun pada kehidupan sosial. Sebagai virus, HdB masih aktual dalam kehidupan sosial orang Simalungun yang seharusnya mengejawantah (mendarah daging) pada setiap orang Simalungun dalam hal: i) berfikir atau mengetahui (*knowing*), ii) merasa (*feeling*) dan iii) bertindak (*acting*). Dengan demikian, virus HdB menjadi sumber etika moral yang membentuk kepribadian dan karakter setiap orang Simalungun. Jika, McClelland mempopulerkan virus *Need for Achievement* (*N Ach*) sebagai virus sukses masyarakat modern, maka virus *HdB* Simalungun harus menjadi referensi personal, sumber motivasi dan konstruksi simbol sosial guna menafsir dunia sosial.

Keempat, HdB sangat aktual di abad 21 dan menjadi simbol (perlambang) identitas orang Simalungun. Dari aspek linguistik, semiotik dan filosofis, HdB bersumber dari Bahasa Simalungun yang memiliki keistimewaan sebagai rumpun bahasa Austronesia. Susunan frasa ‘*Habonaron*’, ‘*do*’ dan ‘*bona*’ (*the truth is the basic*) tidak dapat dirubah sehingga menonjolkan dan melegitimasi ‘kebenaran’ sebagai pangkal dari segalanya. Falsafah HdB mencerminkan kepribadian orang Simalungun yang menegaskan bahasa sebagai salah satu identitasnya.

Kelima, HdB sangat aktual di abad 21 dan menjadi pengikat tata istiadat orang Simalungun yang cenderung beragam. Keragaman dialek, bahasa, atribut kultural maupun tata adat istiadat, sebagai dampak etnoteritorial Simalungun dikelilingi kebudayaan lain seperti Melayu, Karo dan Toba. Perbedaan-perbedaan identitas kultural dan agama itu berpengaruh terhadap identitas etnik Simalungun terutama pelaksanaan tata istiadatnya. Konsep HdB dalam kaitanya dengan aspek tata istiadat ini melintasi perbedaan-perbedaan dialek kultural. Karena itu, walaupun internal Simalungun memiliki perbedaan

dalam tata istiadat adat, tetapi *HdB* menjadi landasan moral, etika, hukum dan sosial orang Simalungun.

Jika *HdB* sebagai falsafah orang Simalungun masih sangat aktual pada abad 21, maka kecenderungan itu sedikit berbeda dengan implementasinya pada kehidupan sosial budaya Simalungun. Adapun '*gab*' implementasi *HdB* pada abad 21 adalah sebagai berikut:

Pertama, implementasi *HdB* dalam kehidupan sosial masih semata-mata menjadi falsafah atau slogan saja yang belum memiliki dampak sosial bagi kesetiakawanan dan solidaritas etnik Simalungun. Dalam artikata, *HdB* masih sebatas adiluhung dan adicita saja sementara implementasi sosialnya belum menampak. Orang Simalungun masih saja mengkategorikan sesamanya berdasarkan agama, sejarah asal usul, membedakan klan (*marga*), ataupun membedakan atribut kulturalnya. Dengan begitu, *HdB* belum mengejawantah (*mendarahdaging*) bagi orang Simalungun.

Kedua, implementasi *HdB* dalam kehidupan sosiopolitik belum mencerminkan nilai-nilai kultural Simalungun. *HdB* belum mewarnai kehidupan politik guna mewujudkan demokrasi ke arah yang lebih baik. Masih saja ada orang Simalungun yang terlibat pragmatisme dan transaksionalisme yang mencederai kehidupan sosiopolitik. *HdB* dalam kehidupan politik Simalungun harus menjadi sumber luhung dalam kehidupan demokrasi yang mengarusutamakan orang Simalungun menjadi kepala daerah, kepada dinas, camat, pengurus partai, dan lain-lain. Karena itu, konsep *HdB* dalam kehidupan politik ini memberi arah pada kehidupan sosiopolitik di Simalungun guna mencapai tujuan bersama di Simalungun.

Ketiga, implementasi *HdB* secara sosiologis belum berdampak secara sosial bagi orang Simalungun. Secara sosiologis, *HdB* harus menjadi referensi personal, sumber motivasi dan konstruksi sosial guna menafsir dunia sosial yakni berfikir, merasa dan bertindak dengan cara benar. Karena itu,

HdB adalah virus kepribadian dan karakter yang mengejawantah terhadap layanan sosial, birokrasi, aparatur sipil negara, politisi dan seluruh yang berkaitan dengan kehidupan sosial orang Simalungun.

Keempat, implementasi *HdB* dalam kehidupan adat istiadat belum menciptakan kohesi dan eksistensi bagi orang Simalungun. Dalam hal kehidupan adat istiadat, *HdB* menjadi sumber norma, etika dan moral guna menjamin adanya kesetiakawanan dan solidaritas orang Simalungun. Dengan pemahaman itu, perbedaan-perbedaan tata adat istiadat Simalungun sebagai akibat persinggungannya dengan atribut kultural luar harus menjadi faktor pemersatu orang Simalungun bukan justru menjadi pemisah sesama orang Simalungun.

Kelima, implementasi *HdB* dalam kehidupan ekonomi dan filosofis belum menjadikan *HdB* sebagai sumber cita-cita kehidupan sosial. Hal ini terjadi karena adanya pemisahan antara *HdB* sebagai falsafah (ideologis) dengan kehidupan sosial. Implementasi *HdB* dalam seluruh kehidupan sosial Simalungun harus dilakukan sehingga memberikan warna khas (*particular kind*) orang Simalungun dibanding orang (etnik) lain.

C. Rekomendasi praksis

Berdasar pada rumusan diatas, diperlukan langkah-langkah dan kebijakan praksis untuk membumikan *Habonaron do Bona* (*HdB*) bagi orang Simalungun. Adapun rekomendasi praksis dimaksud adalah sebagai berikut dibawah ini:

1. Perlu adanya tim ahli dan pakar yang didukung Pemkab Simalungun untuk mengkaji secara mendalam konsepsi dan implementasi menyeluruh *HdB* pada kehidupan sosial Simalungun abad 21 yang tidak bertentangan dengan kehidupan sosial dan bernegara. Kajian itu menyangkut epistemologis, ontologis dan aksiologis sebagai referensi personal, sumber motivasi dan konstruksi sosial guna menafsir dunia sosial. Kajian ini dimaksudkan guna mengkaji nilai-nilai luhur *HdB* serta

berdampak sosial, ekonomi, politik, agama, hukum, dan lain-lain.

2. Perlu adanya rumusan mendasar tentang nilai-nilai *HdB* serta batangtubuh *HdB* dalam kehidupan sosial. Rumusan itu tidak semata-mata menjadi mencari nilai-nilai adiluhung dan adicita, ataupun menentukan posisi idiologis semata bagi orang Simalungun, tetapi memiliki indikator-indikator inti dalam implementasi sosial, kultural, ekonomi, politik, agama, hankam, adat istiadat dan lain-lain.
3. Perlu adanya referensi berupa ‘muatan lokal’ sebagai cara mewariskan nilai-nilai adiluhung dan adicita *HdB* bagi kehidupan Simalungun, termasuk indikator implementasi sosial, kultural, politik, ekonomi, layanan publik, hankam, adat istiadat dan lain-lain. Referensi ‘muatan lokal’ ini berintikan *HdB* sebagai acuan moral, etika dan norma orang Simalungun yang wajib dimiliki oleh seluruh Satuan Pendidikan (Sekolah) di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar sejak sekolah dasar hingga sekolah atas.
4. Perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) yang menetapkan *HdB* sebagai falsafah hidup orang Simalungun sekaligus motto Kabupaten Simalungun serta perangkat lain guna membumikan *HdB* secara terstandar lewat kebijakan Pemkab Simalungun.
5. Perlu adanya alat peraga sosialisasi di Kabupaten Simalungun berupa spanduk, monumen selamat datang, dan peraga lainnya yang berintikan nilai-nilai *HdB* serta indikator-indikatornya.
6. Perlu adanya kebijakan Pemkab Simalungun yang proaktif terhadap riset menyangkut sejarah, bahasa, kebudayaan, ekonomi, politik, pertanian, dan lain-lain sehingga ditemukan posisi orang Simalungun di era globalisasi tanpa sekat (*borderless*) dewasa ini.

7. Perlu adanya Cagar Budaya Simalungun bertaraf nasional seperti kompleks Rumah Bolon Pamatangpurba, bertaraf provinsi dan kabupaten sebagai cara melindungi, melestarikan dan memanfaatkan budaya Simalungun sesuai arahan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
8. Diperlukan referensi tentang Simalungun agar menjadi bacaan wajib pelajar di setiap Satuan Pendidikan (sekolah) yang tersedia di perpustakaan sekolah. Cara ini sangat efektif guna membumikan dan mewariskan serta melestarikan nilai-nilai kultural orang Simalungun bagi generasi mudanya.
9. Diperlukan dukungan Pemkab Simalungun berupa insentif bagi penelitian atau publikasi standard (Ber-ISBN) tentang Simalungun guna merangsang melimpahnya penelitian dan publikasi Simalungun.
10. Dibentuknya sebuah lembaga semacam Pusat Studi Simalungun yang berada dibawah *Partuha Maujana Simalungun* dan didanai Pemkab Simalungun.

TENTANG KONTRIBUTOR



Prof Amrin Saragih, Ph.D, MA, adalah guru Besar (Profesor) di Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) dan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Medan (Unimed). Amrin Saragih dilahirkan di Pematangbandar, Simalungun, Sumatra Utara, pada 14 Januari 1955. Dia memperoleh gelar sarjana (Drs) dari IKIP Medan (1982), *Diploma in the Teaching of English as a Foreign Language* (DTEFL) dari The University of Sydney Australia (1986), S₂ (MA) in Applied Linguistics dari The University of Sydney, Australia (1988), dan S₃ (PhD) in Linguistics dari La Trobe University, Victoria, Australia (1996) dengan disertasi *Discourse Analysis of Indonesian Newspaper Text: a Study of Reality, Action and Reaction*.

Jabatan yang pernah didudukinya adalah Pembantu Dekan I FBS Unimed (1996-2003), Asisten Direktur I Pascasarjana Unimed (2004-2006), Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing Harapan Medan (2002-2010), dan Kepala Balai Bahasa Medan (2006-2012), Rektor Universitas Simalungun (USI) dari 2014-2015. Di samping tugas utamanya sebagai dosen di Jurusan Bahasa Inggris, FBS dan LTBI Pascasarjana Unimed, Amrin Saragih menjadi dosen di Program Doktor Linguistik Pascasarjana di Universitas Sumatra Utara (USU), Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (Aceh), Pascasarjana Universitas Islam Sumatra Utara (UISU), Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (UMSU), dan Universitas Muslim Nusantara (UMN). Amrin Saragih adalah dosen tamu di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia di Universitas Syiah Kuala, Aceh sejak 2010 sampai sekarang, dosen Tamu dan Visiting Professor di Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tanjungpinang (Kepri). Amrin Saragih juga menjadi penguji luar (*external examiner*) di Universitas Udayana (UNUD) Bali, UNP (Padang),

UNM (Malang), UIN Ar-Raniri (Aceh), Universitas Utara Malaysis (UUM) di Sintok, Kedah Malaysia dan anggota *NIE Review Committee for Promotion and Tenure, National Institute of Education, Singapura*.

Prof Amrin Saragih, PhD, MA, menjabat staf ahli di Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta dari 2011-2012. Di samping menjadi pemakalah di berbagai seminar di Indonesia, dia telah menyajikan makalah dalam seminar di Australia, New Zealand, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Cina, dan Thailand. Keahliannya adalah bidang wacana. Dia telah menulis ratusan artikel ilmiah tentang bahasa dan budaya. Sejumlah buku yang sudah ditulis diantaranya adalah: *Bahasa dalam Konteks Sosial: Pendekatan Linguistik Fungsional Sistemik terhadap Tata Bahasa dan Wacana* (2006), *Fungsi Tekstual: Tema dan Rema* (2008), *Discourse Analysis* (2014), *Variation and Functional Varieties of Language* (2014), *Writing Genre* (2015), *Introducing Systemic Functional Grammar* (2016), *Semiotik Bahasa dan* (2016) *Proyeksi* (2017)



Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si., lahir di Asahan Sumatera Utara pada 20 Mei 1963. Menyelesaikan pendidikan dasar Kisaran dan Sekolah Pendidikan Guru di Tanjungbalai. Memperoleh gelar sarjana dari IKIP Medan (1986), Magister Sosiologi (1993) dan Doktor Ilmu Sosial (1998), keduanya dari Universitas Padjajaran Bandung. Merupakan anak kedua dari tujuh bersaudara. Sejak bergabung menjadi tenaga pengajar di IKIP Medan, pernah menjabat sebagai Ketua Program Pengembangan Wilayah (1998-2000) di Lembaga Pengabdian Universitas Negeri Medan.

Pernah menjadi Ketua Pusat Konsultasi Bisnis dan Penempatan kerja LPM Universitas Negeri Medan (1999-2001), Sekretaris Program Magister Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Medan (2001-2002), Sekretaris Program

PGSD Kelas Pararel Luar Kampus (2001-2003). Pernah pula dipercaya sebagai Wakil Dekan-I Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan (2005-2011) dan menjadi Rektor Universitas Negeri Medan (2011-2015). Saat ini, dipercaya sebagai Rektor Universitas Asahan (2016-2020).



Dr.med. Sarmedi Purba, Sp. OG, lahir di Pematangraya Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. Saat ini tinggal di Jalan Mesjid No 41 Pematangsiantar, Sumatera Utara. Bekerja sebagai dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan di Rumah Sakit Vita Insani Pematangsiantar. Menikah dengan dokter Gertrud Poerba Brueckl, Spesialis Penyakit Syaraf dan Penyakit Jiwa. Menyelesaikan sekolah seperti: Sekolah Rakyat 1953 di Sondiraya, SMP Negeri 2 Pematangsiantar 1956, SMA Negeri I Medan 1959, kemudian melanjutkan ke pendidikan tinggi yakni FK USU Medan 1959-1964, FK Tuebingen Jerman 1968, Doktor der Medizin Universitas Tuebingen 1968, Spesialis Obstetri Ginekologi Aerztekkammer Duesseldorf Jerman 1975.



Juandaha Raya P. Dasuha, S.Th., M.Th., Adalah seorang rohaniawan (pendeta) di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) yang berpusat di Siantar. Telah melayani di berbagai jemaat dan resort di GKPS. Pernah bekerja di Kantor Pusat GKPS dibidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Saat ini bekerja sebagai Ketua Resort di Imanuel Saribudolok, Kabupaten Simalungun. Adalah alumni Sarjana Theologia (S.Th) dan Magister Theologi (M.Th) dari Sekolah Tinggi Teologi Abdi Sabda Medan. Kekhususan kajian adalah Sejarah Gereja. Aktif menulis di surat kabar, mengisi kegiatan ilmiah maupun menulis buku dengan tema masalah-masalah sosial, budaya dan sejarah umum Simalungun.



Drs. Hisarma Saragih, M.Hum., adalah pengajar tetap di perguruan tinggi Yayasan Universitas Simalungun (USI) Pamatangsiantar. Menamatkan pendidikan sarjana Sejarah dari Universitas Sumatera Utara (1988) dan Magister Sejarah dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2000). Sejak tahun 2015, sedang menempuh pendidikan doktoral (S3) pada program studi Pembangunan di FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Simalungun dan aktif menjadi narasumber seminar, ataupun menulis artikel tentang sejarah, kebudayaan dan sosial di Simalungun, Pamatangsiantar maupun Sumatera Utara.

H. Nikmat Saragih adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Departemen Kesehatan yang saat ini bermukim di Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Selama ini, selain menjadi PNS pernah berkarir sebagai anggota DPRD Kota Tebing Tinggi dari Fraksi Golkar. Demikian pula pernah menjabat sebagai ketua PPNI Tebing Tinggi, Ketua APKASINDO Serdang Bedagai maupun Ketua PMS Kota Tebing Tinggi. Pada masyarakat Simalungun, saat ini menduduki jabatan sebagai salah satu *Majelis Hapartuhaon Nabolon, Dewan Pimpinan Pusat Partuha Maujana Simalungun (MHN DPP PMS)*.



James S.M. Damanik, S.Sos., adalah seorang militer berpangkat *Letnan Kolonel Infanteri* (Letkol Inf). Lahir dan dibesarkan di Kabupaten Simalungun. Menamatkan sekolah menengah atas di Kabanjahe dan sejak sekolah dasar bercita-cita menjadi militer (TNI). Bergabung dengan militer (TNI) melalui Secaba Milsuk TA 1983/1984. Selain di militer, aktif pada organisasi sosial yakni sebagai *Ketua Partuha Maujana Simalungun (PMS) Kota Medan*.



Dr. Erond L. Damanik, M.Si., adalah pengajar tetap di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Adalah alumni pascasarjana Program Doktor (S3) Ilmu Sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, tahun 2016. Menamatkan program magister (S2) dari Universitas Negeri Medan tahun 2005 dan Sarjana (S1) dari Universitas Negeri Medan (2000). Tugas akhir berupa disertasi dengan judul: *Kontestasi Identitas Etnik Pada Politik Lokal: Studi Tentang Makna Etnisitas pada Politik Lokal di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara*, dengan Promotor Prof. Ramlan Surbakti, MA., Ph.D., dan Ko-promotor Dr. Dwi Windyastuti Budi, H., MA.

Aktif menulis pada beberapa media di Medan maupun menjadi narasumber kegiatan seminar, konferensi, dialog ilmiah, wawancara televisi maupun diskusi ilmiah. Beberapa kegiatan internasional yang sudah diikuti adalah seperti pada bulan Juni 2015 menjadi narasumber pada *SSEASR International Conference ke-6* di Colombo, Srilangka, menjadi narasumber pada *SSEASR International Conference ke-5* di Manila, Philipina pada bulan Mei 2013. Pada bulan Juli 2011, menjadi narasumber pada *SSEASR International Conference ke-4* di Thimpu, Bhutan, dan pada bulan September 2010, menjadi narasumber pada *EurASSEA International Conference ke-13* di Berlin, Jerman.

Karya tulis penting yang telah dimuat secara internasional adalah ‘Traces of Early Chinese and Southeast Asian Trade at Benteng Putri Hijau, Namurambe, Northeast Sumatera’, in *Connecting Empires: Selected Papers from the 13th International Conference of the European Association of the Southeast Asian Archaeologist, Volume-2. 2012.*, edited by Dominik Bonatz, Andreas Reinecke and Mai Lin Tjoa-Bonatz., Singapore: NUS Press PTE. Ltd. Tulisan dalam jurnal internasional seperti: ‘Contestation of Ethnic Identity in Forming Ethno-territorial in Pakpak Bharat Regency, North Sumatera Province’, United Kingdom (2016).

Lampiran:

Susunan Panitia
Focus Group Discussion (FGD)
Aktualisasi dan Implementasi Habonaron do Bona Abad 21
Sabtu, 12 Agustus 2017, Hotel Le Polonia Medan

Penasehat : 1. Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.
(*Ketua MHN DPP PMS*)
2. Letkol James S.M. Damanik
(*Ketua PMS Kota Medan*)
Pengarah : St. Ir. Darmansyah Damanik
(*Sekretaris MHN DPP PMS*)

Pelaksana FGD

Ketua : Drs. Baharudin Purba M.Hum
(*Sekretaris DPC PMS Kota Medan*)
Sekretaris : Ir. Ade Farnan Saragih
Moderator : Dr. Erond L. Damanik, M.Si
Notulis : Indra Kelana Jaya, M.Kom.
Protokol : Sandra H. Damanik, M.Pd.
Sekretariat : Boy Saragih

Narasumber utama:

1. Prof. Dr. Ibnu Hajar M.Si
2. Prof. Dr. Amrin Saragih, M.A
3. Dr.med Sarmedi Purba Sp.OG
4. Pdt. Juandaha Raya Purba MT.h
5. H. Nikmat Saragih.

HABONARON DO BONA

Habonaron do Bona (HdB) merupakan acuan filosofis yang paling mendasar bagi sikap mental setiap orang Simalungun. Ia mewarnai emosi, perilaku dan tindakan sosial sehingga menjadi karakter khas orang Simalungun. Formasinya berasal dari nilai-nilai kultural dan sosial sejak era *Nagur*, *Harajaan na Opat*, *Harajaan na Pitu* hingga Pasca kemerdekaan. Bahkan, nilai-nilai sosial dan kulturalnya masih sangat relevan menghadapi setiap perubahan di Abad 21.

Secara linguistik, semiotik dan filosofis, HdB diartikan sebagai 'Kebenaran adalah Pangkal' (*the Truth is the Basic*) bersifat universal, mendasar dan umum. Karena itu, HdB menjadi sumber ilmu dan praksis. Sebagai sumber ilmu, HdB berkenaan dengan epistemologi, ontologi dan aksiologi, sedangkan secara praksis berkaitan dengan norma (akhlak), etika sosial, ekonomi dan politik ataupun urusan rumah tangga.

Sebagai falsafah sosial, HdB merupakan sikap mental yang berada dalam kepala setiap orang Simalungun. Sikap mental ini merupakan kombinasi antara pemikiran dan emosi yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan sosial. Kombinasinya melahirkan perilaku sosial kolektif orang Simalungun. Karena itu, HdB adalah referensi personal, sumber motivasi, inspirasi dan cita-cita sosial guna menafsir dan memahami situasi sosial. Situasi ini adalah cerminan peluang, kesempatan, tantangan, kompetisi dan kontestasi yang diilhami oleh *Habonaron* sebagai sokogurunya.

HdB lahir dari warisan leluhur orang Simalungun. Ia membentuk moralitas sosial dan kultural sebagai tatacara menilai, mengevaluasi dan merespon setiap perubahan sosial dan budaya yang terjadi. Karena hakikatnya yang sangat penting bagi orang Simalungun, dibentuk payung hukumnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun No. 5 Tahun 1960 tertanggal 14 Desember 1960.



Erond L. Damanik, pengajar tetap di Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Menyelesaikan studi Doktor di Universitas Airlangga Surabaya (2016), Magister Sains (2005) dan Sarjana (2000) di Universitas Negeri Medan.

ISBN 978-602-50158-4-7